

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next



Edisi 35
November 2021



9 772655 993006

TERJERAT PINJOL ILEGAL

TIM REDAKSI

Pengarah:
Mira Tayyiba

Wakil Pengarah:
Phillip Gobang

Pemimpin Redaksi:
Rhina Anita

**Wakil
Pemimpin Redaksi:**
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana:
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
Frans Bambang Irawan
M. Taufiq Hidayat
Verawati
Annisa Bonita P.
Walbertus Natalius W.
Primus A Latu B.

Reporter:
Yusuf
Ahmad Irso Kubangun
Meita Pusparini
Emild Kadju

Fotografer:
Agus Yudi Harsono
Doni Paulus Sumule
Sri Indrati Novinarsari
Indra Kusuma

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka
Rahma Aulia Indroputri
Lamdza Rachmattunisa
Dhenty Febrina Sahara
Annas Yudistira Saputra

Produksi:
Fahmie Trihatin J.

Alamat Redaksi:
Biro Humas Kementerian
Komunikasi dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9,
Jakarta Pusat

Tak Ada Kompromi Berantas Pinjol Ilegal!

Salam transformatif untuk pembaca Majalah Kominfo Next. Menjelang akhir tahun 2021, Indonesia diterpa berbagai macam 'badai'. Mulai dari persoalan kesehatan hingga kejahatan bermodus penipuan secara daring. Beberapa bulan terakhir, kita menyaksikan aksi kolaborasi antar kementerian dan lembaga negara dalam memberantas pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal. Kami menilai, diseminasi informasi terhadap kewaspadaan dan edukasi memberantas pinjol ilegal penting terus dilakukan. Oleh karena itu, di Majalah Kominfo Next edisi Oktober 2021 ini secara khusus kami angkat tema utama tentang pemberantasan pinjol ilegal.

Geliat ekonomi digital memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional ternyata tidak selamanya berjalan mulus. Ada hambatan dan tantangan yang juga menyertai. Adalah aktivitas pinjam-meminjam secara sistem elektronik atau lebih dikenal dengan pinjol ilegal. Di sisi lain, pinjol yang legal dan berbadan hukum turut menumbuhkan perekonomian masyarakat kecil, karena dengan meminjam sejumlah uang pada perusahaan resmi dapat membantu masyarakat untuk berwirausaha, mengembangkan modal maupun kebutuhan penting lainnya.

Dengan adanya pinjol legal, kebutuhan yang sifatnya mendesak dan memerlukan waktu yang cepat untuk mendapatkan pinjaman, berbagai platform financial technology (fintech) memang solusinya. Namun kemudian, masyarakat kadang bingung dan belum mengetahui mana pinjol yang legal dan yang ilegal. Pada akhirnya, *modus operandi* dari pelaku pinjol yang tidak bertanggung jawab kerap memanfaatkan momen tersebut.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika terus membangun kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta kementerian dan lembaga terkait dalam memberantas pinjol ilegal. Perlu diketahui, khusus tiga lembaga negara itu memiliki tugas dan peran yang saling terkait untuk memberantas pinjol ilegal. Sehingga tak ada kompromi bagi mereka yang dengan sengaja melakukan kejahatan dan dapat merugikan banyak pihak.

Menkominfo Johnny G. Plate dalam berbagai kesempatan menyatakan komitmen untuk terus memberantas aktivitas pinjol ilegal. Terlebih sejak tahun 2018, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap ribuan pinjol ilegal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rhina Anita

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat
- **Pemimpin Redaksi Majalah Kominfo Next**



Data per 26 Oktober 2021, Kementerian Kominfo telah memutus akses 4.906 pinjol ilegal dan akan terus bertambah secara berkala dalam penanganan yang intensif. Dalam geliat pemutusan akses terhadap pinjol ilegal, Kementerian Kominfo menerima informasi dari tiga sumber, yakni aduan dari masyarakat, patroli siber Kementerian Kominfo dan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk informasi aduan konten, Kementerian Kominfo menyediakan kanal informasi melalui laman web aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, atau WA 08119224545.

Selain Kementerian Kominfo, OJK juga mempunyai peran strategis ihwal pinjol ilegal. Hal mendasar yang perlu diketahui perbedaan antara pinjol legal dan ilegal adalah merujuk pada dasar hukumnya, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK itu, ditegaskan di Pasal 7 bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Untuk memastikan penyelenggara pinjol terdaftar atau tidak, OJK sendiri menyediakan beberapa kanal informasi seperti website www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx, Nomor WhatsApp resmi 081-

157-157-157, layanan telpon/panggilan ke 157, dan juga email: waspadainvestasi@ojk.go.id.

Dari sisi penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia juga mengambil andil sebagai bentuk komitmen bersama untuk memutus mata rantai pinjol ilegal. Oleh karena itu, masyarakat diminta proaktif melaporkan aduan melalui berbagai kanal informasi yang disediakan, diantaranya lewat website <https://patrolisiber.id> dan info@cyber.polri.go.id.

Pembaca Majalah Kominfo Next yang kami hormati, kita tahu bahwa upaya memberantas pinjol ilegal perlu keterlibatan aktif masyarakat. Literasi dan edukasi tentang aspek digitalisasi dan keuangan serta program-program komunikasi publik harus terus terus kita dorong. Upaya seperti ini penting agar masyarakat lebih berhati-hati ketika menerima penawaran dari pinjol ilegal. Melalui diseminasi tentang pencegahan terhadap pinjol ilegal yang kami kemas dalam Majalah Kominfo Next edisi kali, diharapkan menjadi sumber informasi yang tepat dan akurat kepada publik.

Selamat membaca!

Literasi dan edukasi tentang aspek digitalisasi dan keuangan serta program-program komunikasi publik harus terus terus kita dorong. Upaya seperti ini penting agar masyarakat lebih berhati-hati ketika menerima penawaran dari pinjol ilegal.

Daftar

Isi

2 Surat dari MMB 9

6 Rak Buku

8 Teknologi & Gadget

20 KominfoPedia

24 Kabar Istana

34 Liputan Utama

48 TokTok

52 Q&A

58 Liputan Khusus

66 KomEvent

78 Menkominfo Bicara

82 Kominfo Daerah

98 Kabar Covid-10

100 Portal

108 Bahasa

110 Lintas Kominfo

117 Top-10 Hoaks

HARI GURU NASIONAL

25 NOVEMBER 2021



**Bergerak dengan Hati
Pulihkan Pendidikan**



Perpustakaan Kominfo



Lantai 1 Gedung B
Kementerian Kominfo

Senin s.d Jumat
08.30 s.d 15.30



Penulis :
Dr. Rusmono
Donna Sita Indria

Serangkum Disposisi Presiden Soeharto & Ibu Negara

Mungkin ada yang mengira bahwa berkirim surat kepada Presiden dan Ibu Negara yang sehari-hari sibuk, bagaikan menulis di atas pasir pantai, begitu saja lenyap tak berbekas karena tersapu gelombang. Namun tidak seperti itu yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan pendamping setianya, Ibu Negara Hj. Siti Hartinah Soeharto. Hal itu dibuktikan oleh begitu banyak disposisi Pak Harto dan Ibu Tien yang disimpan oleh Dr. Rusmono, yang bertugas sebagai Dokter pribadi beliau berdua selama delapan tahun pada 1986-1993.

Pak Harto dan Ibu Tien tidak pernah suka menunda-nunda pekerjaan. Catatan waktu yang rinci di dalam setiap surat dan disposisinya di dalam buku ini membuktikan bahwa semua surat yang diajukan, seberapa pun ringan isinya, apalagi yang berat-berat, telah diberikan disposisinya pada hari itu juga atau keesokan harinya. Di dalam buku ini dicantumkan juga tanggal dari setiap surat yang diterima oleh ajudan dan tanggal ketika disposisinya ditulis oleh Pak Harto dan Ibu Tien.



Penulis :
**Perhimpunan Pelajar
Indonesia Dunia**
Aninta Mamoedi

Perantau Ilmu Timur Tengah-Afrika

Timur Tengah dan Afrika sering kali dilihat sebagai wilayah dengan kondisi politik yang gonjang-ganjing dan tidak aman. Namun di lain sisi, negara-negara di wilayah ini menjadi destinasi utama untuk pendidikan agama. Berbagai disiplin ilmu pun lahir di sana. Setiap tahun, para santri dan pelajar berusaha untuk masuk ke salah satu universitas di sana. Kisah-kisah mereka menjadi unik karena tidak hanya perbedaan cara belajar yang dilalui, tetapi juga kultur yang sepiintas terlihat lebih keras. Akan tetapi, selalu ada kisah menggugah di balik sebuah perjalanan, dan para perantau ilmu ini membaginya kepada kita.



Penulis :
Garin Nugroho

Krisis dan Paradoks Film Indonesia

Tidak banyak buku yang membahas film Indonesia yang diterbitkan, terlebih terkait sejarah film dengan konteks kesenian dan perubahan sosial politik yang terjadi di masanya. Buku Krisis dan Paradoks Film Indonesia mengisi kekosongan tersebut.

Buku ini membahas film dalam enam babak. Indonesia berkali – kali menghadapi globalisasi dalam beragam bentuk: modal dan administrasi perkebunan (1900), tiruan produk impor (1970-1985), dan liberalisasi ekonomi (1985-1998). Di dalam negeri pun terjadi beberapa kali perseteruan politik atau ideologis dalam berbagai bentuk periode: kemerdekaan (1930-1950), pembasmian komunisme (1950-1970), serta kebebasan dan radikalisme (1998-2013). Globalisasi dan pertentangan ideologis memengaruhi konstelasi ekonomi, politik, budaya pop, dan tentu saja film.

Meilawati ,
Pustakawan Ahli Muda
Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal



Ragam Perspektif Dampak Covid-19

Sumbangan Ilmuwan AIPI untuk Bangsa Indonesia

Helmi Fajar Andrianto
Redaktur Pelaksana KominfoNext



Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak di seluruh lini kehidupan masyarakat. Mulai dari lingkungan alam dan kesehatan, pembangunan nasional, sistem hukum dan politik, sosial - budaya, serta bidang-bidang lainnya. Berangkat dari keprihatinan terhadap pandemi, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) menerbitkan sebuah buku berkonsep bunga rampai, yang menyajikan tulisan-tulisan terkait dengan pandemi Covid-19 dari tokoh-tokoh ilmu pengetahuan Indonesia di berbagai disiplin ilmu. Mulai dari Emil Salim (ahli ekonomi), Yudi Latif (peneliti LIPI), Yunita T Winarto (Guru Besar Antropologi – Purna Bakti), serta tokoh-tokoh ilmuwan lain dengan segudang pengalaman dan dasar keilmuan yang sudah tidak diragukan lagi di disiplin ilmunya masing-masing.

Dampak Covid-19 yang tidak hanya pada satu disiplin keilmuan, mendorong terbitnya buku ini untuk bisa mengetengahkan bagaimana Covid-19 ditangani serta tentunya bagaimana berbagai ragam disiplin tersebut melihat secara lebih detail tentang Covid-19 dari sudut pandang keilmuan masing-masing. Hal ini menjadi menarik menurut penulis, karena ragam sudut pandang yang dihadirkan yang terkadang di luar ekspektasi, telah memberikan wawasan dan *insight* baru mengenai bagaimana Covid-19 ini terjadi, apa yang membentuknya, bagaimana penanganannya, serta dampaknya di berbagai bidang. Tentunya, para tokoh-tokoh yang ikut berkontribusi menyumbangkan hasil pemikiran mereka melalui tulisan-tulisan di bunga rampai ini, turut menjadi aspek yang membuat penulis tertarik untuk lebih jauh mendalami mengenai buku ini.



Book Review



Ragam Perspektif Dampak Covid-19 Sumbangan Ilmuwan AIPI untuk Bangsa Indonesia

Penulis :

Mayling Oey-Gardiner dan M. Amin Abdullah

Penerbit :

Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Halaman :

520 halaman

ISBN:

978-623-321-081-2

Buku ini terbagi menjadi empat bagian, yaitu :

Bab 1 : Manusia dalam lingkungan alam dan kesehatan

Bab 2 : Dampak Covid-19 pada pembangunan Indonesia

Bab 3 : Dampak Covid-19 pada sistem hukum dan politik

Bab 4 : Dampak Covid-19 pada kehidupan sosial – budaya

Masing-masing bagian terdiri dari beberapa bab yang merupakan tulisan-tulisan dari para anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dalam berbagai ragam disiplin ilmu dan keahlian.

Bagian I – Manusia dalam lingkungan alam dan kesehatan

Bab awal pada bagian ini mengupas tentang bagaimana Covid-19 bisa muncul dilihat dari sudut pandang ilmu biologi dasar. Namun, jangan terperangkap oleh kata 'dasar' yang ada di kalimat sebelumnya, karena ternyata 'dasar' dalam buku ini tidak se-'dasar' yang dianggap penulis ketika membaca bab tersebut.

Dalam dua dekade di abad ke-21 ini, banyak muncul epidemi seperti SARS, flu babi, MERS, Ebola, dan tentu saja Covid-19, yang semua penyakit tersebut adalah penyakit *zoonotik*, yaitu penyakit yang ditularkan oleh satwa ke manusia. Menurut UN *Environment Program* (UNEP) hampir 60% dari seluruh penyakit infeksi yang saat ini dikenal, dan 75% penyakit infeksi yang muncul belakangan ini, berasal dari hewan (*zoonotik*). Empat dari penyakit yang disebutkan sebelumnya, disebabkan oleh virus yang berkaitan dengan kelelawar. Hal ini dikarenakan karena kelelawar merupakan inang alami bagi beberapa virus seperti *lyssavirus*, *Paramyxovirus*, dan *Filovirus*. Melalui proses evolusi, kelelawar membentuk sistem kekebalan terhadap virus ini, namun di lain sisi, virus ini sangat patogen bagi makhluk lain, termasuk manusia. Penyebaran virus tersebut meningkat potensinya, karena kerusakan habitat hewan, deforestasi, serta pembukaan lahan untuk keperluan manusia. Sehingga semakin mendekatkan habitat hewan tersebut dan meningkatkan interaksi ke manusia yang pada gilirannya, akan mempermudah virus-virus untuk melompat dari inang ke calon korban lain.

Dalam tulisan Antonius Suwanto[1], dikupas tentang faktor-faktor yang dapat mempermudah penularan penyakit patogen seperti Covid-19. Faktor genetik ternyata memberikan dampak dominan apakah suatu penyakit berbahaya atau tidak terhadap seseorang. Kelompok peneliti dari Korea Selatan dan UK melaporkan bahwa ada variasi genetik yang menyebabkan perbedaan kerentanan manusia terhadap Covid-19. Varian yang rentan mayoritas ditemukan di negara-negara Eropa, sedangkan Asia Timur mayoritas varian yang tahan terhadap Covid-19. Selain faktor genetik, faktor lain yaitu tipe virusnya itu sendiri, kondisi lingkungan, dan gaya hidup manusianya. Hal yang menarik yang dikupas dalam tulisan Antonius Suwanto yaitu bahwa ternyata kebersihan berlebihan (*hyper hygienic*) ternyata tidak selalu menguntungkan. Dengan pola *hyper hygienic*, kita melewatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan bakteri-

bakteri baik dari alam yang bisa membantu tubuh kita untuk melawan mikroorganisme berbahaya. Makanan fermentasi seperti tempe, oncom, tape, kimchi, yoghurt, petis, dan terasi merupakan cara manusia untuk mendapatkan bakteri-bakteri baik secara sistematis.

Konsep *One Health* menjadi topik yang dibahas dalam upaya untuk penanganan Covid-19 serta menghadapi *outbreak* selanjutnya. Konsep ini merupakan pendekatan multidisiplin yang memperhatikan tidak hanya kesehatan manusia, tetapi juga hewan, tumbuhan dan ekosistem sebagai aspek yang saling berkaitan. Pendekatan 3C, *Communication, Coordination, dan Collaboration*, dari semua sektor dalam implementasi respon terhadap *outbreak* menjadi kunci dalam konsep *One Health*. Setiap aktivitas, misalkan mempelajari ekologi virus SARS CoV-2 akan berpengaruh tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga mengubah aktivitas masyarakat secara keseluruhan, baik sektor industri, intensifikasi bidang agrikultur, urbanisasi, maupun perjalanan dan perdagangan internasional. Konsep ini bertujuan untuk merumuskan desain dan implementasi program, kebijakan, serta penelitian yang melibatkan berbagai sektor tersebut dalam upaya mitigasi Covid-19 serta tindakan preventif terhadap kemungkinan *outbreak* berikutnya (Mackenzie dan Jeggo, 2020).

[1] Guru Besar Mikrobiologi, Institut Pertanian Bogor (IPB)



Sejalan dengan konsep *One Health*, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Satriyo Soemantri Brodjonegoro mengenalkan istilah kesehatan digital (*digital health*). Kesehatan digital merupakan terminologi yang menggambarkan kemampuan perangkat digital untuk merekam, mengelola, menyimpan, menganalisis, menghubungkan, dan berbagi informasi dalam bentuk teks, foto, sinyal untuk melakukan observasi, asesmen, pembelajaran, pengelolaan, dan memperbaiki pelayanan kesehatan bagi individu maupun populasi (Satriyo, 2021). Adanya kesehatan digital, memungkinkan dilaksanakannya satu data kesehatan yang memungkinkan peningkatan pelayanan kesehatan yang efektif bagi individu baik yang berada dalam fasilitas pelayanan kesehatan, maupun secara umum. Didukung dengan perkembangan alat *diagnostic* berbasis digital seperti sistem pencitraan, laboratorium dalam *chip*, *monitor cardio-pulmonary*, dan fungsi lain yang menggunakan sinyal digital sehingga data potensial yang bermanfaat bagi pelayanan kesehatan yang lebih baik, cepat, dan terintegrasi.

Bagian II

Pembangunan Indonesia perlu 18 tahun untuk mencapai "Low Middle-Income Country", 34 tahun untuk mencapai High Middle – Income Country, dan diperkirakan akan dibutuhkan periode 25 tahun untuk bisa mencapai High Income Country.

Emil Salim[2] dalam tulisannya menilai bahwa Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam terbesar di antara negara-negara kepulauan yang tersebar di khatulistiwa. Namun, potensi ini masih belum bisa meningkatkan pertumbuhan pembangunan Indonesia yang dinilai masih lamban. Lambannya pertumbuhan pembangunan disinyalir bersumber pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hal ini tercermin pada rendahnya ranking Indonesia dalam evaluasi *Program for International Students Assessment (PISA)* oleh OECD untuk "membaca, berhitung, dan sains" sehingga di antara 70 negara, Indonesia masuk peringkat ke 62 (di bawah Thailand dan Vietnam). Selain itu juga, buruknya *incremental capital output ratio* sebesar 6,30 yang lebih tinggi dibandingkan India(4,64) maupun Vietnam (4,31). Hal ini menandakan bahwa tenaga kerja Indonesia memerlukan 50% satuan modal investasi lebih besar untuk mendapatkan output yang sama besar dibandingkan tenaga kerja India dan Vietnam. Kesimpulan Bank Dunia adalah bahwa dengan kualitas pendidikan dan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang masih rendah, kebanyakan masyarakat Indonesia belum memiliki keterampilan untuk Industri 2.0, apalagi untuk 4.0.

Munculnya pandemi Covid-19 tentunya berpengaruh pada upaya peningkatan kualitas sdm Indonesia. Momentum bonus demografi dengan dominasi kelompok penduduk usia kerja 15-64 tahun harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kebijakan penanganan Covid-19 yang mengharuskan belajar secara *online*, harus dapat diimbangi dengan fasilitas komunikasi yang mumpuni dan juga peningkatan kualitas teknis pengajar. Sehingga program peningkatan kualitas SDM bonus demografi, bisa tetap berjalan yang pada akhirnya akan menjadi penggerak Indonesia lepas landas 2045.

Lebih lanjut, Mayling Oey-Gardiner[3] mencermati mengenai penanganan Covid-19 dari sisi timbangan aspek kesehatan dan ekonomi. Dari sisi penanganan bidang kesehatan, berdasarkan data per September 2020 yang dirilis Universitas John Hopkins, Indonesia berada di peringkat tengah dengan jumlah peningkatan kasus positif mencapai 25 kali lipat hanya dalam waktu 4,5 bulan. Rasio kematian akibat Covid-19 menurun, walaupun masih dibawah rata-rata dunia dengan nilai 7,58% pada awal Mei 2020 menjadi 3,8% pada September 2020 (nilai rata-

[2] Anggota Komisi Ilmu Sosial - AIPI

[3] Ketua Komisi Ilmu Sosial - AIPI



rata dunia mendekati 3%). Marling juga melihat sisi kepemimpinan di suatu negara sebagai salah satu faktor keberhasilan penanganan Covid-19. Amerika dan Brasil menjadi contoh bagaimana kebijakan politik pimpinan negara, yaitu Donald Trump di Amerika dan Jair Bolsonaro yang menolak keberadaan Covid-19, telah membawa negaranya masing-masing ke jurang penanganan terburuk Covid-19.

Topik mengenai ekonomi digital tidak lepas dikupas dalam buku ini. Sri Adiningsih[4] dalam tulisannya menceritakan bahwa di tengah pandemi Covid-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi di Indonesia dan negara-negara lain di dunia hingga menyentuh -5,3% di Q2 2020, ternyata memberi pengaruh berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi digital. Kebijakan penanganan Covid-19 oleh pemerintah Indonesia yang mewajibkan masyarakat di rumah saja, menyebabkan perubahan pola hidup masyarakat. Dari yang semula berbelanja ke pasar, berubah menjadi belanja melalui *marketplace*; dari yang biasanya makan *dine in* di resto favorit, berubah menjadi layanan makan pesan-antar; dan lain sebagainya. Peningkatan pengguna internet di Indonesia pun serta merta melonjak mencapai 37% selama pandemi[5].

Secara umum, fasilitas internet telah memudahkan akses terhadap kehidupan sehari-hari

di tengah PSBB yang diterapkan dalam upaya penanganan Covid-19. Pandemi telah mempengaruhi semua aspek kehidupan, mendigitalisasi bisnis, *sistem tracking* kesehatan dan keamanan pandemi, dan tentu saja cara bekerja, bersekolah serta bersilaturahmi yang memanfaatkan fasilitas internet. Oleh karena itu, ekonomi digital masih bisa tumbuh 5% di tahun 2019 – 2020, meningkat dari sebesar 100 miliar dollar AS menjadi 105 miliar dollar AS. Bahkan, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi digital mencapai 11% pada periode yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa pandemi telah menyebabkan lompatan ekonomi digital di Indonesia.

Bagian III

Penggunaan hukum sebagai sarana pengendalian sosial dalam konteks pandemi Covid-19, menjadi salah satu perbincangan yang menjadi perdebatan. Harkristuti Harkrisnowo[6] membagi para pihak yang terlibat dalam perdebatan ini sebagai kaum konservatif dan liberal. Kaum konservatif memandang bahwa negara memang berkewajiban melindungi warganya secara ketat dan menjamin bahwa kondisi tidak makin memburuk melalui penetapan berbagai ketentuan yang dibutuhkan. Sebagai konsekuensinya, kegiatan dan

mobilitas masyarakat mau tidak mau akan menjadi terbatas. Di sisi lain, kaum liberal memandang bahwa walaupun memang diperlukan untuk mengambil langkah-langkah pembatasan kegiatan dan mobilitas warga, akan tetapi hak-hak asasi warga tidak boleh dilanggar oleh negara. Sebagian besar orang setuju bahwa pembatasan hak-hak individu memang diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Pembentukan aturan dan hukum terkait pandemi, merupakan hal yang baru, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Sehingga tidak heran jika pembentukan aturan hukum ini sedikit banyak menimbulkan perdebatan di masyarakat kita. Namun, perlu dicermati bahwa terdapat aturan hukum yang dapat disebut praktek dan prinsip aturan hukum yang efektif, diantaranya kepastian hukum, transparansi dalam pengambilan keputusan, kejelasan dalam komunikasi, tindakan darurat dini, dan strategi terkoordinasi.

Dalam tulisannya, Harkristuti memotret tentang perjalanan peraturan hukum yang dibentuk Indonesia dalam upaya penanganan Covid-19. Atas dasar kondisi kedaruratan, pemerintah mengesahkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid (Keppres 11/2020). Tentunya,

[5] Data Google, Temasek, dan Bain & Company - November 2020 [6] Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Keppres ini berbeda dengan definisi Perpu 23 Tahun 1959 terkait penetapan “Negara Dalam Keadaan Darurat” jika dilihat dari pertimbangan kenapa aturan ini dikeluarkan. Pada saat yang sama dengan dikeluarkannya Keppres 11/2020, disahkan juga Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 – yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. Harkristuti meringkas isi Perpu ini sebagai peraturan yang memberikan legitimasi pada pemerintah untuk mengambil langkah kebijakan secara cepat untuk menyelamatkan keuangan negara akibat wabah Covid-19. Perpu ini menjadi sorotan publik karena pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, belanja negara, hingga pemulihan ekonomi nasional. Muncul pendapat bahwa pasal ini akan memberikan impunitas bagi mereka yang sengaja ataupun lalai melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan tugas tersebut. Namun, pendapat ini dipatahkan pada pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas harus berdasarkan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian IV

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat paguyuban (*Gemeinschaft*), dengan ciri utama yaitu masyarakat yang suka dan terbiasa beramai-ramai, berkumpul, baik di pasar, arisan, menonton pertunjukan, hingga bekerja bersama yang dikenal dengan gotong royong. Kebiasaan ini termasuk didalamnya aspek ritual agama, misal bagi umat Islam, silaturahmi idul fitri, tahlilan, dll. Kebijakan pembatasan kerumunan selama pandemi, menyebabkan kebiasaan masyarakat

tidak bisa dilakukan seperti biasa. Masyarakat dituntut untuk bisa mengimplementasikan adaptasi kebiasaan baru. Sebenarnya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat *paguyuban* masih tetap dilaksanakan seperti sediakala, namun dengan catatan tegas dan jelas, bahwa kegiatan tersebut harus dibarengi, dipandu, dan patuh secara ketat dan penuh disiplin pada aturan protokol kesehatan.

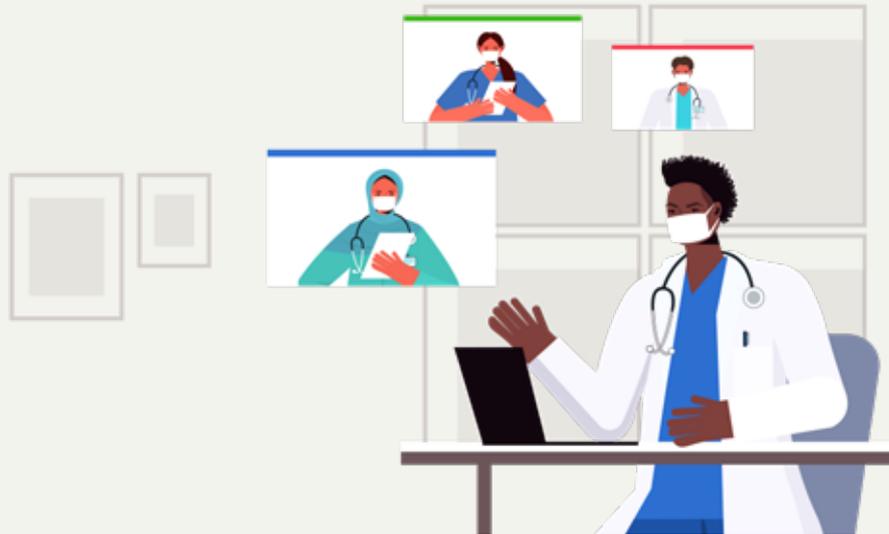
Amin Abdullah[7] dalam tulisannya mencermati friksi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat paguyuban ini dalam hal pemulasaran jenazah. Banyak diberitakan di media massa bahwa pihak keluarga mengambil paksa jenazah keluarganya yang positif Covid-19 dari *ambulance* maupun rumah sakit. Tentunya, dari sisi sains, hal ini sangat berbahaya, karena walaupun sudah meninggal, seseorang masih tetap bisa menularkan virus corona ke orang lain. Aksi sekelompok masyarakat ini dapat menimbulkan cluster baru penyebaran virus corona. Disisi lain, masyarakat kurang percaya dengan tata cara yang telah dilakukan pihak rumah sakit ketika memulasarkan keluarga mereka. Mulai dari, apakah jenazah dikebumikan menghadap kiblat, bagaimana proses pemulasaraannya itu sendiri, serta keinginan untuk memberikan penghormatan terakhir melalui shalat jenazah di dekat almarhum, yang tentunya tidak dimungkinkan dilakukan pada jenazah yang meninggal karena Covid-19.

Salus populi suprema lex esto – Asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi

Hal yang menjadi karakteristik pada bidang hukum di masa *pandemic* ini adalah penggunaan hukum sebagai alat bagi pemerintah dalam upaya memperlambat penyebaran virus Covid-19. Seperti misalnya hukum yang membatasi pergerakan masyarakat, jika dilihat dari konsekuensi keputusan, pembatasan gerak masyarakat merupakan jenis kebijakan sosial. Namun, agar kebijakan ini bisa berlaku dan memastikan semua masyarakat mematuhi, maka diberlakukan hukum berupa sanksi.



[7] Ketua Komisi Kebudayaan AIPI – Guru Besar UIN Sunan Kalijaga



Amin mendorong persoalan ini agar dilakukan mediasi antara pelaku sains (pemerintah dan rumah sakit) dengan masyarakat pelaku tradisi dan agama (*paguyuban*). Hal pertama yang harus didorong yaitu komunikasi yang jelas, lengkap, dan terbuka dari pihak rumah sakit kepada keluarga pasien Covid-19. Dari awal, harus dijelaskan runutan penanganan jika semisal pasien meninggal dunia, bagaimana prosesnya dan akan seperti apa, harus dibicarakan dengan jelas kepada pihak keluarga. Hal ini untuk bisa memberikan *conditioning state* bagi pihak keluarga pada proses yang terjadi di rumah sakit. Jika ternyata sudah dikomunikasikan, namun tetap tidak mendapatkan titik terang, maka langkah kedua yaitu menjembatani kepentingan keluarga dengan tanpa melanggar protokol kesehatan yang telah ditentukan. Misalkan, jika memang keluarga bersikukuh untuk ikut memulasarakan jenazah, maka pihak keluarga difasilitasi untuk bisa menggunakan APD dan prosedur lainnya sehingga bisa ikut memulasarakan keluarganya dan memberikan penghormatan terakhir.

Prof. Azyumardi Azra menyetengahkan fenomena respon terhadap Covid-19 oleh umat yang meyakini teologi secara Jabariyah (*predestination*) yang percaya kematian akibat virus korona adalah urusan takdir. Kalau takdirnya tidak mati, Virus Corona tidak akan mempan. Umat

beragama ini tetap menjalankan praktik ritual keagamaannya secara berjamaah dalam jumlah yang banyak. Oleh Azyumardi, kelompok ini disebut sebagai splinter. Para splinter ini tersebar khususnya di agama-agama yang banyak penganutnya secara global seperti Kristianitas, Islam, Hindu atau Budha.

Pada kenyataannya, virus korona tidak mengenal agama, bangsa, dan wilayah negara, upaya penanganannya tentu saja diperlukan peran dari umat beragama itu sendiri mulai dari ulama, ormas, fungsionaris, maupun partisipan, tidak boleh berpangku tangan atau memberikan respon yang tepat ketika terancam virus global ini. Upaya komunikasi dari para pimpinan agama wajib dilakukan untuk memberikan pemahaman yang benar tentang virus ini serta pentingnya penyesuaian pandangan dan praksis keagamaan menghadapi wabah yang sangat membahayakan jiwa manusia ini.

Buku ini menjadi semacam catatan sejarah yang ditulis oleh para akademisi yang kompeten di bidangnya masing-masing. Dampak Covid-19 pada semua aspek kehidupan dipotret dengan pendekatan ilmiah, membuat pembaca buku ini bisa mendapatkan bayangan seperti apa yang terjadi pada aspek-aspek kehidupan masyarakat di luar aspek kesehatan dan ekonomi yang memang paling sering dibahas di media massa.

Tata Cara Pendaftaran Ruang Buku Kominfo

Ruang Buku Kominfo adalah Akses Koleksi Digital Perpustakaan Kementerian Kominfo

1



Kirimkan nama, NIP, e-mail, & satuan kerja ke:

perpustakaan@mail.kominfo.go.id

Subjek Email :
Pendaftaran Ruang
Buku Kominfo

2

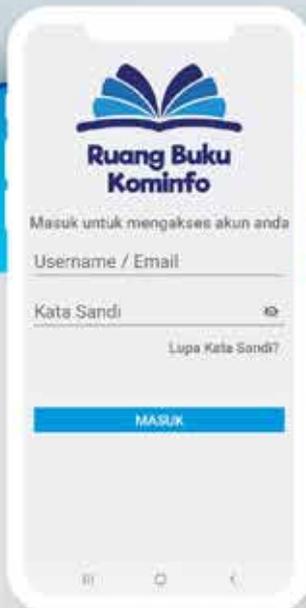


Akan ada e-mail balasan dari perpustakaan kominfo berupa username/email dan password

3



Unduh "Ruang Buku Kominfo" di playstore/ appstore



4 Masukan username/email dan password



5 Klik buku yang ingin anda pinjam lalu klik pinjam



6 Selamat menikmati layanan EPerpustakaan

Unduh Ruang Buku Kominfo di sini :



Contact Person :
Agung (0813-8336-4421)



Sejarah Teknologi Televisi Dunia

Tanggal 21 November diperingati sebagai Hari Televisi Sedunia. Pada tanggal tersebut, kita diingatkan mengenai masalah-masalah terkait dengan kotak bercahaya yang telah menemani peradaban manusia selama hampir satu abad. Hari Televisi Sedunia merujuk pada keputusan resolusi Majelis Umum PBB pada Maret 1998, dimana resolusi tersebut dibuat untuk memberikan wawasan kepada masyarakat dunia tentang kebebasan menonton serta segala informasi mengenai televisi. Tanggal 21 November dipilih berdasarkan pelaksanaan Forum Televisi Dunia di tahun 1996.

Momentum Hari Televisi Sedunia kita maknai sebagai pengingat akan pentingnya peran televisi (TV), tanggungjawab lembaga penyiaran, serta kebijaksanaan yang harus dilakukan pemirsa TV dalam memilih program siaran. Harapannya, TV bisa lebih maksimal dalam memberikan manfaat ke masyarakat dunia, baik sebagai media informasi maupun sarana hiburan.

TEKNO LOGI & GAD GET

John Logie Baird bersama alat ciptaannya

Kata televisi (TV) pertama kali digunakan oleh Profesor Rusia Constantin Dmitrievich Persky saat memaparkan makalahnya pada Kongres Listrik Internasional ke-1. Dalam makalah tersebut, Persky mengacu pada penelitian Paul Gottlieb Nipkow dan Porfiry Ivanovic Bakhmetiev yang mencoba menggunakan fotolistrik dengan sifat selenium sebagai dasar di bidang transmisi gambar. Penelitian mengenai transmisi gambar terus berlanjut, hingga pada tahun 1925, seorang berkebangsaan Scotlandia, John Logie Baird sukses mengembangkan teknologi transmisi gambar hidup yang bergerak. Inilah cikal bakal TV hingga terus berkembang dengan berbagai teknologinya sampai saat ini. Rubrik *gadget* dan teknologi edisi ini akan membahas bagaimana TV bertransformasi dalam memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan pirsawan dunia.



1. Televisi Generasi Pertama

TV pertama yang dikembangkan John Logie Baird bukanlah TV dengan bentuk kotak kecil yang bisa ditempatkan di ruang tamu Sobatkom semua ya. TV ini berbentuk lempengan-lempengan dan tabung serta kabel-kabel yang bersliweran. Temuan Baird kemudian disempurnakan Philo Taylor Farnsworth, seorang ilmuwan asal Utah, Amerika Serikat.



Gagasannya mengenai *image dissector*, menjadi dasar kerja TV tabung hingga TV modern. Pada saat tersebut, TV masih menghasilkan hanya gambar bergerak hitam-putih saja frhnshn konsumsi daya yang besar serta tentunya teknologi analog.

<https://www.kompas.com/global/read/2021/11/21/113439370/21-november-1996-forum-televisi-dunia-jadi-cikal-bakal-hari-televisi>

<https://ourstory.id/perkembangan-televisi-dari-masa-ke-masa/>

Sumber Foto : Unsplash

2. Televisi 1940

Pengoperasian pemancar televisi pertama di Berlin pada tahun 1939, semakin mempopulerkan televisi di era 1940an. Dunia mulai secara luas dikenalkan dengan alat komunikasi audio-visual yang bisa menginformasikan segala rupa kejadian di seluruh dunia.

Setelah Perang Dunia II berakhir di tahun 1945, TV mulai mendapatkan perhatian masyarakat dunia. Kebutuhan untuk mendapatkan informasi dan hiburan pasca perang, mendorong masyarakat untuk membeli dan menjadi pirsawan TV. Peran radio lambat laun mulai tergantikan.



3. Era TV Berwarna

Akhir tahun 1950an, sebagian besar masyarakat di dunia sudah memiliki TV di rumah. Meskipun sebenarnya TV berwarna sudah ditemukan, namun masyarakat masih menggunakan TV hitam-putih. Tahun 1954, perusahaan elektronik Amerika bernama *Radio Corporation of America (RCA)* mulai memproduksi TV berwarna pertama. Teknologi ini mengusung sistem televisi berwarna pertama dengan nama CT-100. TV berwarna ini dirancang dengan layar 12 inchi dan dijual pertama kali dengan harga 1000 dollar. Harga yang cukup mahal di kala itu.



Walaupun TV berwarna sendiri sudah ditemukan di awal 1950an, namun siaran TV di tahun-tahun tersebut hanya mendukung mode hitam putih. Sehingga, fungsi TV berwarna menjadi mubazir, dan masyarakat merasa cukup menggunakan TV hitam putih saja. Baru pada tahun 1966, siaran TV sudah bisa menyiarkan gambar berwarna. Sehingga, di tahun-tahun setelahnya, TV berwarna menjadi semakin populer dan menggerus penggunaan TV hitam putih di rumah-rumah.

4. TV Plasma³

Tahun 1997, mulai hadir teknologi TV Plasma. Teknologi ini memungkinkan bentuk TV yang lebih ramping dan minimalis dibanding TV Tabung konvensional yang besar dan cukup banyak memakan ruang. TV Plasma menggunakan teknologi *display* yang menggunakan gas-gas berukuran kecil. Tiap sel berperan sebagai neon yang memancarkan cahaya ultraviolet yang kemudian menghasilkan cahaya RGB (*red, green, blue*) dan dipantulkan ke layar. Pantulan cahaya ini memungkinkan TV bisa menghasilkan gambar berwarna untuk bisa dinikmati oleh pirsawan.

Walaupun lebih kecil dari TV tabung konvensional, namun TV ini masih terhitung tebal yang disebabkan karena neon yang harus diapit oleh dua kaca TV. Pada tahun 2014, TV Plasma semakin tergeser dengan TV berteknologi LCD, LED, maupun OLED yang memungkinkan televisi bisa lebih ramping dan penggunaan daya yang lebih efisien.



5. Flat TV

Tahun 2006 menandai dimulainya era TV layar datar. Sejak awal ditemukan TV, layar bagian luar TV berbentuk kaca cembung untuk bisa menghasilkan gambar. Hadirnya teknologi sistem LCD TV, memungkinkan layar TV menjadi rata dan bentuk yang lebih ramping. Sistem LCD diawali dengan penggunaan LED (*Light Emitting Dioda*) yang menggantikan peran neon untuk menghasilkan cahaya *backlight* TV. LED lebih efisien dari sisi ukuran, *life-time*, dan karena sedikit menghasilkan panas, maka konsumsi daya listriknya pun semakin efisien.



Tahun 2013, muncul teknologi yang merupakan pengembangan dari LED yaitu *Organic-LED* (OLED). OLED dibuat dengan senyawa organik yang menyala ketika dialiri listrik. Walaupun dari sisi kualitas gambar, efisiensi daya serta *life time*, peningkatannya tidak terlalu signifikan dibanding LED biasa, namun teknologi ini memungkinkan TV dibuat menjadi jauh lebih tipis, kecil dan fleksibel.

5. Smart TV

Digitalisasi di dunia dan juga perubahan perilaku pengguna masyarakat di era digital, mendorong munculnya *Smart TV*. Secara tampilan, TV ini sebenarnya masih memakai teknologi- display seperti sebelumnya (LED/OLED, dll) dan bentuk yang serupa dengan TV layar datar lainnya. Yang membedakan lebih ke fitur operating system yang tertanam dalam TV tersebut. *Smart TV* biasanya dilengkapi dengan *operating system* yang memungkinkan pengguna bisa menginstal bermacam-macam aplikasi didalamnya. Aplikasi yang tersedia, biasanya lebih ke aplikasi video *on demand*, maupun hiburan lainnya.



Dengan koneksi ke internet, baik melalui kabel LAN maupun Wifi, pengguna bebas berseluncur menikmati konten-konten video yang tersedia di jagat maya. Selain tentunya, fitur utama TV untuk menangkap siaran TV dari lembaga penyiaran juga tersedia di *Smart TV*.



Pinjol Legal vs Ilegal

Halo SobatKom!

Siapa nih SobatKom yang pernah menggunakan layanan pinjaman online? Belakangan ini, isu seputar pinjaman online sedang ramai dibicarakan, karena maraknya aplikasi pinjaman online ilegal yang beredar dan meneror para penggunanya.

Nah, supaya SobatKom dapat berhati-hati dalam menggunakan layanan pinjol, Kominfopedia kali ini akan membahas seputar definisi hingga perbedaan antara pinjol yang legal maupun ilegal.

Pinjaman online, atau yang biasa disebut juga Fintech Peer-to-Peer Lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), adalah

salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung.

Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara *Fintech Lending*, baik melalui aplikasi maupun laman website. *Fintech* bersifat umum dan tidak terbatas pada satu industri jasa keuangan tertentu. *Fintech Lending* terbatas pada inovasi jasa keuangan pada transaksi pinjam meminjam saja. Lalu apa saja perbedaan antara yang legal dan ilegal?



Regulator/Pengawas

Tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan Penyelenggara *Fintech Lending* Ilegal. Sedangkan, Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin di OJK berada dalam pengawasan OJK sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen.



Bunga & Denda

Penyelenggara *Fintech Lending* ilegal mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan. Sedangkan, *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin OJK diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga, dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada pengguna. AFPI mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok Pinjaman.



Kepatuhan Peraturan

Penyelenggara *Fintech Lending* ilegal melakukan kegiatan tanpa tunduk pada peraturan, baik POJK maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Sedangkan, Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin OJK wajib untuk tunduk pada peraturan, baik POJK, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pengurus

Direksi dan Komisaris Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin OJK jelas orang-orangnya dan harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun di Industri Jasa Keuangan, pada level manajerial. Sedangkan tidak ada standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara *Fintech Lending* ilegal.



Cara Penagihan

Penyelenggara *Fintech Lending* ilegal melakukan penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum. Sedangkan tenaga penagih pada *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin dari OJK wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI.



Asosiasi

Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin di OJK wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk, yaitu Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Sedangkan Penyelenggara *Fintech Lending* ilegal tidak memiliki asosiasi ataupun tidak dapat menjadi anggota AFPI.



Lokasi Kantor/Domisili

Lokasi kantor *Fintech Lending* ilegal tidak jelas/ditutupi dan bisa jadi berada di luar negeri untuk menghindari aparat hukum. Sedangkan lokasi kantor Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin OJK jelas, disurvei oleh OJK, dan dapat dengan mudah ditemui di Google.



Syarat Pinjam Meminjam

Pinjaman pada Penyelenggara *Fintech Lending* ilegal cenderung sangat mudah, tanpa menanyakan keperluan pinjaman Sedangkan Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin OJK perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan credit scoring.



Pengaduan Konsumen

Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin OJK menyediakan sarana pengaduan Pengguna dan wajib menindaklanjuti pengaduan serta melaporkan tidak lanjutnya kepada OJK. Selain itu, Pengguna juga dapat menyampaikan pengaduan melalui AFPL dan Ok. Selain itu, dalam hal terjadi sengketa, Pengguna juga dapat difasilitasi oleh OJK maupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa *Fintech Lending* ilegal tidak menanggapi pengaduan Pengguna dengan baik.



Status

Penyelenggara *Fintech Lending* ilegal tentunya berstatus ilegal, dan menjadi target dari Satgas waspada Investasi (SW) bersama Kominfo, Google Indonesia, dan Direktorat Cybercrime Polri. Sedangkan Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin OJK berstatus legal sesuai dengan POJK 77/POJK.01/2016..



Keamanan Nasional

Direksi, Komisaris dan Pemegang saham pada Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin OJK wajib mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh AFPI untuk menyamakan pemahaman dalam mengelola bisnis *Fintech Lending* Sedangkan Penyelenggara *Fintech Lending* ilegal tidak mewajibkan pelatihan/sertifikasi apapun.





Kompetensi Pengelola

Direksi, Komisaris dan Pemegang saham pada Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin OJK wajib mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh AFPI untuk menyamakan pemahaman dalam mengelola bisnis *Fintech Lending*. Sedangkan Penyelenggara *Fintech Lending* ilegal tidak mewajibkan pelatihan/sertifikasi apapun.



Akses Data Pribadi

Aplikasi *Fintech Lending* ilegal akan meminta akses kepada seluruh pribadi yang ada di dalam handphone Pengguna yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan penagihan. Sedangkan *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin OJK hanya diizinkan mengakses Camera, Microphone, dan Location (CEMILAN) pada handphone Pengguna.



Risiko bagi Lender (Pemberi Pinjaman)

Lender pada Penyelenggara *Fintech Lending* ilegal memiliki risiko yang sangat tinggi, terutama risiko penyalahgunaan dana, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai, dan/atau berpotensi praktik *shadow banking* dan *ponzi scheme*. Sedangkan pada Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin OJK, lalu lintas dana dilakukan melalui sistem perbankan dan segala manfaat ekonomi maupun biaya yang dikenakan kepada Lender dinyatakan secara jelas dalam perjanjian.

Sumber: Dikutip sepenuhnya dari

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>



Empat Bahasan Presiden Jokowi
dan Presiden Biden:

Dari Pandemi Hingga Presidensi G20

Presiden Joko Widodo membahas sejumlah penguatan kerja sama Indonesia-Amerika Serikat dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, di Scottish Event Campus (SEC), Glasgow, Skotlandia, pada Senin, 1 November 2021. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev



Presiden Joko Widodo membahas sejumlah penguatan kerja sama Indonesia-Amerika Serikat dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, di Scottish Event Campus (SEC), Glasgow, Skotlandia, pada Senin, 1 November 2021. Presiden Jokowi mengapresiasi kerja sama yang dilakukan selama pandemi.

Pertama, Indonesia menghargai kerja sama bidang kesehatan selama pandemi mulai dari penerimaan stok vaksin melalui mekanisme dose-sharing, ventilator, obat-obatan teurapeutik, hingga alat kesehatan lainnya. Presiden Jokowi mengatakan Indonesia tertarik untuk menjadi bagian dari rantai pasok global di bidang kesehatan melalui pembangunan industri kesehatan Indonesia.

Kedua, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya untuk memperkuat kerja sama ekonomi terutama dalam pengembangan ekonomi hijau. Menurut Presiden, Indonesia dapat menjadi mitra kerja sama ekonomi yang handal.

Ketiga, terkait perubahan iklim, Presiden kembali menekankan komitmen Indonesia dalam mengurangi

emisi karbon. Indonesia telah menunjukkan hasil yang baik dalam menurunkan tingkat deforestasi secara signifikan dan tingkat kebakaran hutan yang berada pada titik paling rendah dalam 20 tahun.

"Saya akan restorasi hutan bakau hingga 600 ribu hektare dalam 3 tahun ke depan. Ini akan menjadi konservasi hutan mangrove terbesar di dunia," jelasnya.

Dalam sektor energi, Presiden Jokowi menyebut telah mencanangkan transformasi Indonesia menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau. Presiden Jokowi pun mengajak Amerika Serikat untuk melakukan investasi pada energi baru dan terbarukan termasuk pengembangan ekosistem mobil listrik dan baterai lithium.

"Saya harapkan dukungan AS melalui investasi yang mempercepat transisi energi, khususnya teknologi rendah karbon," imbuhnya.



Terakhir, mengenai presidensi Group of Twenty (G20) Indonesia, Presiden Jokowi sangat menghargai dukungan Amerika Serikat terhadap presidensi Indonesia yang mengambil tema "Recover Together, Recover Stronger". Inklusivitas akan menjadi kunci presidensi Indonesia tahun depan.

Di masa presidensi, Indonesia ingin mendorong kerja sama konkret di sejumlah sektor utama seperti memastikan transisi digital yang inklusif bagi pertumbuhan dan pembangunan, mendorong investasi dan alih teknologi rendah karbon yang terjangkau, serta keuangan inklusif khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perempuan, dan kelompok rentan.

"Kita harus jadikan G20 relevan tidak saja bagi anggotanya, tapi juga bagi dunia utamanya negara berkembang," ucap Presiden Jokowi.

Selain itu, kedua Kepala Negara juga melakukan tukar pikiran mengenai berbagai isu internasional, antara lain demokrasi, Myanmar dan Afghanistan. Pertemuan kedua Presiden ini dilakukan dengan sangat hangat dan bersahabat berlangsung selama satu jam.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Thohir. (BPMI Setpres)

<https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/empat-bahasan-presiden-jokowi-dan-presiden-biden-dari-pandemi-hingga-presidensi-g20/>





Presiden: Pers Harus Adaptif di Era Disrupsi Teknologi

Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa pers harus mampu beradaptasi dengan cepat dan inovatif dalam menghadapi era disrupsi teknologi. Selain itu, jurnalisisme harus dijalankan secara bijak dan mempertimbangkan segala dampak yang ditimbulkan.

Demikian disampaikan Presiden saat pidato kunci pada acara Kongres ke-6 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, pada Jumat, 29 Oktober 2021.

“Jurnalisisme tidak sekadar fakta tetapi juga memperhitungkan dampak, tidak sekadar good journalism, tetapi juga wise journalism” ujar Presiden.

Menurut Presiden, perkembangan media harus dapat mendukung transformasi kemajuan bangsa, serta berkontribusi untuk masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan.



“Kehadiran berbagai platform media baru harus memacu para jurnalis lebih kreatif dan produktif, terus memperkuat value-nya sebagai penyebar informasi yang kredibel, meningkatkan kecermatan, menjaga independensi, dan objektivitas,” ucap Presiden.

Selanjutnya, Presiden menyebutkan bahwa pemerintah akan terus memegang teguh komitmen untuk menjaga kemerdekaan pers, membuka ruang untuk menyuarakan kepentingan publik, serta terbuka atas sikap kritis dan solutif.

“Kritik yang membangun itu sangat penting, dan pemerintah akan menjawab dengan pemenuhan tanggung jawab agar membuahkan hasil yang diharapkan untuk kepentingan rakyat,” ucap Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden mengucapkan terima kasih kepada para jurnalis yang telah membantu pemerintah dalam menyebarkan informasi

terkait penanganan pandemi Covid-19 kepada masyarakat.

“Dengan menyampaikan informasi yang akurat, memberikan apresiasi dan semangat, tetapi juga kritik yang konstruktif,” tuturnya.

Presiden menuturkan, peran jurnalis selama pandemi makin penting dalam meningkatkan optimisme dan harapan bagi masyarakat.

“Di tengah banjirnya informasi, peran para jurnalis semakin penting, menjadi suluh dari kegelapan, menjaga situasi tetap jernih,” ucap Kepala Negara. (BPMI Setpres)

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-pers-harus-adaptif-di-era-disrupsi-teknologi/>



Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Hotel Splendide Royal, Roma, Italia, pada Sabtu, 30 Oktober 2021. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Presiden Jokowi Apresiasi Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Prancis

Presiden Joko Widodo mengapresiasi kemajuan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Prancis. Hal tersebut menjadi salah satu poin pembahasan Presiden Jokowi saat mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Hotel Splendide Royal, Roma, Italia, pada Sabtu, 30 Oktober 2021.

“Presiden Macron, di pertemuan kali ini saya ingin sampaikan tiga hal. Pertama, saya menyambut baik kemajuan kerja sama pertahanan Indonesia-Prancis. Perjanjian kerja sama pertahanan oleh Menteri Pertahanan kedua negara ditandatangani bulan Juni lalu,” ujar Presiden Joko Widodo.

Menurut Presiden, perjanjian tersebut juga harus membuka ruang bagi kerja sama yang strategis termasuk produksi bersama. Presiden menyebut, investasi Prancis pada industri alutsista di Indonesia juga akan sangat diapresiasi.

Kedua, Presiden Jokowi dan Presiden Macron membahas mengenai perubahan iklim. Presiden Jokowi berpendapat bahwa implementasi Perjanjian Paris secara konsisten sangatlah penting.

“Indonesia memilih bekerja memenuhi komitmen. Komitmen NDC Indonesia sejauh ini sudah

berada di track yang benar. Indonesia juga targetkan *net zero emission* tahun 2060 atau lebih awal dengan dukungan internasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa di tengah meningkatnya kebakaran hutan di banyak negara, kebakaran hutan di Indonesia justru berada pada titik paling rendah dalam 20 tahun. Indonesia juga berhasil menurunkan tingkat deforestasi secara signifikan.

“Saya akan restorasi hutan bakau hingga 600 ribu hektare dalam 3 tahun ke depan. Ini akan menjadi konservasi hutan mangrove terbesar di dunia,” imbuhnya.

Terkait dengan energi, pada Agustus lalu, Presiden Jokowi telah mencanangkan transformasi Indonesia menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau. Untuk itu, Presiden Jokowi mengajak Prancis untuk meningkatkan kerja sama pengembangan teknologi yang terjangkau dan investasi sehingga transformasi energi dan ekonomi dapat berjalan lebih cepat.

Isu ketiga yang dibahas kedua pemimpin yaitu presidensi Indonesia di G20 tahun depan. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa presidensi Indonesia akan mengutamakan inklusivitas dalam pemulihan ekonomi dunia

pascapandemi. Dengan semangat tersebut, Indonesia memilih untuk mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger”.

“Saya harapkan dukungan Prancis untuk keberhasilan Presidensi Indonesia di G-20. Pada masa presidensi Indonesia di G20, Prancis juga akan menjabat Presiden bergilir Dewan Uni Eropa. Ini akan menjadi momen strategis kerja sama Indonesia-Prancis, baik dalam konteks bilateral, ASEAN-UE, maupun G20-UE,” paparnya.

Selain itu, kedua Presiden juga melakukan tukar pikiran mengenai kerjasama Indo-Pasifik. Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya kerjasama ekonomi, pencapaian SDGs, maritim, dan konektivitas di kawasan Indo-Pasifik, sebagaimana termuat dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Kerja sama konkret diyakini akan dapat menurunkan tensi di kawasan Indo-Pasifik.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (BPMI Setpres)

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-apresiasi-kerja-sama-pertahanan-indonesia-prancis/>



Presiden Jokowi: Indonesia Ingin G20 Jadi Contoh Atasi Perubahan Iklim

Penanganan perubahan iklim dan lingkungan hidup, hanya bisa dilakukan dengan bekerja sama dalam tindakan nyata, bukan saling menyalahkan. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika berbicara dalam KTT G20 sesi II dengan topik perubahan iklim, energi dan lingkungan hidup di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu, 31 Oktober 2021.

"Indonesia ingin G20 memberikan contoh, Indonesia ingin G20 memimpin dunia, dalam bekerja sama mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara

berkelanjutan dengan tindakan nyata," kata Presiden Jokowi.

Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa G20 harus menjadi katalisator pemulihan hijau dan memastikan tidak ada satu pihak pun yang tertinggal.

"Penanganan perubahan iklim harus diletakkan dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan," ucap Presiden.

Bahkan, ucap Presiden, penanganan perubahan iklim harus bergerak maju seiring dengan penanganan berbagai tantangan

global lainnya seperti pengentasan kemiskinan dan pencapaian target SDGs.

"Saya paham, sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki arti strategis dalam menangani perubahan iklim. Posisi strategis tersebut kami gunakan untuk berkontribusi. Deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektar critical land pada 2010-2019," kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah menargetkan Net Sink Carbon untuk sektor lahan dan hutan selambat-lambatnya tahun 2030 dan "Net Zero" di tahun 2060 atau lebih cepat. Kawasan Net Zero mulai dikembangkan termasuk pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13.200 hektar, yang menggunakan energi baru terbarukan dan menghasilkan green product.

"Tata kelola yang baik di tingkat global untuk penerapan carbon pricing perlu segera agar sesuai dengan tujuan Persetujuan Paris dan memberikan insentif



berkembang untuk melakukan transisi energi dan mendorong inovasi teknologi untuk membangun ekonomi dunia yang berkelanjutan.

“Saya ingin berikan perhatian besar terhadap teknologi-teknologi yang dapat ditawarkan negara G20 bagi negara berkembang dalam transisi energi,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden juga menyampaikan, pada saat presidensi Indonesia di forum G20 nanti, Presiden berharap akan terdapat sebuah platform yang dapat kita tawarkan melalui kemitraan global dan dukungan pendanaan internasional bagi transisi energi.

bagi partisipasi swasta dengan memperhatikan kapabilitas dan kondisi tiap negara. Saat ini Indonesia sedang dalam tahap akhir penyelesaian regulasi mengenai carbon pricing untuk mendukung pemenuhan komitmen target NDCs,” tutur Presiden Jokowi.

Dalam pidato di depan Sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu, Presiden mengingatkan pentingnya mengenai pemberdayaan negara

“Kita perlu pastikan bahwa transisi ke energi baru terbarukan berjalan seiringan dengan prinsip energy security, accessibility, and affordability,” kata Presiden Jokowi.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.



Presiden Joko Widodo berbicara dalam KTT G20 sesi II dengan topik perubahan iklim, energi dan lingkungan hidup di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu, 31 Oktober 2021. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev



<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-indonesia-ingin-g20-jadi-contoh-atasi-perubahan-iklim/>



**JANGAN TERGIUR
MODUS PINJOL
ILEGAL**

Jangan Tergiur Modus Pinjol Ilegal Mari Kita Lawan!

Pencegahan terhadap tindakan kejahatan dengan berlandaskan pada hukum memberikan efek jera kepada setiap pelaku. Namun, terkadang yang namanya kejahatan dengan iming-iming pendapatan yang menggiurkan, akan menggoda siapa saja yang berani mengambil pilihan penuh resiko itu. Sama seperti pelaku kejahatan di ruang digital. Akhir-akhir ini, kita disaksikan dengan fenomena pelaku kejahatan bermotif pinjaman online (pinjol) ilegal yang satu per satu berurusan dengan ranah hukum.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu institusi pemerintah tidak sedikit menerima laporan aduan pinjol ilegal dari masyarakat. Mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan, Kementerian Kominfo bertekad dan tidak ada pilihan lain selain upaya bersama melawan pinjol ilegal semata-mata untuk melindungi masyarakat. Komitmen itu diperkuat setelah kasus pinjol ilegal menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo yang meminta jajaran kabinetnya untuk melindungi masyarakat.

Menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi, Menkominfo Johnny G. Plate merespon maraknya kasus penipuan bermodus pinjaman online itu dengan tegas menyatakan, pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta peraturan turunannya sebagai pelaksanaan penanganan pinjol ilegal.

"Pada Tanggal 15 Oktober tahun 2021, Presiden Joko Widodo menaruh perhatian khusus terhadap fenomena pinjaman online ilegal yang merugikan berbagai lapisan masyarakat di tanah air kita. Kementerian Kominfo berupaya melakukan penanganan terhadap pinjaman online ilegal ini yang secara terang-terangan menyalahgunakan informasi dan transaksi elektronik sehingga menyebabkan keresahan publik. Sehingga kegiatan pinjaman online tidak terdaftar dan akses penanganannya yang tidak sesuai tata aturan dapat pula dijerat sebagai tindak pidana," ujar Menteri Johnny di Jakarta, pada Jumat (29/10/2021).

Moratorium pendaftaran PSE tersebut merupakan upaya merespon dampak penyelenggaraan pinjol ilegal yang menimbulkan dampak negatif pada masyarakat. Jadi kebijakan moratorium yang diberlakukan menjadi upaya terbaru mendampingi upaya pemutusan akses konten pinjol ilegal yang telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo

Moratorium PSE

Bentuk ketegasan dan komitmen agar masyarakat tidak lagi menjadi korban dan tergiur dengan berbagai modus pinjol ilegal, Menkominfo menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan moratorium pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Layanan Jasa Keuangan Pinjaman Online. Dalam penerapan kebijakan moratorium tersebut juga diiringi moratorium yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap permohonan pendaftaran penyelenggara jasa pinjaman online baru sejak tahun 2020.

Tidak saja bersama OJK, Kementerian Kominfo juga menyiapkan langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam moratorium bersama kementerian dan lembaga terkait. Diantaranya Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.

"Moratorium pendaftaran PSE tersebut merupakan upaya merespon dampak penyelenggaraan pinjol ilegal

yang menimbulkan dampak negatif pada masyarakat. Jadi kebijakan moratorium yang diberlakukan menjadi upaya terbaru mendampingi upaya pemutusan akses konten pinjol ilegal yang telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo," jelasnya.

Kerjasama dan kerja bersama dalam membersihkan dunia digital di Indonesia dari keberadaan pinjol ilegal tentu membutuhkan tindakan tegas, yakni berupa pemblokiran langsung terhadap isi konten maupun aktivitas perusahaan yang tak berizin itu. Menkominfo Johnny G. Plate menyebutkan, sejak tahun 2018 hingga data terbaru per 10 Oktober 2021, pihaknya telah memblokir atau memutus akses terhadap 4.873 konten pinjol ilegal. Data tersebut terus bertambah seiring proses pencarian menggunakan mesin pencari dengan teknologi canggih.

Menteri Johnny menegaskan bahwa pemutusan akses terhadap ribuan konten-konten ilegal dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga jika ditemukan aktivitas pinjam-meminjam secara digital yang tidak mengantongi izin resmi, pemerintah langsung mengambil langkah-langkah hukum. Itulah komitmen yang terus dibangun

antara Kementerian Kominfo dan para mitra kerja yang tidak akan memberikan ruang bagi setiap konten fintech yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kita sama-sama punya tugas untuk tidak memberikan ruang kepada konten-konten ilegal atau konten-konten yang tidak sejalan dengan aturan-aturan perundang-perundangan. Agar ruang digital kita menjadi lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat kita, dan digunakan secara maksimal untuk kemajuan perekonomian kita," tegas Menkominfo Johnny G. Plate.

Sebagai informasi, sebanyak 4.873 konten pinjol ilegal yang telah dilakukan pemutusan akses tersebut sebelumnya tersebar di berbagai platform seperti website, marketplace, aplikasi, media sosial dan layanan file sharing. Agar tidak semakin banyak masyarakat yang dirugikan, Menteri Johnny berharap penegakan hukum atas maraknya konten ilegal dapat mendorong penggunaan platform digital yang semakin bermanfaat.

"Kita harapkan penegakan hukum ruang digital seperti ini akan

mendorong *fintech* dimanfaatkan secara baik, digunakan demi kemaslahatan dan pembangunan ekonomi serta keuangan nasional kita," ujarnya.

3P Lawan Pinjol Ilegal

Pada Agustus 2021, lima kementerian dan lembaga merembuk dan memberikan pernyataan bersama dalam memberantas pinjol ilegal. Pernyataan bersama itu dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam pernyataan bersama terdapat langkah-langkah strategis yang disepakati bersama dalam rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran dan memperkuat upaya pemberantasan pinjol ilegal. Pernyataan bersama itu disertai dengan tiga langkah strategis, antara lain pencegahan, penanganan pengaduan masyarakat dan penegakan hukum.

Untuk langkah pencegahan, pemerintah dan otoritas terkait menekankan pada empat aspek penting. Pertama, literasi keuangan dengan memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman online ilegal. Disamping itu, komitmen lain dilakukan dengan memperkuat program edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan pinjaman online dan menjaga data pribadi.

Pencegahan lainnya dilakukan melalui kerjasama antar otoritas dan pengembang aplikasi untuk mencegah penyebaran pinjol ilegal melalui aplikasi dan penyedia jasa telepon seluler untuk menyebarkan informasi kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjol ilegal. Selain itu, pernyataan bersama ini juga menegaskan dan melarang perbankan, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) nonbank, aggregator, dan koperasi bekerja sama atau memfasilitasi pinjol ilegal, dan wajib mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa (*know your customer*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Sumber Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.



Kedua, Penanganan Pengaduan Masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengentaskan dan memberantas pinjol ilegal sangat diperlukan. Masyarakat perlu memahami dan membedakan mana pinjol ilegal dan pinjol legal. Tentu perbedaan diantara keduanya dapat diakses dari berbagai kanal informasi yang disediakan, baik oleh Kementerian Kominfo, OJK, Polri maupun institusi terkait lainnya.

Namun demikian, dalam pernyataan bersama telah dibuka akses pengaduan masyarakat dan melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian lembaga dan/atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan proses hukum.

Untuk informasi aduan konten, masyarakat dapat melaporkan pelaku kejahatan pinjol ilegal ke beberapa institusi yang menyediakan seluruh kanal informasi yang lengkap. Untuk Kementerian Kominfo, masyarakat dapat melaporkan aduan tersebut melalui kana web aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, atau WA 08119224545.

OJK sebagai lembaga yang mengawasi aktivitas perusahaan-perusahaan financial technology juga mengambil peran penting dalam menerima aduan masyarakat, sebagaimana yang menjadi tugas dan fungsinya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada pasal 7 dijelaskan bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Untuk informasi pengaduan, OJK menyediakan akses informasi seperti website www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx, Nomor WhatsApp resmi 081-157-157-157, layanan telpon/panggilan ke 157, dan juga email: waspadainvestasi@ojk.go.id. Sedangkan untuk Polri melalui website <https://patrolisiber.id> dan info@cyber.polri.go.id.

Ketiga, Penegakan Hukum. Prinsip penegakan hukum dalam memberantas pelaku kejahatan daring dengan modus pinjaman

Dengan memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman online ilegal.



online menjadi komitmen Polri untuk melindungi masyarakat. Dalam pernyataan bersama, disepakati bahwa proses hukum terhadap pelaku pinjol ilegal dilakukan sesuai kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga. Disamping itu, kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan operasional pinjol ilegal lintas negara juga diperkuat. Inilah bentuk komitmen yang termaktub dalam pernyataan bersama oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.



Peran Kominfo di SWI

Tindak lanjut Pernyataan Bersama ini akan diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal yang akan memuat langkah-langkah dari masing-masing kementerian/ lembaga yang terkoordinasi dalam Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI).

Sebagai bagian dari SWI, Kementerian Kominfo melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan langkah-langkah memberantas pinjol ilegal dilakukan secara terukur. Adapun peran Kominfo dalam SWI yakni menerima informasi mengenai fintech peer to peer lending ilegal atau pinjol ilegal yang diumumkan kepada masyarakat. Setelah informasi itu diterima, Kementerian Kominfo melakukan pemblokiran secara rutin sesuai dengan pengajuan yang diterima.

Selain itu, Kementerian Kominfo bersama kementerian dan lembaga lainnya juga memutus akses keuangan dari fintech peer to peer lending ilegal. Terdapat dua langkah yang dilakukan dalam prosedur ini, yakni pertama; menyampaikan imbauan kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK dan melakukan konfirmasi kepada OJK untuk rekening existing yang diduga digunakan untuk kegiatan pinjol ilegal. Langkah kedua; kementerian dan lembaga yang tergabung dalam SWI meminta kepada Bank Indonesia untuk melarang fintech payment system memfasilitasi pinjol ilegal.

Kerja sama antar kementerian dan lembaga yang tergabung dalam SWI juga memperkuat sisi penegakan hukum dan mengajak serta peran ekosistem untuk mengambil andil. Oleh karena itu, kegiatan edukasi dan sosialisasi secara masif juga terus dilakukan kepada masyarakat agar cerdas dan bijak ketika menggunakan fintech yang legal dan berbadan hukum.

Kementerian Kominfo juga mendorong masyarakat untuk meningkatkan kecakapan digital melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi. Setiap tahunnya, Kementerian Kominfo menargetkan 12,5 juta masyarakat terliterasi secara digital hingga mencapai target 50 juta masyarakat pada tahun 2024. Kegiatan yang dikemas dalam pelatihan itu memiliki empat kurikulum penting yang perlu diketahui masyarakat ketika menggunakan ruang digital, yakni diantaranya Digital Skills (Cakap Bermedia Digital), Digital Safety (Aman Bermedia Digital), Digital Ethics (Etika Bermedia Digital), dan Digital Culture (Budaya Bermedia Digital).

Kegiatan ini rutin dilakukan dan menargetkan puluhan juta masyarakat dengan harapan berbagai permasalahan seperti hoaks, disinformasi, misinformasi hingga penipuan berbasis digital, sebagaimana yang marak terjadi pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dapat dicegah. Ketika masyarakat cerdas dan bijak menggunakan ekosistem digital yang bermanfaat dan produktif, tentunya Indonesia telah siap bermigrasi menuju era transformasi digital dan menjadi bangsa digital.

Kementerian Kominfo juga mendorong masyarakat untuk meningkatkan kecakapan digital melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi. Setiap tahunnya, Kementerian Kominfo menargetkan 12,5 juta masyarakat terliterasi secara digital hingga mencapai target 50 juta masyarakat pada tahun 2024.



IKHTIAR SATGAS WASPADA INVESTASI LAWAN PINJOL ILEGAL

Ikhtiar Satgas Waspada Investasi Lawan Pinjol Ilegal

Perlahan tapi pasti, Indonesia telah dan sedang berkembang menjadi negara industri. Hal ini tampak dari berbagai pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang terus dilakukan pada masa pemerintahan saat ini.

Konsekuensi logisnya, perputaran uang di beberapa wilayah di Indonesia pun semakin akseleratif dari waktu ke waktu. Hal ini pun paralel dengan tingkat pendapatan masyarakat yang mulai meningkat.

Upah Minimum Regional (UMR) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang semakin naik, juga menandakan bahwa pendapatan masyarakat secara umum mulai meningkat.

Pada situasi ini, berbagai tawaran investasi keuangan mulai berdatangan, baik itu terhadap lembaga maupun perorangan.

Hal ini karena peningkatan pendapatan masyarakat yang dibarengi dengan diversifikasi (keberagaman) produk keuangan yang ditawarkan, secara simultan justru meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan investasi.

Secara sederhana, investasi dapat didefinisikan sebagai upaya membelanjakan sejumlah uang atau dana pada sesuatu hal yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Hal tersebut antara lain dapat berupa : membeli properti, surat berharga (seperti deposito, saham, obligasi, reksa dana), logam mulia, perhiasan, atau bentuk lainnya.

Dalam melakukan investasi, terdapat dua hal utama yang wajib dipahami oleh masyarakat, yaitu tingkat imbal hasil yang ditawarkan (return) dan tingkat risiko (risk).

Khusus terkait dengan risiko, setiap investor memiliki sikap toleransi terhadap risiko investasi yang berbeda-beda. Sebagian merasa nyaman untuk mengambil risiko (*risk-takers*), sebagian kurang berani atau ragu-ragu (*risk-moderate*), dan ada juga yang benar-benar tidak berani untuk mengambil risiko (*risk-averse*).

Permasalahannya adalah bahwa investor seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan (*return*) namun lupa dan kurang memperhatikan potensi risiko yang mungkin dihadapi jika memilih suatu bentuk investasi, seperti: melesetnya tingkat imbal hasil yang diharapkan (rugi), merosotnya nilai pasar dari investasi, gagal bayar, dan lain sebagainya.

Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab makin maraknya kasus penipuan berkedok investasi. Betapa tidak, masyarakat tergiur oleh iming-iming dan janji hasil investasi yang tinggi, tapi kurang memperhatikan dan memahami tingkat risikonya.

Selain itu, aspek legalitas lembaga yang menawarkan produk kurang diperhatikan, tertutup oleh janji profit yang tinggi.

Tak ayal jika Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat kehadiran investasi bodong yang cukup tinggi.

● Kehadiran Satgas Waspada Investasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal.

Lahiriah Satgas Waspada Investasi yang dibentuk melalui Surat

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang diperbarui setiap tahunnya.

Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam dan LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Keputusan Satgas Waspada Investasi tersebut diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013.

Pada saat ini, SWI telah beranggotakan 13 Kementerian dan Lembaga, termasuk didalamnya anggota lama seperti OJK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Anggota baru SWI antara lain: Bank Indonesia, Kementerian Agama, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Ristekdikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Tugas Utama Satgas Waspada Investasi, antara lain:

- Menginventarisasi kasus-kasus investasi ilegal.
- Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
- Menganalisis kasus-kasus.
- Meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait.
- Menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi bodong.
- Melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal.

Revitalisasi Pelaksanaan Tugas Satgas Waspada Investasi:

Preventif

- Koordinasi antara anggota Satgas Waspada Investasi dalam rangka meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai ruang lingkup transaksi keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat.
- Sosialisasi kepada komponen masyarakat, penegak hukum, pemerintah daerah dan akademisi.
- Mengidentifikasi dan mengevaluasi serta tindakan yang diperlukan terhadap tawaran-tawaran investasi melalui berbagai sarana pemasaran tidak terbatas kepada penyampaian melalui internet.
- Mengefektifkan sarana pengaduan Satgas Waspada Investasi.

Kuratif

- Kerjasama dalam penerbitan ijin keramaian/ penyelenggaraan kegiatan penawaran investasi.
- Melakukan pembinaan berupa peringatan terhadap perusahaan yang melakukan penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat agar mendapatkan ijin dan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Represif, melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dan perundang-undangan.
- Anggota Satgas Waspada Investasi juga sepakat untuk membentuk Tim Satgas Waspada Investasi di tingkat daerah dengan perwakilan anggota dari lembaga yang sama dengan Satgas Waspada Investasi di pusat.
- Tim Satuan Tugas Waspada Investasi Daerah berfungsi sebagai sarana koordinasi antara Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan dengan instansi/dinas di pemerintah daerah terkait.

Kehadiran Pinjol Ilegal dan Peran Satgas Waspada Investasi

Pandemi Covid-19 Indonesia telah membuat kondisi ekonomi masyarakat kian terpuruk. Pada saat yang sama, pinjol ilegal semakin bertumbuh subur.

Satgas Waspada Investasi sendiri telah menutup 425 penyelenggara investasi ilegal dan 1.500 fintech Peer to Peer (P2P) lending ilegal selama 2020 sampai pertengahan Juli 2021.

Untuk memberantas kejahatan pinjol ilegal, masing-masing anggota SWI sepakat meningkatkan peran tugas masing-masing sesuai kewenangannya.

OJK bekerja sama dengan perbankan untuk memblokir rekening pinjaman online ilegal, melarang industri jasa keuangan untuk memfasilitasi pinjaman online ilegal, dan memperluas edukasi kepada masyarakat.

Bareskrim Polri membuka akses penyampaian laporan pengaduan pinjaman online ilegal di polda dan polres seluruh Indonesia atau melalui website <https://patrolisiber.id> dan info@cyber.polri.go.id, menindaklanjuti laporan informasi pinjol ilegal dari SWI, melakukan proses hukum terhadap pinjol ilegal, dan melakukan edukasi waspada pinjol ilegal melalui anggota Bhayangkari.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melakukan cyber patrol, pemutusan akses terhadap situs dan aplikasi pinjaman online ilegal secara rutin, menyebarkan pesan waspada pinjaman online ilegal melalui SMS kepada masyarakat, dan melakukan edukasi perlindungan data pribadi kepada masyarakat.

Kementerian Koperasi dan UKM RI menertibkan koperasi simpan pinjam tanpa izin yang menawarkan pinjaman online kepada non anggota dan melakukan edukasi waspada pinjaman online ilegal kepada dinas Koperasi dan pengurus koperasi.

Bank Indonesia melarang payment gateway dan perusahaan transfer dana bekerja sama atau memfasilitasi pinjaman online ilegal dan melakukan edukasi waspada pinjaman online ilegal kepada payment gateway dan perusahaan transfer dana.

Perlahan tapi pasti, Indonesia telah dan sedang berkembang menjadi negara industri. Hal ini tampak dari berbagai pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang terus dilakukan pada masa pemerintahan saat ini.

Kementerian Dalam Negeri RI melakukan edukasi waspada pinjaman online ilegal kepada lurah dan kepala desa seluruh Indonesia

Kementerian Agama RI melakukan edukasi waspada pinjaman online ilegal kepada pondok pesantren, madrasah, dan pemuka agama di seluruh Indonesia.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI melakukan edukasi waspada pinjaman online ilegal kepada akademisi di seluruh Indonesia.

Selain itu, untuk jangka panjang, pemberantasan pinjol ilegal juga membutuhkan adanya payung hukum seperti UU Financial Technology yang antara lain berisi ancaman pidana bagi pelaku pinjaman online ilegal dan UU Perlindungan Data Pribadi.

Upaya tersebut tentu juga memerlukan peran serta masyarakat dalam membantu memutus mata rantai jebakan pinjaman online ilegal dan lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan pinjaman dengan menghindari pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK.

Laporan atau pengaduan kasus pinjol ilegal bisa melalui website <https://patrolisiber.id> dan info@cyber.polri.go.id atau Kontak OJK 157 (WA 081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id



LAWAN INVESTASI BODONG, KEMENTERIAN KOMINFO TUTUP AKSES RIBUAN FINTECH ILEGAL

Lawan Investasi Bodong, Kementerian Kominfo Tutup Akses Ribuan Fintech Ilegal



Ketika Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI), Tongam L Tobing mengumumkan bahwa 3.631 perusahaan pinjol ilegal telah diblokir sejak 2018 sampai hari Jumat (12/11/2021), santer pemberitaan media tertuju pada isu fintech (pinjol) ilegal dan investasi bodong.

“Jumlah pinjol ilegal saat ini ada 3.631 yang sudah kita blokir situs dan aplikasinya,” tuturnya pada Jumat (12/11/2021).

Sementara itu, jumlah aduan yang masuk ke SWI mencapai 8.000 aduan. Pengaduan berasal dari korban langsung maupun masyarakat umum. Kendati begitu, SWI tidak mengetahui berapa jumlah pengguna pinjol ilegal karena tidak dapat dipantau langsung oleh lembaga. Begitu juga dengan perputaran dana di pinjol ilegal.

Kementerian Kominfo, sebagai lembaga yang membidangi TIK, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap platform digital, secara berkala melakukan monitoring terhadap aktivitas finansial di platform digital.

Dari sini, Kominfo berhasil mendapatkan begitu banyak platform fintech ilegal dan berbagai penipuan berbasis keuangan yang ditawarkan kepada publik.

Subkoordinator Layanan Aduan Masyarakat dan Institusi Kemkominfo, Taruli mencatat jumlah pengaduan pinjol ilegal yang masuk ke Kominfo mencapai 21 ribu aduan.

Taruli juga mengatakan, jumlah aduan yang masuk sangat banyak karena pelaporannya berdasarkan konten. Satu pinjol ilegal bisa diadukan oleh beberapa orang sekaligus.

Setelah menerima aduan dari masyarakat dan dari laporan SWI, Kominfo akan melakukan verifikasi secara lebih mendalam melalui Tim AIS Kementerian Kominfo untuk memastikan apakah benar aplikasi atau pun link yang diadukan terindikasi ilegal.

● Kehadiran Satgas Waspada Investasi

Skema penipuan berkedok investasi memiliki pola dasar yang hampir sama. Biasanya, penipuan ini akan mencatut nama fintech resmi dalam grup chat. Pemilihan pencatutan nama adalah pada perusahaan fintech yang dikenal masyarakat.

Hal ini membuat masyarakat percaya, karena saat dicek ke otoritas terkait seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) namanya terdaftar. Dalam grup chat juga memiliki anggota dengan jumlah yang banyak.

Untuk menambah kepercayaan, para pelaku juga memerlukan dokumen izin, termasuk logo OJK dan regulator yang membuat kesan akun resmi.

Sementara itu, juga sering terjadi permintaan transfer kepada akun rekening yang mengatasnamakan perusahaan, tetapi menggunakannya nama perseorangan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa tidak mungkin fintech resmi meminta nasabah melakukan transfer ke rekening pribadi.

Selain itu, ada juga penawaran investasi yang bisa memasukkan DP terlebih dulu. Namun uang muka ini tidak dikenal untuk perusahaan resmi dan bila ada modus itu kemungkinan besar adalah penipuan. Karena fintech resmi tidak mengenal istilah DP (uang muka). Kalau sudah ada DP untuk investasi, maka harus diwaspadai karena kemungkinan besar penipuan.

Kementerian Kominfo, sebagai lembaga yang membidangi TIK, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap platform digital, secara berkala melakukan monitoring terhadap aktivitas finansial di platform digital.



SWI dan Pinjol

Salah satu bukti bahwa OJK selalu mengawasi pinjol yang terdaftar ialah adanya update dari OJK terkait jumlah pinjol legal baik yang terdaftar maupun berizin setiap bulannya.

Oleh karena itu, pinjol legal yang sekiranya tidak bisa memenuhi persyaratan baik secara administrasi maupun operasional akhirnya mengembalikan tanda terdaftarnya. Sebagai contoh, pada bulan Agustus jumlahnya masih 121. Kemudian pada September ini, pinjol legal berkurang 5 jadi jumlahnya sekarang 116.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk selalu mengupdate informasi aktual secara berkala tiap bulannya terkait fintech mana saja yang legal, agar tidak tertipu oleh investasi bodong dan pinjol ilegal.





JURUS JITU ⚡

PEMERINTAH MEMBERANTAS

PINJOL ILEGAL

Presiden Joko Widodo memberi perhatian khusus terhadap pertumbuhan pinjaman online (pinjol), khususnya pinjaman online ilegal. Menanggapi hal tersebut, pemerintah yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi (SWI) mengambil berbagai langkah untuk memusnahkan pinjol ilegal.

Ketua SWI Tongam L Tobing menuturkan bahwa terdapat 3.631 pinjol ilegal yang sudah diblokir, dengan terdapat sekitar 8.000 aduan yang masuk pada tahun 2021. Tongam mengatakan bahwa banyaknya pengguna pinjol ilegal dikarenakan dari 2 sisi, yaitu sisi pelaku dan sisi pengguna.

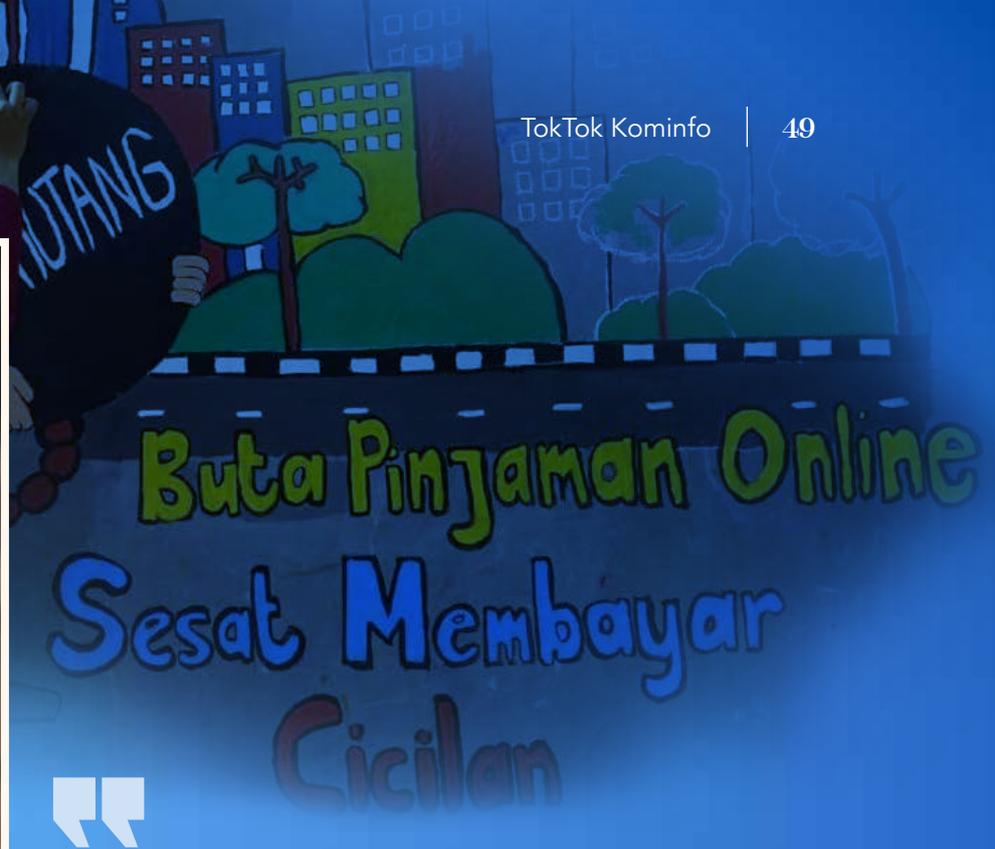
“Dari sisi pelaku, saat ini sudah jamannya teknologi digital, di mana kesempatan bagi mereka untuk menawarkan pinjol melalui berbagai sarana, yang mudah diterima masyarakat. Pelaku juga banyak berada di luar negeri sehingga menyulitkan kita untuk mengetahui,” ucap Tongam dalam *talkshow virtual* TokTok Kominfo Edisi 77: Masih Terjerat Pinjol?, pada Jumat (12/11).

Sementara dari sisi masyarakat, tingkat literasi yang rendah membuat masyarakat tidak mengecek legalitas aplikasi tersebut. Selain itu, dikarenakan tidak memiliki alternatif lain dalam meminjam uang sehingga terjebak pinjol ilegal.

Pada tanggal 5 Agustus 2021, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Kominfo, Bank

Indonesia (BI), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengumumkan komitmen Bersama memberantas pinjol ilegal di Indonesia. Komitmen bersama tersebut menghasilkan tiga program, yaitu memberi perlindungan masyarakat dengan edukasi, respon terhadap pengaduan masyarakat, dan penegakan hukum.

“Tujuannya adalah bagaimana kita saling bergandeng tangan untuk memberantas pinjol ilegal ini. Karena kami sangat yakin pemberantasan ini bukan hanya tugas lima lembaga ini, kita semua harus berperan terutama masyarakat agar



Tujuannya adalah bagaimana kita saling bergandeng tangan untuk memberantas pinjol ilegal ini. Karena kami sangat yakin pemberantasan ini bukan hanya tugas lima lembaga ini, kita semua harus berperan terutama masyarakat agar mereka tidak dapat mengakses aplikasi pinjol ilegal lagi



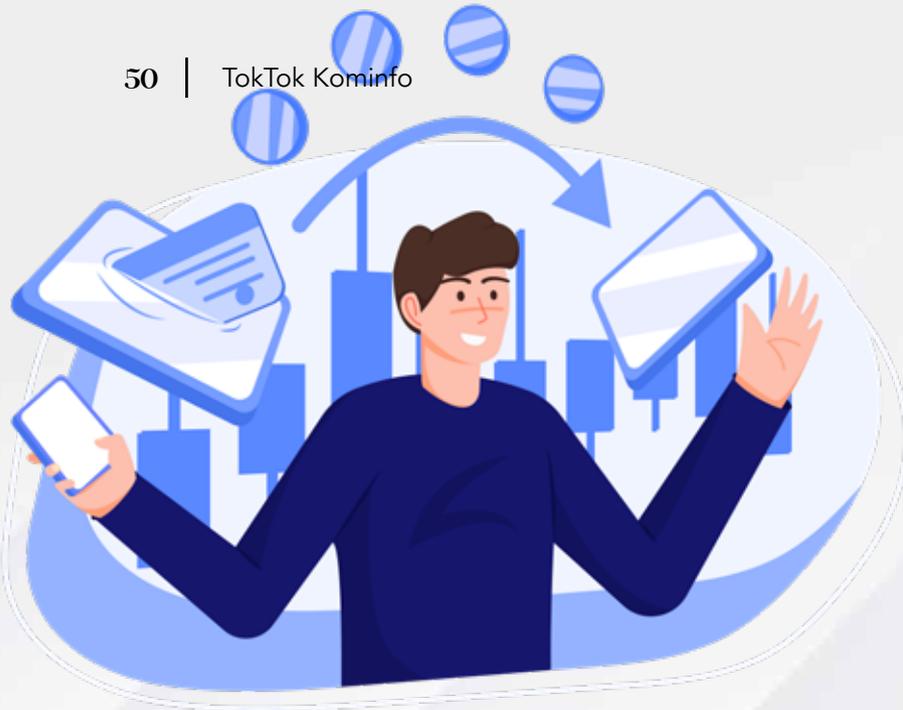
mereka tidak dapat mengakses aplikasi pinjol ilegal lagi. Banyak pengalaman-pengalaman yang sudah dirugikan secara materiil, dan tentu ini menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa akses ke pinjol ilegal ini sangat berbahaya," lanjut Tongam.

Menurut Tongam, ketiga hal tersebut adalah poin paling utama dalam memberantas pinjol ilegal. Dengan semakin terdidiknya masyarakat maka semakin sempit ruang gerak operasional pinjol ilegal di Indonesia. Respon pengaduan masyarakat juga harus cepat ditangani masyarakat, mendapat jawaban yang cepat dan pemerintah dapat

mengatasi berbagai pinjaman lainnya. Sementara penegakan hukum untuk memberi efek jera kepada para pelaku dan masyarakat yang ingin mencoba menggunakan pinjol ilegal.

Selain itu, OJK bersama Kementerian Kominfo juga melakukan moratorium penerbitan izin pinjol sejak sejak 2020. Sejak 2020, OJK tidak menerima pendaftaran selain yang sudah terdaftar dalam daftar OJK





Tongam juga memberikan tips kepada masyarakat agar tidak terjerat pinjol ilegal, yaitu:

Tidak Ada Kantor Resmi

Hal ini terjadi karena pinjol ilegal sengaja menyamarkan untuk melakukan penipuan kepada masyarakat.

Tidak Terdaftar di OJK

Saat ini terdapat 104 pinjol legal dan datanya bisa dilihat di website OJK, sehingga diluar tersebut ilegal.

Pinjaman yang Mudah

Cukup dengan fotocopy KTP dan foto diri maka pinjaman langsung cair. Akan tetapi memiliki bunga dan fee yang sangat tinggi dengan jangka waktu yang sangat singkat

Terdapat permintaan untuk dapat mengakses seluruh data dan kontak di telepon pintar.

Data dan kontak di telepon pintar tersebut akan menjadi alat intimidasi bagi mereka pada saat masyarakat tidak membayar pinjaman, bukan hanya kepada peminjam tetapi kepada semua yang terdapat pada kontak tersebut.

Tongam juga memberikan tips kepada masyarakat agar tidak terjerat pinjol ilegal, yaitu:

1. Pinjam hanya pada pinjol yang terdaftar pada OJK.
2. Pinjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Jangan meminjam melebihi kemampuan bayar.
3. Sebisa mungkin pinjaman digunakan untuk kegiatan yang produktif, untuk mendorong ekonomi keluarga tentunya.
4. Sebelum meminjam, pahami resikonya, manfaatnya, kewajibannya, jangan sala meminjam. Masyarakat agar cerdas meminjam.

Tongam menyampaikan untuk selalu mengecek **Website OJK** atau menghubungi **contact center OJK (157)** dan **whatsapp 081157157157** apabila menerima penawaran pinjaman online melalui SMS melalui WA atau pesan langsung,

**HANYA
KTP**

Literasi Digital sebagai Langkah Memberantas Pinjol Ilegal

Pada acara yang sama, Subkoordinator Layanan Aduan Masyarakat dan Institusi Taruli menuturkan bahwa Kementerian Kominfo sudah memutus akses sebanyak 4.895 aplikasi pinjol ilegal (konten). Sementara aduankonten sendiri sudah menerima sebanyak 21.000 aduan dengan aduan tertinggi terdapat pada dua bulan terakhir.

“SWI memiliki tiga tugas utama, yaitu pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum. Dalam tugas pencegahan, Kementerian Kominfo memiliki tugas untuk melakukan literasi digital terkait dengan adanya aplikasi pinjaman ilegal. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan *stakeholder* meliterasi masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih pinjol,” ucap Taruli.

Tugas kedua SWI adalah penanganan pengaduan masyarakat terkait pinjol ilegal, baik itu aduan masyarakat atau melakukan patroli sendiri untuk mencari aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Setelah itu akan diteruskan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilakukan investigasi dan melakukan penanganan.

“Sementara tugas ketiga yaitu penegakan hukum. Kita kolaborasi dengan aparat penegak hukum tentunya untuk bersama memberantas pinjol ilegal,” ucap Taruli.

Menurut Taruli, terdapat beberapa langkah dalam menangani aduan masyarakat terkait pinjol ilegal. Pertama Kementerian Kominfo memverifikasi aduan masyarakat dan mengumpulkan bukti-bukti digital untuk dikirim kepada OJK melalui SWI. Setelah itu SWI beserta 13 Kementerian/Lembaga akan memverifikasi ulang dan melakukan investigasi lebih lanjut. Setelah itu SWI akan bersurat kepada Kementerian Kominfo

untuk penindakan lebih lanjut terkait pemblokiran pinjol laporan tersebut.

“Jadi sebetulnya kita bersama-sama untuk melakukan penanganan kontennya terkait dengan ini (pinjol ilegal-red). Tapi ada juga beberapa yang kita cari sendiri juga untuk membantu OJK. Selain itu juga kita menerima aduan dari masyarakat maupun dari instansi,” lanjut Taruli.

Salah satu bahaya dari pinjol ilegal adalah terjadinya kebocoran data pribadi. Kementerian Kominfo berkomitmen untuk melakukan literasi digital, khususnya ketika mengunduh aplikasi atau situs tertentu agar tidak terjadi kebocoran data pribadi.

“Dalam mengunduh aplikasi kita harus melihat syarat dan kondisi aplikasi tersebut. Disini kita minta untuk bisa lebih berhati-hati, jangan sembarang memberikan akses. Kami juga meminta (masyarakat) untuk meningkatkan kewaspadaan akan hal ini supaya tidak terjadi penyalahgunaan terhadap data pribadi,” tutur Taruli.

Seperti yang dituturkan Tongam dalam Moratorium, Kementerian Kominfo melakukan proses *post audit* sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Kementerian Kominfo memastikan bahwa pinjol yang terdaftar PSE melakukan kegiatan usaha sesuai dengan legalitasnya

Taruli meminta masyarakat untuk melapor kepada OJK, Kementerian Kominfo, atau Polri apabila sudah menjadi korban pinjol ilegal. Hal ini karena bunga yang ditagih sangat tinggi sehingga memungkinkan pinjol ilegal tersebut melakukan berbagai cara hingga melanggar hukum untuk dalam melakukan penagihan. Masyarakat dapat melaporkan melalui kanal aduankonten.id atau mengirim surat elektronik ke waspada.investasi@ojk.go.id.

“Kominfo memohon kepada masyarakat untuk berhati-hati menggunakan media sosial untuk kegiatan apapun, baik itu untuk pinjol atau kegiatan lainnya. Masyarakat harus memastikan terlebih dahulu bahwa aplikasi tersebut legal dan punya izin serta tidak melakukan kegiatan ilegal,” tutup Taruli.

**TAPI
BUTUH
CEPAT**

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD, pinjol yang beroperasi secara ilegal dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat yang sudah terlanjur menjadi korban, tidak perlu membayar. Jika mendapatkan ancaman dan teror kekerasan, masyarakat agar segera melapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan melakukan perlindungan bagi para pelapor.

Mengenai pernyataan Menkopolkam tersebut, Ketua SWI Tongam L. Tobing menjelaskan bahwa SWI sangat mendukung upaya pemerintah untuk memberantas pinjol ilegal ini. “Di dalam pernyataan Pak Mahfud itu pinjol ilegal ini tidak memenuhi syarat dan perjanjian, syarat dan tindak pidana tentunya. Oleh karena itu, kita mendorong, sepakat dengan apa yang dikatakan pemerintah. Yang menjadi perhatian kita sebenarnya adalah jangan sampai pernyataan Pak Mahfud itu digunakan oleh masyarakat aji mumpung, jangan tidak membayar secara asal. Bukannya malah memberantas jadinya, justru malah menambah masalah. Jadi masyarakat juga perlu cerdas.”

QnA

Seputar

Pinjaman Online Illegal



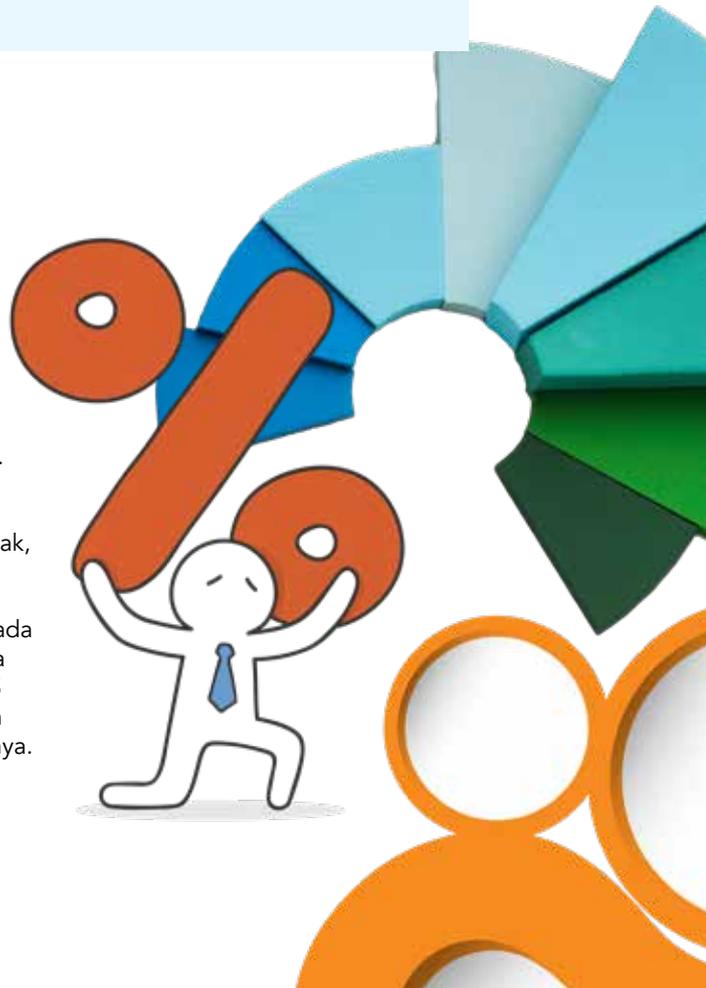
Tongam Lumban Tobing
Ketua Satgas Waspada Investasi

NETIZEN



/ Apa saja **ciri-ciri pinjaman online (pinjol) ilegal?** /

Pertama, tidak terdaftar atau berizin OJK. Kedua, alamat pengurus dan alamat kantor tidak jelas karena berubah-ubah. Mereka bahkan punya nomor HP yang banyak, berganti-ganti terus. Ketiga, pinjaman sangat mudah, hanya dengan fotokopi KTP data diri, pinjaman dapat dicairkan tapi menjebak, bunganya tinggi, dendanya tinggi, *feenya* sangat tinggi. Pinjam satu juta, yang ditransfer hanya 600 ribu. Kemudian bunganya diperjanjikan setengah persen per hari, ternyata pada kenyataannya menjadi 3 persen per hari dan jangka waktunya mereka janjikan contohnya 90 hari tapi kenyataannya hanya 5 hari. Selanjutnya, mereka itu selalu meminta kita mengizinkan semua data dan kontak HP bisa diakses. Nah ini malapetakanya.



BER- TANYA, KOMINFO MENJAWAB



/ Kemana saya dapat **mengadukan pinjol ilegal**? /

Untuk pengaduan, kita bagi dua hal. Yang pertama untuk pinjol legal yang terdaftar di OJK, pengaduan bisa disampaikan ke OJK melalui kontak 157 atau WA 081157157157. Untuk yang ilegal, pengaduan bisa disampaikan ke Satgas Waspada Investasi melalui e-mail waspadainvestasi@ojk.go.id. Kalau sudah menjadi korban teror intimidasi, pelecehan, dan merugikan, masyarakat kami minta untuk lapor ke polisi. Jangan ragu untuk lapor polisi.



/ Bagaimana cara **membedakan pinjol ilegal dan legal di Play Store/App Store**? /

Pertama-tama yang harus dicek adalah daftar *fintech* di situs ojk.go.id apakah pinjol tersebut terdaftar atau tidak di OJK. Kami meminta kepada masyarakat yang ingin meminjam secara *online* untuk melihat daftar 104 *fintech* pinjaman *online* legal, di luar daftar itu ilegal. Tetapi 104 ini juga perlu dicek secara berkala karena bisa saja berkurang terus.





/ Ada berapa banyak pinjol di Indonesia, dan berapa yang **legal dan ilegal**? /

Yang legal saat ini terdaftar 104, dan ilegal dari 2018 hingga 2021 sudah 3631 (berdasarkan data per 10 November 2021, red.)



/ Apakah ada **sanksi bagi pinjol** yang legal namun melakukan tindak pidana? /

Tidak ada pengecualian bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Kalau pelanggaran secara substantif, akan ada pelanggaran sanksi dari OJK sebagai pengawas. Kalau melakukan tindakan yang mengarah pidana, mereka juga harus mempertanggungjawabkan hal itu. Jadi masyarakat yang dirugikan oleh pinjol yang legal, jangan ragu lapor ke polisi. Tidak ada perbedaan penegakan hukum antara legal dan ilegal.



/ Apakah boleh **pinjol legal menggunakan jalur komunikasi kontak pribadi** (SMS/WhatsApp) untuk menawarkan layanannya? /

Kami pastikan bahwa semua penawaran pinjol melalui SMS dan WhatsApp adalah ilegal. Karena pinjol yang legal dilarang melakukan penawaran dengan pesan langsung kepada masyarakat.



/ Apa saja **jenis kasus yang bisa diadakan ke Kominfo/SWI**? /

Ada sekitar tujuh ribu pengaduan yang kami terima pada 2021 ini, yang dikategorikan sebagai: pengaduan ringan dan sedang, contohnya menanyakan legal atau tidak, alamatnya di mana, mengapa bunganya tinggi, ini sekitar empat ribu pengaduan. Kemudian ada kategori berat yang melakukan intimidasi, teror, ada juga yang tidak meminjam tapi kemudian uangnya dicairkan kemudian ditagih.





/ Bagaimana sebuah **aduan diproses hingga ke pemberian sanksi?** /

Kalau pengaduan-pengaduan yang masuk ke Satgas Waspada Investasi, kami lakukan tiga tindakan utama. Pertama, kami lakukan pemblokiran situs web aplikasi tersebut, yang kedua kami mengumumkan agar masyarakat memahami dan mengetahui pinjol ilegal tersebut, yang ketiga kami sampaikan laporan ke kepolisian agar dilakukan proses hukum jika ada tindak pidana.



/ Bisa dijelaskan terkait **moratorium izin bagi pinjol?** /

Moratorium pemberian izin pinjol oleh OJK sudah dilakukan sejak 2020. Sejak itu, tidak ada lagi pemberian izin bagi pelaku pinjol yang baru, karena industri ini akan dibawa secara lebih berkualitas. Bagaimana mereka (pinjol legal) melayani masyarakat, karena pada saat itu sudah sekitar 161 jumlah pinjol yang legal, jadi perlu penguatan di kelembagaannya bukan di kuantitasnya lagi, oleh karena itu diperlukan moratorium.



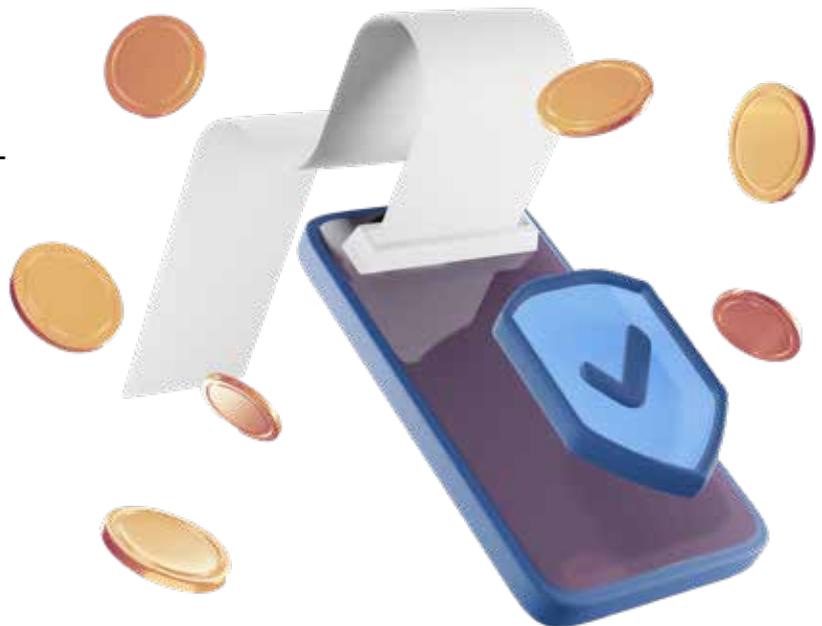
/ Sejak 28 Juli 2021, Google membuat persyaratan tambahan terkait **kelayakan bagi aplikasi pinjaman online, yaitu dokumen lisensi OJK**. Bisa dijelaskan terkait hal ini? /

Kami bekerjasama dengan Google dan minta bantuan Google untuk membantu pemerintah memberantas pinjol ilegal. Pada tanggal 28 Juli 2021, Google sudah mengumumkan bahwa mereka tidak akan menerima pembuatan aplikasi di Playstore apabila terkait dengan pinjol yang tidak ada lisensi dari OJK. Mereka sangat ketat, bahwa semua aplikasi pinjol yang ada di Google Playstore merupakan aplikasi yang berlisensi di OJK. Namun, banyak juga aplikasi yang memang tidak masuk ke Playstore tapi melalui link SMS. Di samping itu, kami juga perlu menyadarkan masyarakat bahwa banyak cara pelaku pinjol ilegal untuk mengelabui masyarakat dalam menawarkan pinjol ilegal.



/ Apakah pengaduan **harus melalui SWI terlebih dulu atau bisa langsung ke Kominfo?** /

Pemblokiran ini bisa dari berbagai sumber, bisa pengaduan dari masyarakat ke Satgas Waspada Investasi, bisa juga dengan Kominfo dengan cara sailor patrol harian. Jadi teman-teman Kominfo mengirimkan daftar nama-nama pinjol yang diduga ilegal untuk diverifikasi Satgas (SWI, red.). Jadi semua pengaduan ini masuk ke Satgas, kemudian diverifikasi. Kalau memang ilegal kami sampaikan kepada Kominfo untuk dilakukan pemutusan akses.



/ Apa saja **poin-poin** yang perlu diperhatikan **saat mengunduh aplikasi pinjol?** /

Yang perlu diperhatikan adalah, aplikasi yang selalu meminta kita mengizinkan semua data dan kontak di HP, kami pastikan ilegal, karena yang legal hanya dibolehkan mengakses 3 hal, kamera, lokasi dan suara.



/ Apakah **pinjol ilegal ini tidak bisa ditutup total?** /

Bisa ditutup total kalau masyarakat tidak mengakses. Pemutusan akses, penegakan hukum, pemberantasan secara masif, edukasi masyarakat yang kita lakukan baru akan berhasil kalau ada peran serta masyarakat. Ketika masyarakat sudah tidak akses, otomatis pinjol ilegal ini akan hilang di Indonesia.



/ Kenapa **masyarakat sering melakukan pinjaman online ilegal?** /

Kita bisa melihat masyarakat yang terjebak di pinjol ini dari dua sisi. Pertama adalah masyarakat tidak mengetahui bahwa itu adalah ilegal kemudian saat butuh uang dan kemudian terjebak, jadi itu karena ketidaktahuan. Yang kedua, karena sulit memenuhi kebutuhan mendasar, jadi ketika sudah tidak bisa meminjam kemanapun, mau tidak mau akan akses ke pinjol ilegal, dan juga ada perilaku masyarakat yang cenderung meminjam diluar kemampuan sehingga suatu saat melakukan gali lubang tutup lubang.



/ Bagaimana dari sisi **jaminan keamanan data pribadi?** /

Untuk pinjol yang legal dan berizin OJK, ada Peraturan OJK Nomor 77 tahun 2016. Pada peraturan tersebut, ada kewajiban bagi pelaku pinjol yang legal untuk menjaga data pribadi, ada larangan untuk menyebarkan data pribadi.

Data yang disampaikan di atas adalah hasil wawancara per tanggal 10 November 2021.



/ Kalau **pengguna telat bayar tapi sudah dilunasi**, apakah nama kita akan masuk **daftar hitam dari bank dan OJK?** /

OJK tidak mem-*blacklist* tentunya. Untuk pinjol yang legal, jika tidak membayar pada waktu tertentu mereka akan masuk daftar hitam pada pusat data *fintech* di asosiasinya. Jadi mereka tidak dapat mendapat pinjaman lagi dari *fintech* lain. Tetapi untuk yang ilegal tidak ada kaitannya dengan *blacklist* karena tidak ada akses ke data manapun.



Saksikan Video wawancara Netizen Bertanya Kominfo Menjawab hanya di Youtube Kemkominfo TV





KOMINFO

HITUNG MUNDUR:



365 :
DAYS

05
SECS

HITUNG MUNDUR

**1 TAHUN MENUJU TAHAP AKHIR
ANALOG SWITCH OFF (ASO)**

2 November 2022

SUDAHKAH KAMU BERALIH
KE TV DIGITAL?



Empat Pendekatan Kominfo

Sukseskan ASO 2
November 2022



Setelah Indonesia memiliki payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khusus di sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran (Postelsiar) mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya mewujudkan transformasi digital nasional, sebagaimana yang menjadi arahan langsung Presiden Joko Widodo pada 3 Agustus 2020 lalu.

Amanat dalam UU 11/2020 itu, pasal 72 angka 8 menyebutkan peralihan siaran TV analog ke siaran TV digital paling lambat dituntaskan dua tahun setelah UU Cipta Kerja disahkan, yaitu pada tanggal 2 November 2022 nanti. Artinya, kurang dari setahun lagi beralihnya siaran analog ke siaran digital akan dinikmati seluruh komponen masyarakat. Lantas bagaimana tahapan dan progresnya?

Hampir setiap negara menghadapi tantangan yang berlapis sekaligus bertingkat. Demikian juga Indonesia. Mulai dari kondisi alam termasuk di dalamnya jumlah penduduk yang besar, hingga kondisi non-alam seperti sistem penataan penyiaran yang hampir 60 tahun berjalan, memberi tingkat kerumitan tambahan pada kemulusan migrasi ke siaran TV Digital.

Apa yang menjadi amanat UU Cipta Kerja tersebut merupakan dasar penting dan sangat kuat bagi program migrasi ke siaran TV Digital. Peraturan turunannya juga telah lengkap dan mencukupi.

Dasar hukum tersebut kemudian mendapat tambahan dukungan dengan adanya lima arahan Presiden Joko Widodo terkait percepatan transformasi digital di Indonesia. Arahan Kepala Negara secara khusus mendorong

kesiapan penataan infrastruktur telekomunikasi sehingga membuat Indonesia siap menyambut era digital ekonomi.

Sejak UU Cipta Kerja disahkan, ada beberapa kemajuan penting yang perlu disampaikan secara luas melalui empat hal, sebagaimana strategi besar Kementerian Kominfo dalam melaksanakan dan memuluskan migrasi dari TV Analog ke TV Digital. Keempat hal itu, antara lain infrastruktur multipleksing siaran TV Digital, program siaran televisi digital, ekosistem perangkat televisi digital dan sosialisasi kepada masyarakat.

Infrastruktur Multipleksing Siaran TV Digital

Beberapa capaian penting di bidang ini adalah Kementerian Kominfo telah menghitung kebutuhan multipleksing di setiap daerah untuk memastikan setiap lembaga penyiaran yang saat ini bersiaran secara analog. Berdasarkan data, terdapat 697 buah dapat tertampung seluruhnya di multipleksing yang ada. Bahkan dimungkinkan juga ada penambahan program/saluran baru.

Sementara itu terkait penentuan pengelola multipleksing, baik oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) maupun Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) telah selesai ditetapkan. Ada dua metode yaitu seleksi dan evaluasi. Metode seleksi multipleksing telah dilakukan di 22 wilayah kerja atau provinsi. Sedangkan metode evaluasi

pada 12 wilayah kerja atau provinsi sedang dalam tahap finalisasi.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi 1 DPR RI pada 16 November 2021, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyampaikan dari 112 Wilayah Layanan Siaran yang menjadi target ASO, 90 wilayah di antaranya atau sebanyak 80,63% telah memiliki infrastruktur multipleksing. Dengan kata lain, masyarakat di daerah-daerah tersebut sudah dapat menyaksikan siaran digital.

Pada forum yang sama disampaikan, ASO tahap pertama, persentase kesiapan infrastruktur multipleksing sudah 100% sehingga cukup untuk menampung peralihan setiap siaran televisi analog secara keseluruhan. Sedangkan untuk daerah-daerah pada tahap ASO kedua dan ketiga, seluruh pembangunan infrastrukturnya ditargetkan untuk selesai dua bulan menjelang pelaksanaan ASO.

Segala aturan pendukung terkait kesiapan infrastruktur juga telah ada dan mencukupi. Hal-hal penting seperti mekanisme pengelolaan infrastruktur termasuk di dalamnya aturan tarif sewa, penentuan hak pengelolaan 50 persen slot multipleksing bagi LPS juga telah selesai.

Program Siaran Televisi Digital

Terkait program siaran, poin pentingnya adalah penyediaan tempat mencukupi bagi lembaga penyiaran hingga tetap tersedia tempat sekalipun ada migrasi sistem penyiaran. Menkominfo mengatakan bahwa tercatat sejak era reformasi, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah lembaga penyiaran yang bersiaran secara analog terbanyak. Saat ini aktif beroperasi 697 Lembaga Penyiaran di seluruh Indonesia yang terdiri dari LPP TVRI, 16 Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat, 14 Lembaga Penyiaran Komunitas, dan 666 Lembaga Penyiaran Swasta.

“Per hari ini (16 November 2021, pada saat Rapat Dengar Pendapat), kami mencatat terdapat 277 lembaga penyiaran atau 39,74% dari total Lembaga Penyiaran yang sudah menyediakan siaran secara digital. Sisa 420 lembaga penyiaran lainnya akan menyusul dan harus melakukan peralihan ke siaran digital sebelum setiap tahapan ASO yang telah ditentukan.

Menkominfo menambahkan bahwa pada dasarnya, Kementerian Kominfo memberikan keleluasaan kepada Lembaga Penyiaran untuk mengatur waktu beralih ke siaran digital menurut perencanaan masing-masing, selama dilakukan sebelum waktu Analog Switch Off.



Ekosistem Perangkat Televisi Digital

Terkait kesiapan ekosistem perangkat televisi digital, Kominfo telah berkoordinasi dengan vendor perangkat elektronik terkait ketersediaan STB dan televisi digital DVBT2. Berbagai hal yang perlu usaha ekstra adalah membantu kesulitan para vendor atas kelangkaan chipset. Suplai chipset terkendala karena permintaan meningkat sementara produksi tingkat dunia relatif menurun karena dampak pandemi.

Tahun 2021, sempat tercatat kenaikan pembelian STB di Agustus. Penjualan STB (Polytron >700 ribu) tapi ada keraguan soal STB gratis dan akhirnya masyarakat menunda beli sendiri. Harga pasaran STB DVBT2 hingga sekarang masih terkendali. Tidak terpantau adanya lonjakan tak wajar dalam hal harga.

Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah memesan chipset jauh-jauh hari, minimal 6 bulan sebelumnya. Untuk itu peran Kominfo salah satunya memastikan dan memberikan kepastian tentang jalannya program migrasi, dan ini sudah dilakukan, apalagi mengingat telah disahkannya UU Cipta Kerja yang menjadi dasar utama program ini.

Satu hal yang masih terus dimatangkan hingga tahun ini adalah pembahasan tentang bantuan STB untuk keluarga miskin. Faktor utama ada di penentuan penerima bantuan. Sumber data utama sekaligus satu-satunya yang akan dirujuk Kominfo adalah data DTKS dari Kementerian Sosial.

“Kriteria serta mekanisme pelaksanaan pembagian STB gratis tengah disiapkan. Menurut perhitungan sementara berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebanyak 6,7 juta Rumah Tangga Miskin berdomisili di daerah-daerah yang akan mengalami migrasi siaran analog ke digital. Kami sedang menyiapkan agar tersalurkan kepada rumah tangga miskin yang benar-benar membutuhkan sebelum dilakukannya ASO,” demikian paparan Menkominfo dalam RDP tersebut.

Data penerima bantuan masih dalam proses verifikasi dan validasi. Salah satunya memastikan data mencakup BNBA (By Name By Address) dan penerima bantuan memiliki televisi. Tujuannya bantuan hanya diperuntukkan bagi yang membutuhkan.

Sosialisasi ke Masyarakat

Langkah memberitahukan hingga nantinya berujung pada kesanggupan masyarakat untuk segera bermigrasi ke siaran TV Digital berjalan beberapa bulan. Berawal dari tanggal pengesahan UU Cipta Kerja, sosialisasi tentang migrasi ke TV Digital mulai intensif pada Maret 2021.

Kominfo menggunakan sumber daya yang ada, baik itu orang, peralatan dan dukungan anggaran untuk merancang strategi komunikasi program ini. Hasil pentingnya adalah adanya brand guideline, dalam rupa MODI (Maskot Digital Indonesia), ketentuan warna, dan hal-hal penting dalam unsur komunikasi.

Setelah itu, beragam bentuk komunikasi, baik melalui media maupun tatap muka, berupa tulisan, maupun media audio visual, media luar ruang atau dalam ruang, dan above the line atau below the line. Semua bentuk komunikasi, bentuk media dimanfaatkan untuk sarana komunikasi. Tentunya memperhitungkan kemampuan anggaran yang ada.

Salah satu alat untuk mengukur keberhasilan sosialisasi adalah survei langsung ke masyarakat. Pada Juli 2021 telah dilakukan beberapa survei. Hasilnya, tingkat pengetahuan masyarakat atas program migrasi ke siaran TV Digital rerata 30-35 persen. Hal ini menjadi tanda perlunya peningkatan intensitas sosialisasi ke masyarakat.

Bentuk intensitas tersebut meningkatkan kampanye ke televisi sekaligus menggandeng KOL skala nasional, dan membuat surat edaran ke seluruh stakeholder terkait, khususnya lembaga penyiaran untuk membantu sosialisasi.

Dalam satu tahun ini, sudah dibuat ILM dengan KOL Agnes Monica, adanya beragam lomba seperti film pendek, lomba artikel, dan lomba konten di sosial media. Salah satu milestone adalah membuat ILM berisi ajakan Presiden Joko Widodo pada masyarakat untuk mendukung migrasi tersebut. ILM Presiden ini masih dalam proses pengerjaan.

Kominfo juga menindaklanjuti kebutuhan intensitas sosialisasi ini dengan membuat surat edaran yang intinya mewajibkan lembaga penyiaran melakukan sosialisasi. Sebelumnya, lembaga penyiaran hanya dihimbau.





Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti (kiri) didampingi Ketua KPI Pusat, Agung Suprio menjadi pembicara dalam acara Seminar Nasional dalam rangka peringatan Hari Penyiaran Nasional ke 88 di RRI Surakarta, Jawa Tengah, 30 Maret 2021. Tim Komunikasi Publik dan Edukasi Migrasi TV Digital/Wienda Parwitasari



Dari kiri: Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Gerryantika Kurnia, Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti (kiri) dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Ahmad M. Ramli menghadiri acara royal dinner dengan KGPAA Mangkunegara IX dalam rangka peringatan Hari Penyiaran Nasional ke 88 di Keraton Mangkunegara Solo, Jawa Tengah, 31 Maret 2021. Tim Komunikasi Publik dan Edukasi Migrasi TV Digital/Wienda Parwitasari



Ketua KPI Pusat Agung Suprio (kiri) bersama Dirjen PPI Kementerian Kominfo Ahmad M. Ramli (tengah) dalam diskusi Membangun Ekosistem Penyiaran Televisi Digital di Jakarta, Rabu (10/3/21). Ahmad Ramli mengatakan masyarakat telah menjadikan jaringan atau akses telekomunikasi sebagai bagian paling penting dalam kehidupan di era digital namun selain kebutuhan akses telekomunikasi, masyarakat juga ingin menyaksikan siaran televisi dengan kualitas baik, bersih, jernih, canggih, dan disertai fitur yang sangat Interaktif. Tim Komunikasi Publik dan Edukasi Migrasi TV Digital/Wienda Parwitasari



Dirjen PPI Kementerian Kominfo Ahmad M. Ramli dalam diskusi Membangun Ekosistem Penyiaran Televisi Digital di Jakarta, Rabu (10/3/21). Ahmad Ramli mengatakan masyarakat telah menjadikan jaringan atau akses telekomunikasi sebagai bagian paling penting dalam kehidupan di era digital namun selain kebutuhan akses telekomunikasi, masyarakat juga ingin menyaksikan siaran televisi dengan kualitas baik, bersih, jernih, canggih, dan disertai fitur yang sangat Interaktif. Tim Komunikasi Publik dan Edukasi Migrasi TV Digital/Wienda Parwitasari





Pertunjukan wayang kulit di studio TVRI Jawa Tengah, 18 September 2021. Tim Komunikasi Publik dan Edukasi Migrasi TV Digital/Elisabeth Chintami



Pertunjukan virtual kesenian rakyat Aceh di Aula Dinas Kominfo Aceh, 12 Juni 2021. Tim Komunikasi Publik dan Edukasi Migrasi TV Digital/Frederick Octavianus

Pertunjukan virtual kesenian rakyat Jawa Barat di Studio TVRI Bandung, Jawa Barat, 11 September 2021. Tim Komunikasi Publik dan Edukasi Migrasi TV Digital/Frederick Octavianus





KOMINFO

Terima kasih atas **dukungan SobatKom**
Kementerian Kominfo

TERBAIK KEDUA

KATEGORI
MEDIA
SOSIAL

AMH
2021
ANUGERAH MEDIA HUMAS

ANUGERAH MEDIA HUMAS 2021

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

AMH

Pacu Kinerja Kehumasan Pemerintah

Era keterbukaan informasi publik di tengah derasnya arus digitalisasi saat ini menuntut optimalisasi peran government public relations (humas pemerintah) agar mampu menjadi corong informasi publik kepada masyarakat.

Kemajuan dunia digital yang melahirkan beragam disrupsi, membuka ruang konektivitas yang begitu lebar sehingga masyarakat kerap mendapat beragam hidangan informasi di ruang virtual baik yang positif maupun yang negatif. Tsunami informasi yang kerap melanda ruang virtual, merupakan tantangan terbesar yang harus dihadapi humas pemerintah.

Menghadapi kenyataan tersebut, government public relations (GPR) memiliki peran yang sangat penting, baik sebagai publisher maupun producer. Untuk itu, eksistensi GPR perlu dioptimalisasi melalui peningkatan SDM yang adaptif, inovatif, dan berwawasan digital.



Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, komunikasi publik dan kehumasan pemerintah harus mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan dunia digital.

“Agar konten-konten yang dirilis dapat menjangkau cakupan masyarakat yang lebih luas dengan demografi yang lebih beragam,” ujarnya dalam acara Malam Anugerah Media Humas 2021, di Nusa Dua, Bali, Kamis (4/11/2021).



Pacu Kinerja Kehumasan

(Ditjen IKP) melaksanakan Anugerah Media Humas (AMH). Anugerah tersebut merupakan bentuk penghargaan yang diberikan secara khusus kepada pranata humas pemerintah, baik di kementerian, lembaga, BUMN, universitas negeri, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten atau kota.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong mengatakan, AMH merupakan bagian dari bentuk apresiasi terhadap prestasi yang diraih kehumasan di setiap lembaga pemerintahan.

“Tentu saja dasar pemikirannya adalah pertama, untuk memacu humas supaya bekerja lebih baik, terus meningkatkan kinerjanya. Kedua, ini apresiasi kepada humas kementerian dan lembaga yang dianggap sudah relatif baik menjalankan tugasnya, mengomunikasikan kepada publik program-program pemerintah,” ujarnya saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jakarta, Senin (22/11/2021).

Dirjen Usman mengatakan, pelaksanaan AMH pun dilakukan melalui tahapan dan proses penjurian yang ketat dari para tim juri independen yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Hal itu dilakukan agar para tim juri bisa melakukan penilaian secara obyektif.

“Jurinya biasanya kita ambil dari luar dan kita serahkan pada ahlinya dan dinilai secara keseluruhan kategorisasi nilainya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dirjen Usman menjelaskan, kategori yang dinilai dalam ajang AMH selalu mengalami perubahan setiap tahun sesuai dengan konteks. Untuk kategori siaran pers, salah satu hal penting yang masuk dalam proses penjurian yakni nilai berita yang layak dipublikasikan.

“Untuk media sosial, berapa banyak interaksi dan respon dari masyarakat, itu jadi penilaian juga. Begitu juga dengan website, interaktifitasnya itu seperti apa dan bagaimana respon dari masyarakat,” tuturnya.

Namun, Dirjen Usman mengakui bahwa partisipasi kehumasan di ajang AMH 2021 mengalami penurunan. Hal itu terjadi lantaran di tahun 2020 pelaksanaan AMH sempat mengalami kevakuman akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, AMH tahun 2021 dilakukan sebagai upaya membangkitkan kembali semangat pranata humas dalam mengikuti kompetisi tersebut.

“Kalau pengalaman saya sebelum Covid-19 itu selalu terjadi peningkatan. Tapi kemarin itu memang dibandingkan tahun 2019 terjadi penurunan karena sempat jeda. Selain itu mungkin ada kendala juga bagi pemerintah daerah atau kementerian, lembaga, BUMN, dan perguruan tinggi dalam mengirimkan karya mereka karena Covid,” tuturnya.

Oleh karena itu, Ditjen IKP berkomitmen mendorong partisipasi pranata humas dalam mengikuti AMH ke depan. Hal itu sangat penting dilakukan untuk bisa memacu kinerja kehumasan pemerintah agar semakin berkualitas, adaptif, dan inovatif.

“Mungkin tahun depan kalau kondisinya sudah membaik Covid-nya bisa kita lakukan lagi hal seperti itu,” imbuhnya.

Kominfo Raih Penghargaan Terbaik II Kategori Medsos

Pada ajang Anugerah Media Humas (AMH) yang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali, 4 November 2021 yang lalu, Tim Humas Kementerian Kominfo menjadi salah satu nominator dan meraih penghargaan kategori media sosial terbaik kedua.

Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rhina Anita menyatakan turut berbangga atas prestasi dan penghargaan yang telah diraih oleh Humas Kementerian Kominfo untuk kategori medsos. Menurut Rhina, prestasi tersebut merupakan bagian dari hasil kerja keras dan kerjasama tim media sosial yang solid dan layak diapresiasi.

“Kita turut berbangga atas prestasi yang diraih karena penghargaan tersebut tentunya diperoleh karena hasil kerja keras yang solid dari tim medsos,” ujarnya.

Meski demikian, Rhina berharap, prestasi tersebut tidak membuat Tim Biro Humas Kementerian Kominfo cepat puas. Sebaliknya, prestasi tersebut hendaknya bisa dijadikan motivasi kinerja tim agar semakin baik ke depannya.

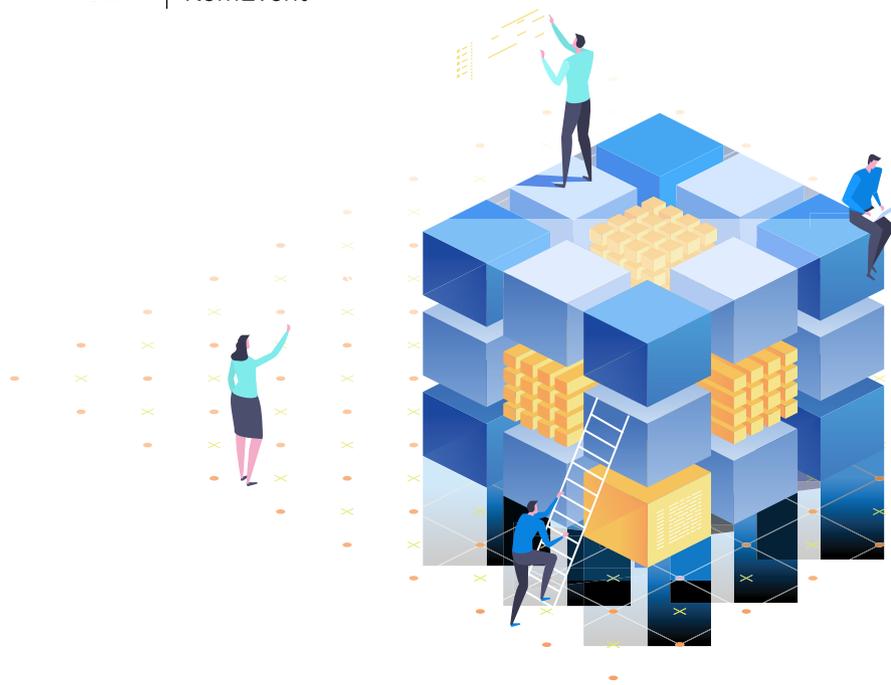
“Harapannya, penghargaan tersebut memotivasi kita untuk terus meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim, agar tercipta Humas Kominfo yang berkualitas, adaptif, inovatif, dan sesuai dengan perubahan zaman,” tuturnya.

Sementara itu, mewakili Tim Media Sosial Biro Humas Kementerian Kominfo, Annisa Bonita mengisahkan, perjuangan membangun branding Kehumasan Kominfo di media sosial berawal dari Twitter di tahun 2015 dan Instagram di tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Rudiantara.

Dalam keterbatasan sumber daya, tutur Bonita, peningkatan jumlah konten di media sosial terus dilakukan sesuai dengan isu yang sedang terjadi. Selain itu, tim medsos juga melakukan survei, menganalisa perilaku warganet, dan menciptakan konten yang tepat momen dan sesuai dengan trend.

“Kita mulai take over tahun 2015 dengan menyebarkan berita dan live melalui Twitter. Sedangkan Instagram dimulai sejak tahun 2017. Di akhir tahun 2020 kita memulai review bulanan dengan melihat performa media sosial dan melakukan evaluasi terus-menerus. Dan di tahun 2020, jumlah follower mengalami peningkatan saat pandemi Covid-19,” tuturnya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Kominfo, Rhina Anita, menerima piagam Penghargaan Terbaik II Kategori Media Sosial Kelompok Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, dan PTN pada gelaran Anugerah Media Humas, Kamis 4 November 2021 di Nusa Dua, Bali.



Perkembangan dunia digital tidak hanya mempermudah masyarakat melakukan sosialisasi dan interaksi tetapi juga mendatangkan masalah baru. Beragam informasi hoaks yang beredar di ruang virtual mengharuskan pemerintah untuk tetap menggunakan cara lama

Program Penyuluh Informasi Publik (PIP), yang menasar warga sebagai bagian dari pelaksanaan *Government Public Relations*.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong

Urgensi PIP di Era Transformasi Digital

dalam menyebarkan informasi publik yakni melalui komunikasi langsung.

Kementerian Komunikasi dan Informatika pun sejak tahun 2017 telah mengembangkan pendekatan komunikasi langsung untuk menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Pendekatan itu dilakukan melalui

menyatakan, eksistensi Penyuluh Informasi Publik muka masih sangat dibutuhkan dalam mendiseminasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

“Tidak bisa lewat media belaka. Kalau hanya lewat media, kita tidak bisa ada umpan balik. Dengan tatap muka itu bisa terjadi diskusi dan interaksi,” ujarnya saat

diwawancarai di ruang kerjanya, Jakarta, Senin (22/11/2021).

Menurut Dirjen IKP Usman Kansong, penyebaran informasi melalui tatap muka sangat diperlukan melalui *key opinion leader* (KOL). PIP sebagai bagian dari *key opinion leader* memiliki peran penting menyampaikan beragam kebijakan pemerintah terutama kepada masyarakat yang berada di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Selain itu, PIP juga berperan dalam memerangi hoaks, disinformasi yang beredar di tengah masyarakat.

Ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, di mana Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan amanat untuk mengoordinasikan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan pemerintah.

Bukan Bagian dari AMH

Tahun ini, Penyuluh Informasi Publik turut mendapat penghargaan dalam ajang Anugerah Media Humas (AMH) yang dilaksanakan di Bali, 4 November 2021 lalu. Meski demikian, Dirjen IKP Usman Kansong menegaskan, PIP tidak masuk dalam kategori penilaian di ajang AMH 2021, karena ajang tersebut hanya dikhususkan bagi lembaga pemerintahan seperti Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Sebetulnya di tahun-tahun sebelumnya tidak ada karena mereka bukan bagian dari AMH. Ini sebagai penghargaan dan saya sendiri memang minta kalau bisa setiap tahun itu ada,” tuturnya.

Lebih lanjut, Dirjen IKP Usman Kansong menjelaskan, para penyuluh informasi publik merupakan penyuluh agama. Saat menjalankan tugas, mereka dibekali pengetahuan melalui bimbingan teknis dan diberi buku panduan berisi materi yang akan digunakan saat menyebarkan informasi kepada masyarakat.

“Para Penyuluh Informasi Publik ini biasanya orang-orang yang kita ambil dari Kementerian Agama. Kita bekerja sama dengan Kementerian Agama, tapi kita juga memberikan honor ke mereka per kegiatan, bukan honor bulanan,” tuturnya.



Pemenang Penghargaan PIP



PIP Bali

Dalam ajang Anugerah Media Humas 2021, penghargaan juga diberikan kepada para penyuluh Informasi Publik. Pelaku PIP yang mendapatkan penghargaan dalam momen tersebut yakni, I Wayan Mangku dari Kelurahan Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Babandem, Bali.

I Wayan Mangku menjalankan tugasnya sebagai Penyuluh Informasi Publik sejak tahun 2018. Sebelumnya, warga Kelurahan Bebandem ini merupakan penyuluh agama Hindu non-PNS Kemenag Kabupaten Karangasem sejak 2014. Berikut kutipan wawancara singkat dengan I Wayan Mangku

Q: Sejak kapan Anda menjadi Penyuluh Informasi Publik?

Sebelum ke PIP, saya menjadi Penyuluh Agama Hindu non-PNS Kemenag Kabupaten Karangasem mulai tahun 2014 dengan wilayah tugas, Desa Adat Bungaya, Desa Bungaya Kecamatan Bebandem. Pada tahun 2015 pindah ke Desa Adat Bebandem, Desa Bebandem Kecamatan Bebandem. Pada tahun 2016 pindah ke Desa Bebandem Kecamatan Bebandem yang mencakup 5 desa adat, yaitu; Desa Adat Bebandem, Kastala, Jungseri, Tohpati dan Desa Adat Liligundi. Pada tahun 2017 pindah ke Desa Adat Bebandem saja sampai 2018 dan tahun 2019 sampai sekarang bertugas di Desa Adat Sibetan, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.

Saya menjadi Penyuluh Informasi Publik (PIP) Kominfo Pusat mulai dari tahun 2018 sampai sekarang.



Q: Selama terlibat sebagai Penyuluh Informasi Publik, apa saja tugas yang sudah Anda lakukan dan informasi publik seperti apa yang Anda berikan kepada masyarakat?

Saya menjadi Penyuluh Informasi Publik pada Maret 2018, di mana ada MOU antara Kementerian Agama yang bekerja sama dengan Kementerian Kominfo. Saat itulah saya mendapat bimbingan teknis melalui pelatihan oleh Kominfo. Dari sanalah saya mulai bekerja dari tahun 2018.

Q: Apa saja yang Anda lakukan selama menjadi penyuluh informasi publik?

Selama saya melakukan diseminasi dari tahun 2018, ada Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pancasila, Vaksin Covid-19 untuk Ibu hamil, lansia dan stunting. Itu sudah ada dalam buku panduan. Intinya sudah ada materi yang disiapkan untuk didiseminasikan ke masyarakat.



Q: Apa persoalan yang dihadapi selama menjalankan tugas sebagai penyuluh informasi publik?

Kendala yang sering saya hadapi terkait dengan medan apalagi di musim hujan. Karena wilayah yang menjadi tugas saya itu ada yang di kaki Gunung Agung. Saya harus melewati jalan buruk dan sungai untuk bisa menjangkau masyarakat di wilayah tersebut. Saya juga sering berbagi masker kepada masyarakat. Dari sisi biaya transportasi dan honor yang saya dapatkan dalam satu kali kegiatan itu 150.000 rupiah tidak mencukupi. Namun saya bahagia karena bisa berbagi kepada sesama.



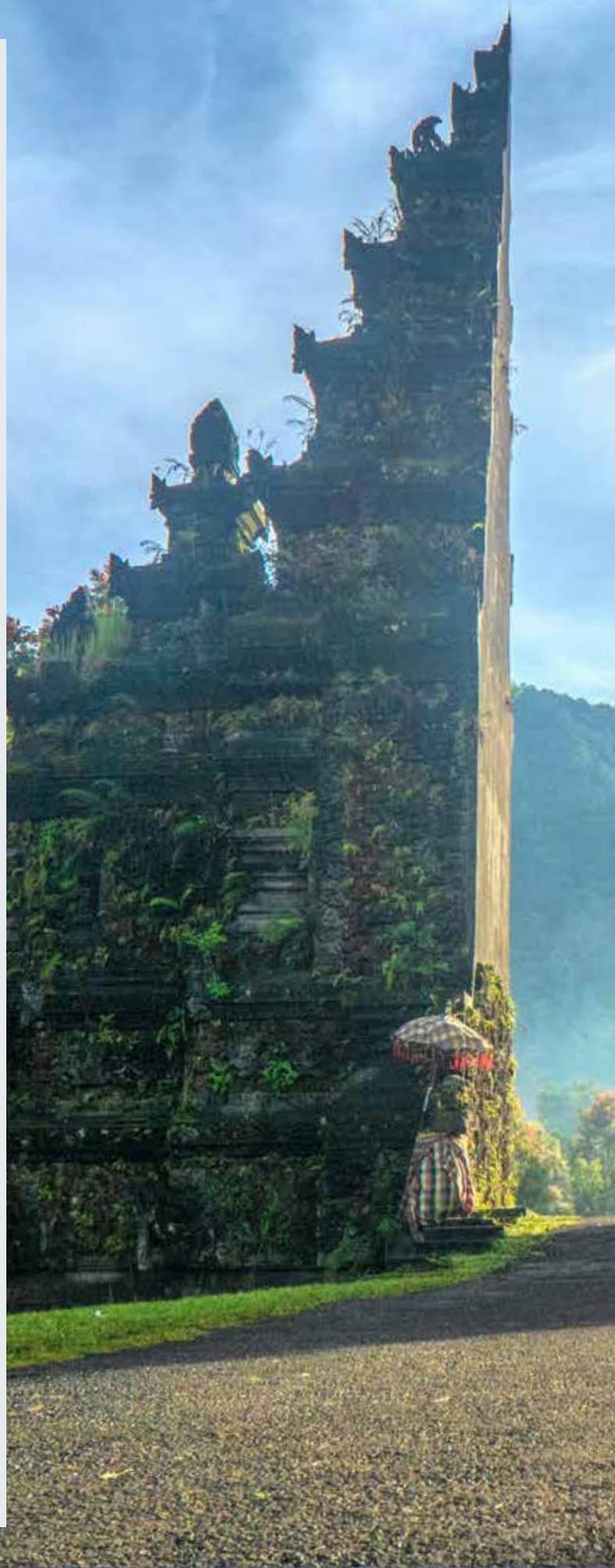
Q: Berapa wilayah yang menjadi tanggung jawab bapak dalam mendiseminasi informasi publik selama ini?

Pada tahun 2018 saya melayani wilayah Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem. Mulai 2019 sampai sekarang melayani wilayah Kecamatan Bebandem, dan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.



Q: Bagaimana proses yang dijalankan saat Anda mendiseminasi informasi publik dan apa harapan Anda?

Awalnya saya mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Kementerian Kominfo. Setelah itu saya menjalankan tugas yang diberikan dengan buku panduan yang diberikan Kominfo. Dan selama bertugas saya mendiseminasi informasi terkait Vaksin Covid-19, Protokol Kesehatan, Stunting, Kredit Usaha Rakyat. Harapan saya semoga Kominfo juga bisa memperhatikan honor kami, karena besarnya tidak sesuai dengan tugas yang kami jalankan. Apalagi saya yang bertugas di wilayah pedesaan dengan kondisi infrastruktur yang buruk. Kadang saya harus berjalan kaki melintasi sungai. Mungkin kalau bisa, kegiatannya diperbanyak.



PIP NTT

Selain I Wayan Mangku dari Bali ada juga Yerniaman Laia dari Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kabupaten Kota Kupang, NTT. Yerniaman Laia menjadi salah satu Penyuluh Informasi Publik yang mendapatkan penghargaan dalam ajang AMH 2021 di Bali.

Q: Sejak kapan dan apa motivasi Ibu menjadi Penyuluh Informasi Publik?

Saya menjadi Penyuluh Informasi Publik sejak tahun 2017. Motivasi saya adalah untuk membantu pemerintah mendiseminasi informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tahu dan mereka juga boleh mendukung program kebijakan pemerintah.



Q: Berapa wilayah yang menjadi tanggung jawab ibu dalam mendiseminasi informasi publik?

Adapun wilayah yang menjadi tanggung jawab saya tahun 2017-2021 dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, Tahun 2017-2019 di Kecamatan Oebobo, mencakup Kelurahan LiliBa, Kelurahan Naimata, dan Kelurahan Oebobo. Yang kedua, tahun 2019 sampai saat ini, saya ditugaskan di Kecamatan Maulafa yang mencakup Kelurahan Sikumana, Kelurahan Maulafa, dan Kelurahan Belo.



Q: Jenis informasi seperti apa yang sudah Anda diseminasi kepada masyarakat?

Beberapa informasi yang sudah saya sampaikan dari tahun 2017-2019 yaitu tentang isu hoaks, KUR, Narkoba, Pancasila, Stunting, yang beberapa lagi di konten-konten pemerintah yang saat itu bersifat temporal sudah saya sampaikan di masyarakat, dan sangat membantu sekali ketika mereka memiliki pemahaman yang baik dan mereka melakukannya, dan mereka bersyukur saya sebagai katalisator, sebagai penyuluh informasi public menginfokan kepada mereka, sehingga mereka juga tidak ketinggalan informasi.

Q: Apa manfaat yang Anda peroleh dan bagi masyarakat saat menjadi Penyuluh Informasi Publik?

Manfaat yang saya dapatkan dari menjadi menjadi Penyuluh Informasi Publik adalah, bagi saya secara pribadi, saya mendapatkan pengetahuan yang banyak, mendapatkan teman di seluruh Nusa Tenggara, di seluruh Nusantara dari berbagai agama, suku tetapi bersatu dengan tujuan yang sama yaitu mencerdaskan bangsa, dan menjadi corong, garda terdepan untuk menyampaikan dan mendiseminasikan kebijakan maupun program pemerintah.

Yang Kedua untuk masyarakat; pertama masyarakat menjadi cerdas, menjadi bijak, menjadi selektif, tidak gampang termakan isu hoaks, yang memprovokasi dan memecah belah. Bangsa ini, dan juga tidak punya pemahaman atau kesalahan berpikir kesalahpahaman akan kebijakan pemerintah yang sementara dicanangkan.



Q: Apa tantangan yang Anda hadapi selama menjadi bagian dari Penyuluh Informasi Publik?

Adapun tantangan yang kami hadapi sebagai Penyuluh Informasi Publik, secara pribadi dari faktor internal saya kadang merasa lelah juga. Karena menyebarkan informasi waktu tatap muka komunitas anak, remaja, pemuda bahkan juga bapak-bapak, ibu-ibu, warga itu membutuhkan tenaga ekstra. Kadang lelah dan jenuh juga. Dana kalau faktor eksternal yang saya hadapi di lapangan penolakan-penolakan dari berbagai pihak. Kadang dari warga juga pemangku kepentingan yang menanyakan ini apa, ini dari mana? Ada surat tugas gak, sekalipun kami sudah tunjukan surat tugasnya. Selalu aja ada pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya secara verbal itu menunjukkan tidak suka, tidak senang karena kehadiran kami. Tapi setelah berjalan kami mulai membuktikan diri bahwa sebenarnya kami adalah perpanjangan tangan pemerintah untuk menolong masyarakat.



Q: Apa harapan Anda untuk PIP ke depan?

Harapan saya ke depan, PIP semakin jaya, semakin eksis, dan juga status jelas dari pemerintah, untuk menjadi bagian dari pemerintah untuk kami terus berkarya dan menjadi bagian terdepan menginfokan, mendiseminasikan bahkan juga menjadi sahabat masyarakat.





Peringati Hari Pahlawan

Menteri Johnny:

Jadikan Ruang Digital Tempat Berbagi Ide Progresif

Menyongsong transformasi digital, semangat pahlawan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan perlu diterjemahkan dalam spirit adaptif dan resiliensi.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan semangat Bung Tomo dan pahlawan juga diperlukan dalam menjaga ruang digital Indonesia aman, inklusif dan produktif. Bahkan, Menkominfo mengajak setiap orang menjadi pejuang di era digital dengan menjadikan ruang digital tempat berbagi ide progresif.

“Mari kita menjadi pejuang-pejuang di era baru, memastikan ruang digital yang aman, yang inklusif dan yang produktif. Mari jadikan ruang digital kita sebagai *melting pot* bagi ide-ide progresif yang merawat kebhinekaan serta kemajuan bangsa dan negara Indonesia,” tegasnya dalam Upacara Peringatan ke-76 Hari Pahlawan di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (10/11/2021).



Menteri Johnny menyatakan perayaan hari pahlawan menjadi momentum reflektif bagi seluruh masyarakat untuk membangkitkan kembali memori kolektif dan spirit nasionalisme.

“Hari ini, 76 tahun yang lalu. Salah satu pertempuran terhebat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terjadi di Surabaya. Dengan pekikan semangatnya, Bung Tomo mengajak para pejuang untuk tidak menyerah dan terus mengobarkan perlawanan terhadap serdadu pasukan kolonial dan sekutu saat itu,” jelasnya.

Semangat yang diwariskan pejuang kemerdekaan bangsa itu, menurut Menkominfo perlu dijaga menjadi *spirit* berbangsa dan bernegara. Menteri Johnny menegaskan pahlawan seperti Bung Tomo mempunyai semangat yang lantang dalam mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyerukan kemerdekaan.

“Mengutip pernyataan Bung Tomo, kita tunjukkan bahwa kita benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Merdeka atau mati!,” tandasnya.

Menteri Johnny menyatakan kegemilangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan bagi Indonesia bukan titik henti perjuangan. Menurutnya pahlawan pada hakekatnya adalah orang-orang yang rela menggembleng diri dan berdeteminasi sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita bersama yang lebih besar.



“Pada saat ini *spirit*, semangat, rejuvenasi melahirkan model kepahlawanan yang baru, kepahlawanan di era di masa pandemi dan kepahlawanan di era di masa kebangkitan digital,” ujarnya.

Oleh karena itu, Menkominfo juga mengajak masyarakat Indonesia untuk mengenang kobaran semangat dan persatuan para pahlawan terdahulu, diwujudkan dalam komitmen bersama menghadapi pandemi Covid-19.

“

Mari kita menjadi pejuang-pejuang di era baru, memastikan ruang digital yang aman, yang inklusif dan yang produktif. Mari jadikan ruang digital kita sebagai *melting pot* bagi ide-ide progresif yang merawat kebhinekaan serta kemajuan bangsa dan negara Indonesia





“Mari kita resapi untuk bersama-sama membawa negeri kita ini keluar dari lorong gelap pandemi Covid-19. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Bapak Joko Widodo, pandemi Covid-19 ibarat kawah candradimuka yang menguji, mengajarkan, sekaligus mengasah kebersamaan kita sebagai bangsa dan sebagai kesatuan negara,” jelasnya.

Menteri Johnny menjelaskan langkah bangkit lebih tangguh dan kuat menjadi satu-satunya pilihan bagi seluruh elemen bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi.

“Kita bersama berterima kasih kepada seluruh elemen bangsa kita sendiri, termasuk segenap komponen masyarakat yang telah menunjukkan komitmen dan kerjasamanya, sehingga sejauh ini kita mampu menangani pandemi Covid-19 dengan baik,” tuturnya.

Menkominfo mengingatkan pandemi Covid-19 belum berakhir. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk perjuangan dan aktualisasi spirit kepahlawanan dapat dilakukan setiap orang dengan terus menjaga protokol kesehatan dan menggalakkan program Vaksinasi Covid-19.

“Secara khusus, tetap menjaga kedisiplinan protokol kesehatan menjelang momen libur Natal dan tahun baru 2022,” tandasnya.

Menteri Johnny menyatakan pandemi Covid-19 menuntut pengejawantahan nilai kepahlawanan yang konsisten pada setiap elemen bangsa. Hal itu bisa dimulai dengan meningkatkan pemahaman dan pengorbanan seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga diri dan keluarga dari aktivitas yang rawan terhadap penularan virus Covid-19.

Bahkan, dengan semangat yang sama, Menkominfo mengharapkan akan tumbuh generasi yang bisa mewujudkan Indonesia Maju. “Selamat Hari Pahlawan, semoga kita bisa terus menjaga asah perjuangan dalam diri kita, dalam membangkitkan semangat kepahlawanan generasi bangsa untuk terus tumbuh di era digital demi mewujudkan Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju,” harapnya.

Upacara Peringatan Hari Pahlawan di lingkungan Kementerian Kominfo berlangsung secara hibrida. Acara itu diikuti oleh pejabat pimpinan madya dan pratama secara langsung di halaman Kementerian Kominfo. Sementara, sivitas Kementerian Kominfo mengikuti secara daring.



REFLEKSI PERJUANGAN PAHLAWAN INFORMASI DALAM KOLEKSI MONUMEN PERS NASIONAL

Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November merupakan bentuk penghargaan atas perjuangan para pahlawan yang berjuang secara patriotik pada 10 November 1945 di kota Surabaya. Ketika itu, Tentara Keamanan Rakyat (TKR), pemuda, dan rakyat berjuang matian-matian melawan tentara sekutu. Pertempuran tersebut berlangsung selama 14 hari tanpa henti. Semangat terus digelorakan kepada semua rakyat Surabaya agar tetap berjuang sampai titik darah penghabisan.

Ada banyak catatan sejarah perjuangan fisik lainnya di seantero Nusantara pada waktu itu. Untuk menggelorakan semangat rakyat dalam melawan penjajah, tidak cukup hanya dengan pidato atau coretan-coretan pada dinding, namun melalui penyebaran informasi atau berita-berita mengenai perkembangan perjuangan di seluruh tanah air, baik melalui media cetak maupun radio (belum ada televisi atau media sosial). Jika kita ingin melihat bagaimana kiprah perjuangan para penyebar informasi atau berita, kita dapat melihatnya melalui koleksi museum yang ada di Monumen Pers Nasional di Surakarta. Diantara koleksi Monumen Pers Nasional yang dapat merefleksikan perjuangan penyebaran informasi di masa awal kemerdekaan adalah plat cetakan perdana surat kabar Kedaulatan Rakyat (KR) Yogyakarta dan Pemancar Radio "Kyai Balong". Kisahnya akan diceritakan kembali dalam artikel berikut ini.

Plat Cetak Perdana KR

Pada sekitar tahun 1930-an di Yogyakarta, satu-satunya koran yang bisa dibaca dan menjadi hiburan bagi warga masyarakat hanyalah koran sore berbahasa Jawa dengan huruf Latin, bernama Sedyta Tama.

Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942, Barisan Propaganda Jepang (Sendenbu) masih membiarkan Sedyta Tama terbit, namun dengan syarat harus menggunakan bahasa Indonesia. Karena terus menerus mendapatkan tekanan dari pihak Jepang, akhirnya penerbitan koran ini dihentikan oleh Direktornya R. Roedjito. (Kantor ditutup). Kantor Sedyta Tama kemudian "dirampok" Jepang dan digunakan sebagai kantor penerbitan koran Jepang yang kemudian diberi nama Sinar Matahari. Situasi ini berlangsung selama tiga setengah tahun.

Pemuda-pemuda Indonesia di Yogyakarta yang dimusuhi Belanda, bekerja di harian Sinar Matahari yang diterbitkan Sendenbu (Barisan Propaganda Jepang) di Yogyakarta yang waktu itu dipimpin RM. Gondhojuwono. Termasuk dalam barisan pemuda-pemuda tersebut antara lain Pemimpin Redaksi Sedyta Tama Bramono, Soemantoro, serta para guru pejuang seperti Samawi. Setelah Hiroshima dan Nagasaki diporak porandakan Amerika Serikat, Jepang menyerah kepada Sekutu. Hanya saja pendudukan tentara Jepang di Yogyakarta masih utuh.

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan di Jakarta. Dukungan dan partisipasi pertama diumumkan dari Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri

Paku Alam VIII menyatakan Yogyakarta sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia.

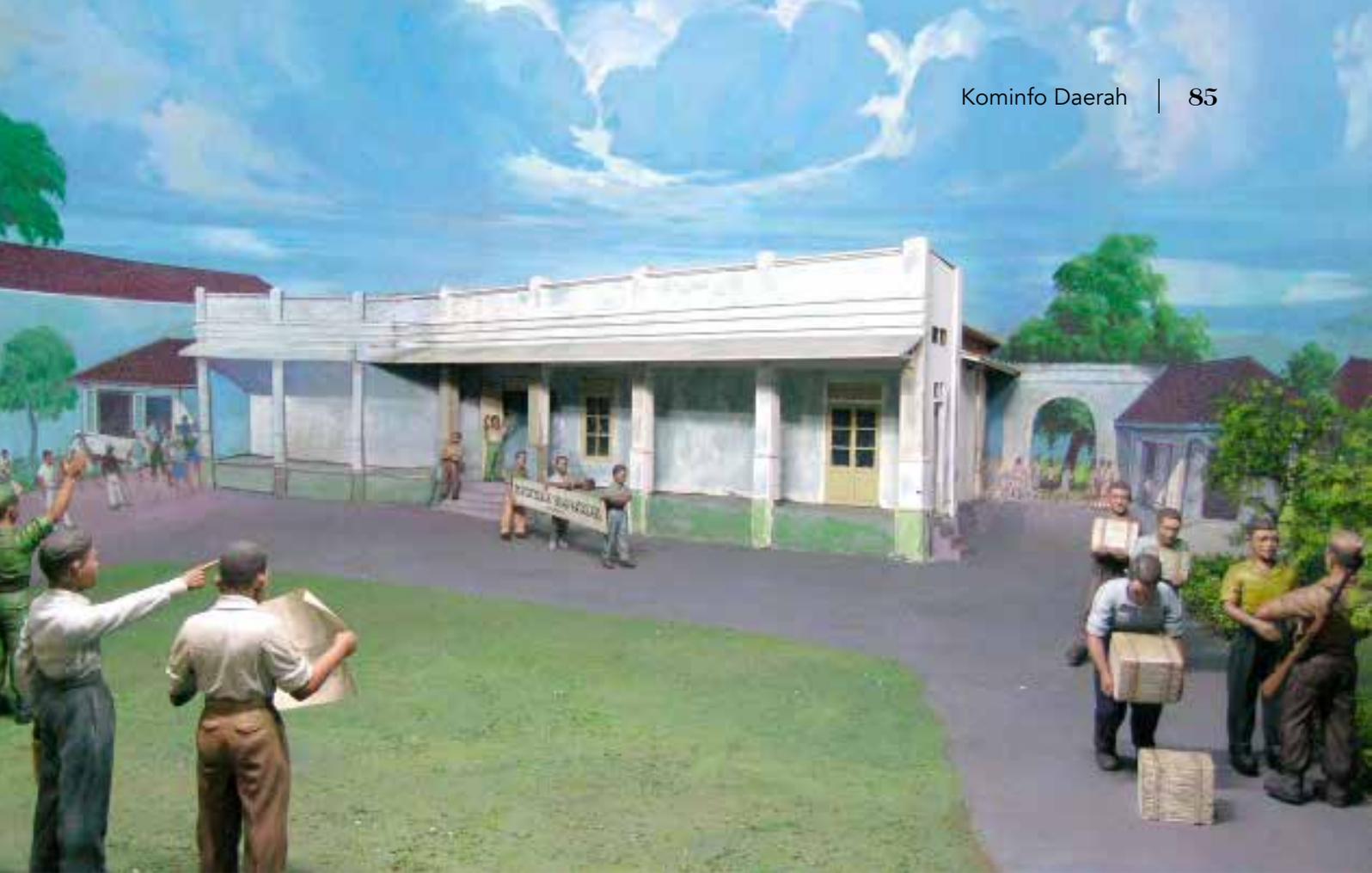
Komite Nasional Indonesia (KNI) bersama Badan Keamanan Rakyat (BKR) mengobarkan semangat rakyat untuk menaklukkan kekuatan militer Jepang dengan menyerbu Pingit, Kotabaru dan Maguwo. Pada 26 September 1945, pemuda-pemuda BKR dibawah pimpinan Kepala Polisi Istimewa R. Sudarsono mengadakan aksi mengambil alih toko-toko, perusahaan dan pabrik yang dikuasai Jepang.

Ditengah situasi genting tersebut, Harian Sinar Matahari yang sebagian dimotori pejuang-pejuang dari bekas Sedyta Tama seperti Seomantoro, Bramono,

Moeljono, Samawi, Soeprijo Djojospadmo, Djoemadi, Boerhan, Moehammad Noer, Drijodipoerwo, dan sejumlah tokoh lainnya berupaya terus terbit. Namun terbitannya tidak lagi berorientasi pada propaganda dan kepentingan Jepang. Tanpa disadari oleh Jepang, berita yang dimuat justru informasi penting bagi pejuang Republik Indonesia.

Berita-berita menggelorakan perjuangan para pejuang Republik Indonesia terus digemakan, antara lain tentang peristiwa Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sanggup berdiri dibelakang Soekarno-Hatta, maklumat-maklumat





Diorama Perebutan Percetakan Harian Sinar Matahari di Yogyakarta- Diorama II Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta

dan seruan mengobarkan semangat juang pemuda untuk mempertahankan Kemerdekaan RI yang sudah diproklamasikan itu. Berita-berita yang terus digemakan dan dikembangkan Sinar Matahari itu mengundang ketidaksenangan Jepang yang waktu itu kekuatan fisik dengan segala perlengkapan senjatanya, khususnya di Yogyakarta, masih utuh. Apalagi tentara Jepang memang tidak pernah diusir sekutu. Disamping itu, semua jawatan dan instansi pemerintah masih dikuasai Jepang.

Salah satu upaya mengamankan Harian Sinar Matahari agar tidak dimanfaatkan Jepang untuk memanipulasi situasi, adalah dengan menyegel kantor Sinar Matahari. Penyegelan dilakukan oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Yogyakarta. Samawi ikut bekerja menyasati penyegelan itu. Dengan demikian, yang terjadi sebenarnya penyegelan kantor Sinar Matahari bukan dilakukan oleh Jepang! Pada waktu itu Samawi dan Soemantoro termasuk anggota pleno KNI Daerah Yogyakarta. Samawi dikenal banyak membantu dan sungguh-sungguh revolusioner. Demikian pula pada waktu membuka kunci pintu kantor Sinar Matahari, Samawi mempeloporinya bersama Soemantoro dan Bramono. Kelompok pejuang ini bersepakat hendak menerbitkan koran baru.

Saat Sinar Matahari disegel, penduduk Yogyakarta tidak mendapat penerangan atau informasi tertulis yang memadai mengenai situasi dunia dan keadaan dalam negeri Indonesia. Maka timbullah kebulatan tekad Samawi dan kawan-kawan untuk segera menerbitkan surat kabar sendiri. Sesudah segel kantor Sinar Matahari dibuka, dilakukanlah persiapan menerbitkan pengganti Sinar Matahari. Pada 26 September 1945, layout koran telah dikerjakan. Begitu pula bahan-bahan opini dan peristiwa dalam dan luar negeri, juga kata pengantar dari penerbit, serta segala bahan informasi lain, semua telah lengkap. Yang belum ada hanya nama untuk surat kabar yang akan segera lahir itu. Akhirnya diusulkan agar namanya dimintakan saja kepada pengurus KNI Daerah Yogyakarta yang berkantor di bekas rumah kediaman Chokan-Kakka (semacam Gubernur Jepang) di Jalan Malioboro.

Dua redaktur yaitu Samawi dan Soemantoro segera diutus saat itu juga dan mereka diterima Ketua KNI Daerah Yogyakarta Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo. Sesudah berbincang dan berpikir sejenak, Mr. Poerwokoesoemo tersenyum lalu memberi nama Kedaulatan Rakyat. Nama itu dinilai sangat pas dan selaras dengan aspirasi perjuangan waktu itu. Pemberian nama itu juga mempertimbangkan dan disesuaikan dengan keinginan rakyat yang dijajah Belanda ratusan tahun. "Lagi pula istilah Kedaulatan Rakyat-Volk Sovereiniteit, sedang menjadi slogan rakyat yang ingin bebas dari penjajahan" kata Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo. Selain itu juga, istilah "kedaulatan rakyat" juga memang tercantum pada akhir kalimat Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. "...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ...".

Keesokan harinya, Kamis Kliwon, 27 September 1945, empat puluh hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI dikumandangkan. Setelah para pejuang berhasil menguasai sepenuhnya tanah air dari kekuasaan Jepang, lahirlah Harian Kedaulatan Rakyat di tengah kancah revolusi kemerdekaan RI yang lahir di bekas kantor Sinar Matahari di Jalan Malioboro.

Terbitnya Kedaulatan Rakyat merupakan kejutan bagi penduduk kota Yogyakarta dan sekitarnya. Kedaulatan Rakyat dicetak dan diedarkan ke seluruh wilayah Yogyakarta dan pada awal terbitnya, menggunakan sisa kertas harian Sinar Matahari. Nomor perdana belum mencantumkan nama pengasuh, masih anonim. Pada hari pertama surat kabar ini terbit, Kedaulatan Rakyat berhasil dicetak sebanyak 2.000 eksemplar yang terdiri dari dua halaman. Konten edisi perdana tersebut memuat berita utama mengenai "Kekoeasaan Pemerintah Daerah Djogjakarta" dengan subjudul "Seloeroehnja di tangan bangsa Indonesia". Sedang penyerta berita kepalanya berjudul "Indonesia Merdeka adalah tjiptaan bangsa Indonesia sendiri".

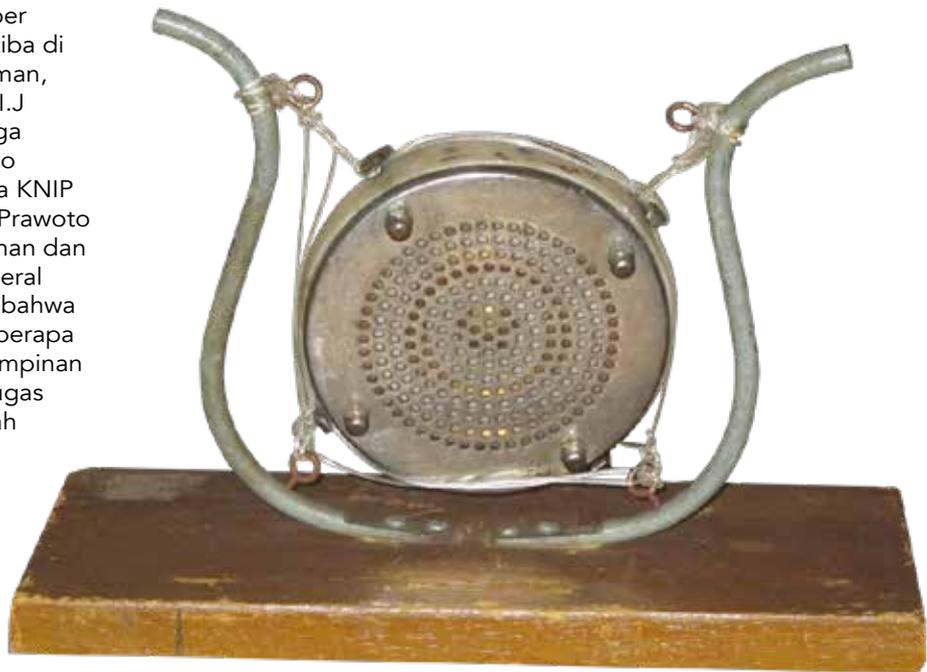
**“Indonesia Merdeka
adalah tjiptaan bangsa
Indonesia sendiri”.**

Pemancar Radio "Kyai Balong"

Pada tanggal 16 Desember 1948 beberapa Menteri tiba di Solo, antara lain Dr. Sukiman, Mr. Susanto Tirtoprodjo, I.J Kasimo, Soepeno dan juga Mayor Jenderal Soehardjo dengan anggota-anggota KNIP antara lain Zainul Arifin, Prawoto Mangkusasmito, Mr Kasman dan Soewilowati. Mayor Jenderal Soehardjo menerangkan bahwa keadaan genting dan beberapa Menteri serta anggota pimpinan KNIP diminta untuk bertugas di Kota Yogyakarta setelah sidang kabinet tanggal 16 Desember. Keesokan harinya tanggal 19 Desember 1948, masyarakat dikejutkan dengan ledakan-ledakan di sebelah barat Kota Solo. Beberapa pesawat terbang, tampak berputar-putar cukup rendah.

RRI mulai mengetahui bahwa suara ledakan-ledakan tersebut adalah serangan Belanda, setelah menerima informasi dari BBC London dan PCJ Hilversum yang menyiarkan perintah Kerajaan Belanda kepada tentara Belanda di Indonesia untuk melakukan "Aksi Polisionilnya" terhadap Republik Indonesia. RRI segera memindahkan pemancar-pemancar dari Solo ke Tawangmangu yang akan menjadi pusat siaran RRI dalam gerilya. Studio-studio RRI lainnya juga diinstruksikan untuk berjuang di pegunungan.

Pengangkutan pemancar dan alat-alat studio yang pertama sudah terlaksana dengan diangkut truk RRI ke Tawangmangu. Pemancar pertama merupakan pemancar RCA berkekuatan 250 watt yang segera dirakit kembali supaya tanggal 20 Desember sudah dapat mengudara. Pemancar kedua merupakan pemancar NSF,



diangkat dari Tawangmangu ke tempat lain yang tidak jauh dari lokasi pertama sebagai pemancar cadangan. Adapun, pemancar-pemancar kecil untuk siaran lokal, ditinggalkan di Solo. Pemancar ini baru akan dipindahkan ke luar kota apabila tentara Belanda mendekati Solo.

Dalam perjalanannya, pemancar NSF yang direncanakan dipasang di Tawangmangu, ternyata masih tertahan Karangpandan. Hal ini dikarenakan komandan pertahanan Tawangmangu melarang pemancar NSF ini dipasang di sana. Sehingga terpaksa para pejuang menyembunyikan pemancar NSF tersebut di Karangpandan. Pemancar tersebut akhirnya terlantar di halaman kantor kawedanan Karangpandan.

Oetojo, yang mengawal pemancar tersebut memang menunggu Maladi untuk minta instruksi kemana pemancar itu harus dibawa. Secara kebetulan ada seorang "kebayan" (pegawai desa) dari desa Punthukredjo bernama Soekarno yang kenal dengan Maladi menawarkan jasanya. Katanya, bila dianggap cocok, rumahnya bisa digunakan untuk menyimpan pemancar NSF.

Keesokan harinya tanggal 21 Desember, Maladi meninjau pemancar NSF di rumah Kebayan Soekarno di desa Punthukredjo. Kebayan diberitahu bahwa pemancar itu sangat penting bagi RRI dan perjuangan, dan dipesan jangan sampai diketahui Belanda. Mengingat bahwa letak rumah Soekarno dipinggir jalan menuju pabrik teh Kemuning yang bisa dilalui Jeep, ada kemungkinan besar patroli Belanda yang lewat akan memasuki rumah itu. Bagaimana menyelamatkan pemancar itu dari penggeledahan rumah-rumah oleh Belanda, diserahkan kepada Soekarno. Selain itu juga dipesan, supaya jangan menyerahkan pemancar itu kepada siapapun tanpa surat dari Maladi.

Belanda melakukan siaran radio di Semarang, menyatakan bahwa Kolonel Gatot Subroto, dan seluruh staf serta pembesar-pembesar militer dan sipil telah tertangkap. Stasiun RRI yang dikuasai dalam keadaan utuh dan lengkap, pemancar-pemancarnya, personilnya, termasuk Kepala RRI Maladi. Siaran radio Belanda itu jelas berisi kebohongan seluruhnya, tetapi cara itu digunakan Belanda untuk mempengaruhi rakyat dan TNI. Sehingga, seolah-olah TNI dan pemerintahan di Surakarta sudah tidak ada dan hancur dan tidak ada lagi siaran radio dari Republik Indonesia.

Setelah tentara Belanda memasuki Tawangmangu, Maladi dan para pejuang lainnya melakukan perlawanan secara gerilya dan berpindah-pindah tempat karena kekuatan yang tidak seimbang. Pelaksanaan Keputusan Gubernur Militer (GM) Kolonel Gatot Subroto di Babar-Tawangmangu itu dipertanggungjawabkan kepada Maladi sebagai perwira penerangan. Staf Maladi pada waktu itu hanya dua orang, Supahang dan Marwoto yang pada tanggal 28 Desember dikirim ke Solo untuk merintis dinas kurir Markas GM II/Solo sekaligus memanggil tenaga-tenaga teknik dan siaran. Sebagai kurir untuk daerah Tawangmangu, ditugaskan kepada Letnan Damanik, dengan bantuan tenaga-tenaga PMI dari Tawangmangu.

Letnan Damanik segera mengupayakan sebuah mesin dynamo wisselstroom dari pabrik gula Rejowinangun dekat Sragen. Tetapi persiapan yang matang harus diadakan untuk dapat mengeluarkan mesin yang beratnya kurang lebih 5 ton dari daerah patrol Belanda di Sragen. Perjalanan pengangkutan dengan 100-200 orang akan mudah dilihat dari udara. Pada malam hari pun pekerjaan tidak dapat dilakukan sebelum jam 20.00, karena sampai jam itu patroli Belanda masih berpatroli di jalan-jalan desa sekitarnya menuju Sragen. Menjelang jam 06.00 pagi dinamo harus disembunyikan agak jauh dari jalan yang terus menerus dilalui jeep-jeep Belanda. Pengangkutan dinamo dari Rejowinangun diatur perencanaannya oleh Mayor Suhardi dan Letnan Damanik dengan bantuan Camat Jenawi (Balong) yang akan mengatur pengerahan tenaga dari desa-desa dalam route perjalanan barang.

Pekerjaan pertama ialah mencari tenaga pabrik Rejowinangun bagian Teknik untuk melepaskan dinamo dari pondasi beton. Untung sekali mereka itu masih berada didesa-desa sekitar pabrik. Setelah dinamo lepas dari pondasinya masalah kedua adalah bagaimana memikul barang seberat 5 ton itu. Tiang-tiang telepon dari besi dipakai sebagai pikulan, dan sekitar 200 orang pemikul diperlukan untuk mengangkut mesin tersebut. Selain tenaga pemikul masih ada mandor-mandor yang mengawasi serentakny gerak dan memberi isyarat untuk jalan atau berhenti. Seorang kepala angkutan juga harus ada untuk mengurus makan, minum bagi rombongan dan pengoperan barang kepada rombongan berikutnya.

Demikianlah setelah perjalanan selama 7 malam spenjang jalan kurang lebih 15 km secara beranting dari desa ke desa dan dengan bantuan sukarela penduduk desa-desa, yang masing-masing menyediakan 200 orang tenaga muda dan berani dari Rejowinangun itu di lokasi Balong.

Mengingat pekerjaan tersebut di atas dalam situasi dan kondisi perang dapat digolongkan pekerjaan raksasa, kita patut mengucapkan selamat kepada rakyat desa. Mereka berani memikul resiko kemungkinan tertangkap patrol Belanda. Tanpa ampun mereka akan dibunuh, rumah mereka dibakar dan harta benda dirampas, karena membantu Republik. Mereka sendiri sebenarnya tidak mengetahui pentingnya barang yang dipikul. Mereka hanya tahu barang itu diperlukan oleh tentara kita, oleh Gubernur Militer Gatot Subroto, yang sedang berperang melawan penjajah Belanda.

Letnan Damanik yang sudah berpengalaman dengan pengangkatan barang-barang berat diminta untuk memindahkan pemancar di Puntukrejo. Sumarso dan Suparto yang merupakan staf Maladi ditugaskan untuk membantu dan membawa surat Maladi untuk kebyan Soekarno. Supahang ditugaskan berangkat ke Solo untuk menjemput tenaga-tenaga teknik. Dinamo dari Rejowinangun sedang dipersiapkan dan pemancar NSF dari Puntukrejo telah sampai dengan selamat di Balong. Hampir sebulan pemancar berada di Puntukrejo tanpa diketahui Belanda, sampai dapat diangkut ke Balong dengan selamat. Mulai tanggal 1 Februari 1949 suara RRI dari Balong sudah terdengar di Solo.

Demikian kisah ringkas perjuangan Pahlawan Informasi pada masa revolusi yang terefleksikan dalam koleksi Monumen Pers Nasional di Surakarta. Bagaimana upaya penyebaran informasi pada masa perang dengan mempertaruhkan jiwa dan raga, gotong royong untuk mempertahankan kemerdekaan.

Kini saatnya sebagai generasi penerus, sudah sepantasnya kita berusaha untuk menjadi Pahlawan Informasi masa kini dengan menyebarkan informasi positif, turut serta menghalau dan memerangi berita bohong atau Hoax dan memproduksi informasi yang bermanfaat bagi bangsa ini.





Cerita Sepuluh November; Tokoh Pejuang, Sastra, Penerbang, Hingga Bukit Lamu

Oleh:

Hamzah

Kepala Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Provinsi Gorontalo

10 November selalu istimewa. Tujuh puluh enam tahun silam di tanggal ini tercatat sebagai pertempuran terbesar dan sekaligus terberat dalam sejarah revolusi nasional, yang menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Ada banyak syuhada yang gugur, pun dari masyarakat sipil. Tiga minggu pertempuran pecah dengan dua puluh ribuan jiwa warga Surabaya pralaya, berpulang setelah bertaruh hidup mati membela tanah air tercintanya. Aksi herois, sikap tak kenal gentar arek-arek Suroboyo yang dengan berani mengabaikan ultimatum tentara Inggris untuk menyerah, semangat juang menyala-nyala, bertahan hingga titik darah penghabisan mempertahankan kemerdekaan yang belum lama diproklamirkan kemudian diabadikan sebagai hari pahlawan dengan Surabaya sebagai kotanya. Data mencatat bahwa 1.600-an tentara Inggris tewas dalam perang habis-habisan ini.

Mari sejenak kita *flashback*, siapa saja tokoh utama, pahlawan nasional di balik pertempuran hebat di Surabaya Sepuluh Nopember, sejarah menulis nama-nama K.H. Hasyim Asy'ari, Gubernur Suryo, Bung Tomo, dan Moestopo. Nama mereka harus dikenang sebagai peletak dasar nilai-nilai kepahlawanan mendalam, yang saat ini terus terjaga di hati masyarakat kota Pahlawan Surabaya dan juga di seluruh wilayah di tanah air.

Dari Surabaya kita ke Gorontalo. Mengenang hari pahlawan dengan mengulas tokoh-tokoh nasional asal Gorontalo yang punya peran besar dalam sejarah peradaban Republik. Dari tokoh pejuang kemerdekaan, tokoh sastra, scientist geologi, hingga penerbang.



Nani Wartabone

Tokoh yang namanya sangat dikenal di Gorontalo, pejuang kemerdekaan yang mengusir penjajah dengan gigih di Gorontalo pada tahun 1942. Ia mendirikan organisasi pemuda bernama Jong Gorontalo di Surabaya yang kemudian menjadi cikal bakal kekuatan yang dikonsolidasikannya bersama perkumpulan tani Hulanga menangkap pejabat-pejabat Belanda di Gorontalo pada saat itu.



HB Jassin dan J.S. Badudu

Sama-sama tokoh sastra, HB Jassin bahkan digelar Paus sastra Indonesia. Ia referensi utama pelajaran bahasa dan sastra, dari SD hingga ke perguruan tinggi. Demikian pun dengan J.S. Badudu, beliau juga tokoh sentral pembinaan bahasa. Bahasa dan sastra adalah peradaban, karena itu keduanya merupakan tokoh penting nasional yang memiliki tempat tersendiri dalam khazanah kesusastraan Indonesia.



Djalaluddin Tantu

Namanya diabadikan sebagai nama bandar udara di Gorontalo. Mayor penerbang BKR, pencetus lahirnya BKRO (Badan Keamanan Rakyat Oedara). Ia menjadi bagian dari pemuda-pemuda Gorontalo yang merebut lapangan terbang Gorontalo yang masih dikuasai tentara kekaisaran Jepang pasca proklamasi; juga andil dalam perebutan Irian Barat dari tangan Belanda.



John Ario Katili

Tokoh revolusioner dalam perkembangan ilmu geologi di tanah air. Doktor geologi pertama di Indonesia. Scientist terkemuka yang mendapatkan beragam penghargaan dari dalam dan luar negeri.

Pahlawan nasional dari pertempuran besar Sepuluh Nopember Surabaya hingga lima tokoh ternama dari Gorontalo namanya terekam kuat dan rapi dalam sejarah. Tentu seiring perjalanan waktu melaju, setiap zaman memiliki pahlawannya masing-masing, dari generasi ke generasi. Definisinya yang tetap sama, mereka yang tulus ikhlas berkorban demi kepentingan yang lebih besar, demi kebaikan dan kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya orang; demi negeri, demi nusa bangsa. Siapapun kita, kita bisa jadi pahlawan di era kita masing-masing. Berdedikasi penuhlah, terus total mengikhtiyari yang terbaik pada bidang tugas masing-masing, maka anda sesungguhnya sudah menjadi pahlawan.

Sang Penjaga Menara

Satu cerita menarik tentang aksi kepahlawanan dari seorang kakek bernama Yusuf Laima di puncak Bukit Lamu Boalemo Gorontalo. Sang Penjaga Menara. Ia penuh dedikasi selama lebih dari dua dekade menjaga menara telekomunikasi di ketinggian. Untuk mencapainya ia harus jalan kaki dari kediamannya di lereng bukit. Sekali sebulan ditempuhnya selama bertahun-tahun. Sekali tiba di atas yang sepi tanpa siapa-siapa, ia akan turun lagi sebulan ke depannya. Ia setia dengan tugasnya, menjaga menara, menjaga supaya orang-orang bisa saling terhubung, telepon dan internetan. Ketika ditanya apa motivasi terbesarnya, "Karena katanya tugas saya menjadikan orang-orang bisa saling terhubung meskipun jauh, saya senang jika saya yang sudah tua ini masih bisa bermanfaat bagi orang banyak".

Pak Yusuf ini memang menjadi sangat terkenal di seluruh Indonesia Oktober-November lalu. Kiprahnya diangkat ke dalam video dokumenter yang kemudian menjuarai Innovation of Frequency and Standardization Festival IfaST-Fest SDPPI, tentang julukannya Pahlawan Konektivitas Bukit Lamu oleh kami #TeamLG Loka Gorontalo, sahabat frekuensi seluruh Indonesia rasanya tak berlebihan. Ia tulus dan penuh dedikasi menjalani pekerjaannya di usianya yang sudah senja, *so then I am sure he's deserved it.*





Darah Pahlawan Mengalir Tanpa Akhir

Oleh: Ricky Setianwar
Mahasiswa Jurusan Penyiaran, Program Studi Manajemen Produksi
Berita STMM Yogyakarta

Dengan mengorbankan tetes demi tetes darah yang mengalir di sekujur, mereka yang kita sebut pejuang atau pahlawan, mengerahkan seluruh jiwa dan raga, saling bahu-membahu demi mengukir cita-cita bangsa atas nama merdeka. Setelah sekian purnama terlewati, para pahlawan yang menggenggam keberanian, berhasil memukul mundur para penjajah dari bumi Nusantara. Sampai pada akhirnya, proklamasi menggema di ibu kota melalui tutur penuh hayat Bung Karno mewakili rakyat Indonesia; menjadi manifestasi sebuah negara yang merdeka. Kendati demikian, nyatanya gelar pahlawan tidak berhenti pada masa itu saja. Pengertian pahlawan masa kini diartikan secara luas.

Di era sekarang, tidak lagi harus menenteng sebilah bambu runcing hingga mengokang senjata api untuk dapat dikatakan sebagai seorang pahlawan. Tentu, tidak juga harus menjelma sebagai Gundala ataupun Sri Asih yang menumpas kejahatan dengan kekuatan supernya. Pahlawan, ialah mereka yang dengan segala keterbatasannya mengorbankan kenyamanan demi kebaikan orang lain maupun lingkungan dengan caranya masing-masing. Seorang ibu merupakan pahlawan untuk anak-anaknya, dari dalam kandungan, kelahiran, hingga mengasuh penuh peluh, namun tak kenal keluh. Begitu juga seorang ayah, yang memastikan setiap perut anggota keluarga terisi dengan rutin membanting tulang hari lepas hari.

Apresiasi setinggi-tingginya kepada para tenaga kesehatan, terlebih di masa pandemi saat ini, mereka bertaruh nyawa demi bisa menyembuhkan para pasien yang jumlahnya jauh dari kata sedikit. Setiap hari pasien bertambah, membuat mereka benar-benar mengorbankan kenyamanannya. Tak sedikit juga karenanya,

sebagian dari mereka harus gugur sebab berjuang menyelamatkan orang lain. Dengan segala perjuangan yang dilakukan oleh mereka, penyematan gelar pahlawan adalah hal yang sangat amat layak. Guru, tak perlu didebatkan, jasanya dalam mencerdaskan generasi penerus dengan tulus dan penuh dedikasi mustahil tidak masuk di dalam daftar. Serta instrumen pemerintah yang lain, yang selalu berusaha menjaga negeri tercinta tetap aman dan nyaman untuk ditempati.

Tidak lupa juga kepada orang-orang yang mungkin tanpa kita sadari memiliki peranan penting di dalam roda kehidupan kita sehari-hari. Para pengangkut sampah pun tak luput dengan gelar itu, bagaimana mereka secara langsung memilah sampah-sampah yang kita buang tersebut, lantas mengolahnya demi lingkungan yang lebih baik. Juga, juru parkir yang sudah kebal terhadap sengat matahari itu, yang kerap memastikan kendaraan kita rapih pada tempatnya, sehingga tak menyanggol kiri dan kanan mengantisipasi lecet. Tentu, apa yang mereka lakukan juga bertujuan untuk mencari pundi demi sesuap nasi, namun tak bisa dielak juga dampak pekerjaan yang telah mereka lakukan. Dan, jiwa-jiwa lain yang senantiasa mengerahkan kebaikannya untuk kepentingan bersama; terlampau banyak untuk disebutkan satu demi-satu.

Perjuangan pahlawan di masa lampau akan nihil arti bila kita tidak mengaplikasikan rasa hormat kita kepada mereka, para pendahulu. Dengan batas-batas yang kita miliki, perbuatan baik nan tulus sekecil apa pun akan menjadi beragam makna bagi siapa pun yang menerimanya. Fana hanyalah milik waktu semata, menjadi pahlawan adalah hal yang baka. Sebab, darah pahlawan terus mengalir tanpa akhir.

Dengan batas-batas yang kita miliki, perbuatan baik nan tulus sekecil apa pun akan menjadi beragam makna bagi siapa pun yang menerimanya.

Tebak Trivia Pahlawan Nasional Indonesia

Seberapa kenal kamu dengan Pahlawan Indonesia?
Tebak trivia ini yuk! Cocokkan fakta-fakta dengan nama para tokoh
pahlawan Nasional yang ada di bawah ini~



1. Hari lahirnya ditetapkan sebagai Hari Besar Nasional ...
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Jenderal RI pertama ...
3. Bapak Pendidikan Indonesia ...
4. Dijuluki Ayam Jantan dari Timur ...
5. Nama kecilnya Raden Mas Soewardi Soerjaningrat ...
6. Memimpin rakyat Maluku dalam melawan tentara VOC Belanda ...
7. Membakar semangat pejuang arek-arek Suroboyo lewat mikrofon Radio ...
8. Pemberontakan milik Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia ...
9. Pahlawan Nasional dari Aceh ...
10. Sultan Kerajaan Gowa ...
11. Pernah menjadi guru di sekolah Muhammadiyah di Cilacap ...
12. Pendiri Taman Siswa ...
13. Pahlawan Nasional asal Surabaya ...
14. Panglima termuda dalam sejarah ...
15. Berhasil menyatukan kerajaan Nusantara (Ternate dan Tidore) menghadapi penjajah ...
16. Pertempuran yang ia pimpin dipicu insiden pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato ...
17. Pejuang kesetaraan hak kaum perempuan, lahir dari keluarga bangsawan ...
18. Ikut bertempur melawan Belanda dalam Perang Aceh ...
19. Nama aslinya Thomas Matulessy ...
20. Pemimpin Perang Jawa di tahun 1825 - 1830, salah satu perang terbesar dalam sejarah perjuangan melawan Belanda ...

Vaksinasi COVID-19 Lampaui 200 Juta Suntikan

Hingga pertengahan November 2021, data vaksinasi COVID-19 di Indonesia sudah mencapai lebih dari 200 juta suntikan. Jumlah ini terdiri dari 130,6 juta suntikan dosis pertama, 84,5 suntikan dosis kedua, serta 1,1 juta suntikan dosis ketiga. Dengan demikian jumlah suntikan vaksinasi telah mencapai 216,2 juta suntikan. Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan target sasaran vaksinasi nasional yaitu 208.265.720 orang. Dengan demikian, target vaksinasi pemerintah baru menyentuh 62,7 persen dari sasaran vaksinasi yang menerima suntikan dosis pertama. Sedangkan suntikan kedua baru mencapai 40,59 persen.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus berupaya meningkatkan percepatan vaksinasi dengan membuka vaksinasi massal atau sentra vaksinasi di banyak tempat. Selain itu Kemenkes juga telah menginstruksikan seluruh pos pelayanan vaksinasi, Unit Pelaksana Teknis di bawah Kemenkes, seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS Vertikal, Poltekkes, di seluruh Indonesia untuk melakukan vaksinasi kepada semua target sasaran tanpa memandang domisili atau tempat tinggal pada KTP.

"Kami terus mengupayakan ketersediaan vaksin baik lewat skema multilateral maupun bilateral

demikian mencukupi stok yang ada saat ini dan menjaga laju vaksinasi sesuai dengan stok vaksin yang ada," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kemenkes, Widyawati.

Widyawati juga menambahkan bahwa pemerintah terus mengupayakan ketersediaan vaksin dan mempercepat program vaksinasi sehingga semakin banyak masyarakat terlindungi. Capaian ratusan juta vaksinasi ini juga merupakan bentuk usaha optimal dan gotong royong sejumlah pihak mulai dari TNI/Polri, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta yang turut membantu.



ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/hp

WAKSINASI

Target Vaksin WHO

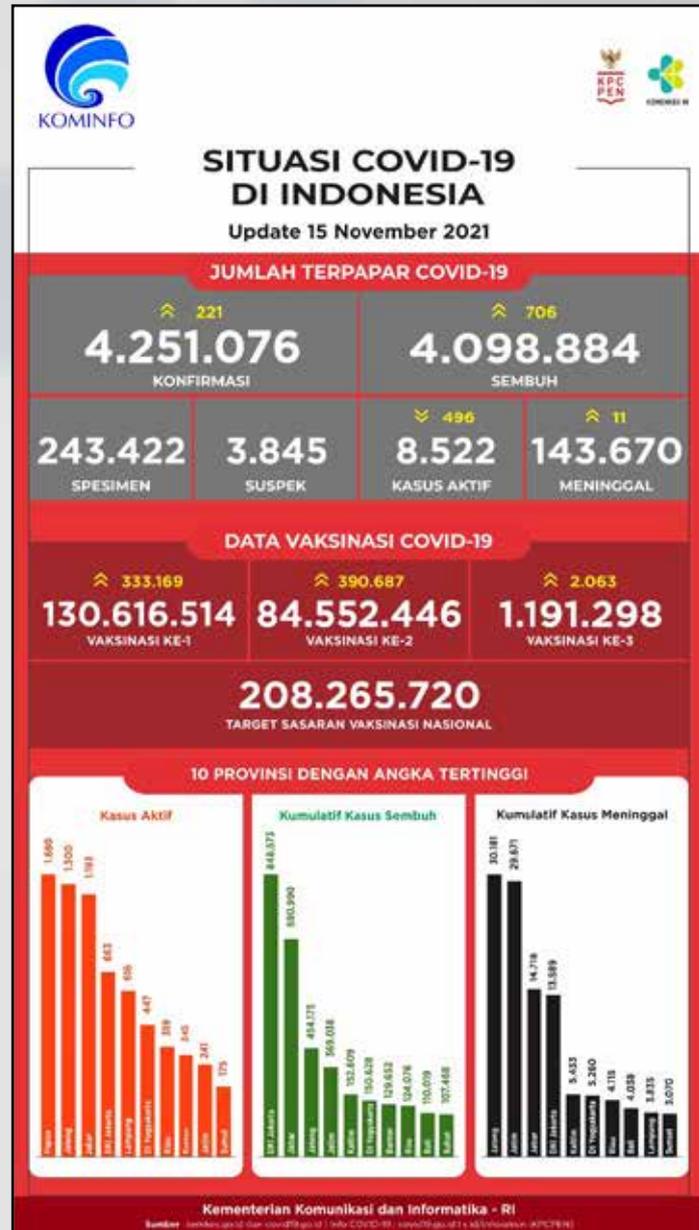
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sendiri telah menargetkan capaian vaksinasi hingga 40 persen untuk dosis kedua hingga akhir tahun 2021. Indonesia sendiri sudah mencapai target yang sudah ditetapkan WHO.

“Tekad WHO adalah memvaksinasi sekurang-kurangnya 40 persen warga di setiap negara di dunia di akhir tahun ini, dan 70 persen di tahun depan,” ujar Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Reisa Broto Asmoro.

Reisa menyebutkan bahwa capaian yang diraih Indonesia ini merupakan hal baik dan menjadi bentuk kontribusi Indonesia dalam pengendalian COVID-19 di dunia. Capaian ini juga membawa Indonesia ke dalam lima negara dengan suntikan tertinggi bersama Tiongkok, India, Amerika Serikat dan Brazil.

“Kita semua punya peran yang kita sumbangkan tanpa terkecuali, terima kasih untuk semua rakyat Indonesia yang luar biasa,” ujar Reisa.

Pemerintah saat ini terus memfokuskan upaya target vaksinasi sebesar 70% dari populasi penduduk menerima vaksin dosis pertama. Target ini diharapkan tercapai pada akhir Desember 2021.



Dorong Kuasai Pasar, Menteri Johnny Tegaskan Dukungan untuk Industri Gim



Pertumbuhan industri gim di Indonesia bergerak sangat dinamis. Bahkan sejak pandemi Covid-19 melanda dunia menjadi momentum perkembangan industri gim di dalam negeri dan luar negeri.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan dukungan Pemerintah untuk ekosistem industri gim Tanah Air. Melalui penyelenggaraan Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) 2021, Kementerian Kominfo berupaya mendorong industri gim nasional menguasai pasar dalam negeri dan luar negeri.

"Kita ingin melihat para pelaku industri gim dalam negeri dapat menguasai pangsa pasar yang lebih besar di negeri sendiri, dapat menciptakan produk-produk gim yang bisa bersaing dengan *game developer* global, dan membuka mata dunia bahwa Indonesia bukan sekadar pasar tapi juga pemain penting dalam tatanan industri gim dalam negeri maupun luar negeri," ujarnya melalui rekaman video dalam IGDX 2021 Conference, yang berlangsung hibrida dari Kuta, Bali, Sabtu (20/11/2021).

Menteri Johnny menegaskan Kementerian Kominfo berupaya memanfaatkan momentum perkembangan industri gim dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas ekosistem gim nasional.

"Sekali lagi, menyatakan ingin berada sebagai inisiator dalam menangkap momentum tersebut sehingga bisa menghasilkan kebijakan dan program yang mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas pelaku industri kreatif di Indonesia, secara khusus pelaku industri gim atau permainan di Indonesia," tandasnya.

Dalam IGDX 2021 berlangsung empat kegiatan utama yaitu IGDX Academy, IGDX Business, IGDX Career, dan IGDX Conference. Setiap kegiatan melibatkan banyak pihak dari pelaku industri gim baik dalam negeri maupun luar negeri.

"Saya berharap, ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para *game developer* lokal kita untuk mencari informasi, ilmu dan pengetahuan, jejaring baru," ujar Menkominfo.

Bahkan Menteri Johnny mendorong pelaku industri gim Indonesia mampu meningkatkan kapasitas perusahaan dan mendapatkan pendanaan.

"Saya berharap teman-teman mampu mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan untuk membuat produk permainan atau gim yang lebih berkualitas juga meningkatkan kapasitas perusahaan yang teman-teman miliki," ungkapnya.

Menurut Menkominfo pelibatan Asosiasi Game Indonesia (AGI) dalam IDGX merupakan upaya kolaborasi agar menjadikan kegiatan berlangsung menarik.

"Untuk mengadakan kembali Indonesia *Game Developer Exchange* dengan isi program yang lebih variatif, inovatif dan kreatif – sehingga bisa menjadi sarana pengembangan para *game developer* dalam negeri baik dari segi kualitas produk maupun kapasitas dari entitas unit usaha," tuturnya.

Lebih dari itu, Menteri Johnny mengharapkan penyelenggaraan IGDX 2021 dapat menjadi penghubung bagi talenta Indonesia di bidang gim agar dapat menemukan tempat untuk mengembangkan diri dan membangun ekosistem gim dalam negeri.

"Dimana mereka bisa bekerja, berkarir, dan terus juga berkembang menjadi salah satu fondasi kuat ekosistem industri gim negeri kita Indonesia," harapnya.

Menkominfo mengharapkan penyelenggaraan IGDX 2021 terus menjadi sarana yang mampu menampung aspirasi pelaku industri gim Tanah Air.

"Saya akan terus mendorong dan mengawasi agar program ini dapat terlaksana dengan sebagaimana seharusnya dan terselenggara sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan," tegasnya.

Tingkatkan Daya Saing

Menkominfo mengapresiasi IGDX Conference 2021 yang berlangsung secara hibrida. Menurutnya, sejak pertama kali diselenggarakan tahun 2019, IDGX bisa menjadi wadah bertemunya pelaku industri gim global dengan industri gim lokal.

"Selain juga menjadi sarana peningkatan kualitas SDM industri game tanah air dan *showcase* bagi karya industri game dalam negeri. Dari laporan yang kami terima, bahwa dari peserta yang hadir saat penyelenggaraan IGDX di tahun 2019, sebanyak 66,1% diantaranya merupakan kalangan profesional. Peserta terbanyak kedua dari kalangan pelajar dan mahasiswa sebanyak 16,1%," ungkapnya.

Menteri Johnny menilai pencapaian itu menunjukkan target peserta sudah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu memfasilitasi pengembang gim profesional dan pelajar agar dapat meningkatkan kemampuan serta memperluas jejaring. "Ini mencerminkan tidak saja antusiasme peserta tapi sekaligus sukses dengan penyelenggaraan IGDX," tandasnya.

Menurut Menkominfo saat ini Indonesia merupakan pasar industri gim atau permainan elektronik terbesar di Asia Tenggara dan menduduki peringkat ke -17 dunia. "Tercatat pula terdapat 52 juta penduduk Indonesia yang merupakan gamer. Namun faktanya pada tahun 2020, baru 0,4% industri lokal yang berkecimpung di pasar gim Indonesia," jelasnya.

Melalui kegiatan IGDX 2021 yang mencakup IGDX Academy, IGDX Business, IGDX Career, dan IGDX Conference, Menteri Johnny mengharapkan bisa membangkitkan optimisme pengembang gim dan perusahaan gim dalam negeri agar bisa lebih berkembang.

"Saya berharap pengembang gim dan perusahaan pengembang gim yang dimiliki anak bangsa dapat berkembang dan bersaing dengan pelaku industri gim secara global," ungkapnya.

Dalam acara itu, Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud Ristek; Deputy EVP Business Builder IGSI, Komang Budi Aryasa; Cultural Counselor, Embassy of France in Indonesia and Director Of Institute Francis Indonesia, Stéphane Dovert; dan Head of Supervisory Board MIKTI, Hari Sungkari. Hadir pula Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia, Cipto Adiguno dan Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo I Nyoman Adhiarna.

Dalam IDGX virtual tahun ini sebanyak 40 peserta pameran menyajikan produk gim lokal. Sepuluh peserta diantaranya merupakan partner dari universitas dan perusahaan gim luar negeri. Pada hari pertama yang dibuka hari ini, tercatat sebanyak 1.124 peserta hadir dalam platform virtual IGDX www.igdx.id/virtual

Pemerintah Siapkan 6,7 Juta STB untuk Warga Miskin



Menkominfo Johnny G. Plate dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/11/2021). - (Berto)

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pemerintah menyiapkan sebanyak 6,7 juta *Set Top Box* (STB) bagi warga miskin. Menteri Johnny juga menyatakan bersama lembaga penyiaran, Kementerian Kominfo juga telah menyiapkan mekanisme pembagian STB agar *Analog Switch Off* (ASO) berlangsung sesuai jadwal.

“Set top box ini kita perkirakan untuk keluarga miskin sekitar 6,7 juta STB bagi 6,7 televisi yang dimiliki oleh rakyat miskin. Untuk STB ini yang sedang kita siapkan agar 6,7 juta itu tersedia pada waktunya sesuai dengan tahapan ASO paling lambat tanggal 2 November 2022,” ujarnya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/11/2021).

Menkominfo menegaskan ketersediaan STB merupakan aspek penting untuk mendukung implementasi ASO. Menurutnya, STB dibutuhkan bagi perangkat televisi yang belum memenuhi standar *Digital Video Broadcasting–Second Generation Terrestrial* (DVB T2) atau TV digital.

“Bagi yang belum DVB T2 itu harus disediakan perangkat connector atau yang disebut dengan *set top box* atau STB,” tandasnya.

Menteri Johnny menjelaskan, berdasarkan kriteria serta mekanisme pelaksanaan pembagian STB gratis tengah disiapkan. Hasil penghitungan sementara

dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial.

“Terdapat sebanyak 6,7 juta rumah tangga miskin yang berdomisili di daerah yang akan dilaksanakan migrasi siaran analog ke siaran TV digital,” paparnya.

Menurut Menkominfo, sebanyak 6,7 juta perangkat STB akan dibagikan langsung kepada warga yang memenuhi syarat. Selanjutnya, STB dipasang ke televisi analog yang belum memiliki standar DVB T2 agar bisa menerima siaran televisi digital.

“Jadi lebih dari sekadar bagi-bagi (STB gratis), karena harus dipasang dan di-install di perangkat televisi masing-masing. Seperti misalnya di rumah kalau pakai Indihome atau pakai layanan internet itu kan ada perangkat *connector*-nya, sama kira-kira seperti itu ada perangkat *connector*-nya yang memungkinkan menerima siaran digital,” jelasnya.

Sertifikasi

Kementerian Kominfo telah melakukan sertifikasi perangkat STB dan TV digital yang diperdagangkan di Indonesia. Menurut Menteri Johnny hal itu sesuai dengan amanat UU Telekomunikasi.



*Foto hanya ilustrasi STB

“Tentu ini dalam koordinasi dengan Kementerian Perindustrian. Sertifikasi ini dilakukan agar STB yang dibeli dapat berfungsi dengan baik sesuai spesifikasi siaran digital dari lembaga penyiaran aman digunakan serta mendapat layanan purnajual dari produsen STB,” jelasnya.

Menkominfo menjelaskan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran juga mengatur tentang STB.

Dalam ayat 1 Pemerintah membantu penyediaan alat bantu penerimaan siaran atau STB kepada rumah tangga miskin agar dapat menerima siaran televisi secara digital secara terestrial.

Ayat 2 menjelaskan penyediaan alat bantu penerima siaran atau STB kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud di ayat 1 berasal dari komitmen penyelenggara multipleksing, yakni Lembaga Penyiaran Publik (LPP), LPP Lokal, Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK).

Selanjutnya Ayat 3, dalam hal penyediaan alat bantu penerima siaran atau STB sebagaimana dimaksud di ayat 2 tidak mencukupi, jadi apabila penyelenggara multipleksing belum mencukupinya, dapat berasal dari APBN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Untuk itu kami bersama-sama

dengan Komisi I serta Badan Anggaran telah menyetujui untuk tahun 2021 dialokasikan sebagian dari kebutuhan STB. Kalau saya tidak salah ingat yang sudah di komitmen bersama-sama kita sebanyak 1 juta dari permintaan atau dari usulan Kominfo sebanyak 3 juta, sehingga masih kita cari jalan keluar yang tersisa 2 jutanya,” paparnya.

Menteri Johnny menegaskan penetapan kedua sumber lain yang sah akan mengikuti ketentuan perundang-undangan. “Jadi mekanisme pengadaannya sudah sangat jelas diatur di dalam peraturan pemerintah tersebut,” tegasnya.

Menurut Menkominfo, pihaknya sedang menyiapkan agar dapat disalurkan kepada rumah tangga miskin yang benar-benar membutuhkannya sebelum dilakukan tahapan ASO. “Kriteria serta mekanisme pelaksanaan pembagian STB gratis tersebut tengah kami siapkan,” tegasnya.

Dalam Raker dan RDP bersama Komisi I DPR RI itu, Menteri Johnny didampingi Sekretaris Jenderal, Mira Tayyiba; dan Dewan Pengawas LPP TVRI dan Dirut LPP TVRI Iman Brotoseno. Hadir pula Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Ismail; Staf Khusus Menkominfo, Rosarita Niken Widiastuti; Philip Gobang; Ahmad Ramli; serta Dedy Permadi.

Setujui Penggabungan Dua Penyelenggara Telekomunikasi, Dirjen SDPPI: Perhatikan Prinsip Perlindungan Konsumen dan Iklim Persaingan Usaha



Terhitung sejak tanggal 20 September 2021, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate telah menerima surat permohonan penggabungan PT Hutchison 3 Indonesia (H3I) dan PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo).

Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ismail menyatakan, penggabungan dua penyelenggara telekomunikasi tersebut yang kini berganti nama menjadi PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison) atau yang disingkat IOH, perlu memperhatikan prinsip bisnis.

“PT Indosat dan PT Hutchison 3 Indonesia tetap memperhatikan prinsip perlindungan konsumen, menjaga iklim persaingan usaha yang sehat, dan tidak melakukan praktik usaha yang diskriminatif,” ujarnya dalam Konferensi Pers Persetujuan Prinsip Permohonan Penggabungan Penyelenggaraan Telekomunikasi PT. Indosat Tbk dan PT. Hutchison 3 Indonesia, secara Virtual dari Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (08/11/2021).

Menurut Dirjen SDPPI, Menkominfo Johnny G. Plate kemudian memerintahkan proses evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh tim Kementerian Kominfo, setelah menerima permohonan penggabungan penyelenggaraan telekomunikasi.

“Berdasarkan hasil evaluasi, tim merekomendasikan kepada Menteri Kominfo untuk dapat menyetujui permohonan dan memberikan persetujuan prinsip penggabungan penyelenggaraan telekomunikasi,” jelasnya.

Syarat dan Ketentuan

Berdasarkan persetujuan prinsip Menteri Kominfo, Dirjen Ismail menegaskan bahwa PT. Indosat Ooredoo Hutchison Tbk selanjutnya perlu melakukan beberapa syarat dan ketentuan.

“Syarat yang pertama IOH wajib melakukan penambahan site baru hingga tahun 2025, dengan jumlah paling sedikit sesuai dengan yang disampaikan dalam proposalnya,” ujarnya.

Menurut Dirjen SDPPI Kominfo, IOH juga wajib memperluas cakupan wilayah yang terlayani oleh layanan seluler hingga tahun 2025, dengan jumlah desa/kelurahan baru yang saat ini belum terlayani.

“IOH juga wajib meningkatkan kualitas layanannya sampai dengan tahun 2025 dengan batas minimal throughput sesuai dengan proposal yang disampaikan,” jelasnya.

Adapun syarat dari ketentuan lainnya, prinsip penggabungan PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia sebagai perusahaan gabungan wajib mengembalikan pita frekuensi radio kepada negara sebesar 5 MHz FDD atau 2x5 MHz di pita frekuensi radio 2,1 GHz.

“Untuk proses pengembalian 5 MHz FDD ini dilakukan paling lambat selama satu tahun, dan diberikan kesempatan untuk dimanfaatkan selama satu tahun pada masa transisi ini di pita frekuensi 2,1 Ghz. Terhitung sejak tanggal izin pita frekuensi hasil penggabungan tersebut ditandatangani,” tandasnya.

Menurut Dirjen Ismail, PT. Indosat Ooredoo Hutchison Tbk wajib menyesuaikan perizinan berusaha sebagai hasil aksi korporasi penggabungan atau peleburan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Persetujuan izin frekuensi radio hasil penggabungan juga akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kominfo untuk perizinan penyelenggaraan dan perizinan

frekuensi atau izin pita frekuensi, setelah surat jawaban diterima oleh Menteri Kominfo dari pemohon,” paparnya.

Dirjen SDPPI Kominfo menegaskan bahwa persetujuan prinsip dari Menteri Kominfo tidak mengurangi segala kewajiban, baik dari PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia kepada negara, pemerintah, maupun pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan hak-hak karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, serta semaksimal mungkin untuk melindungi dan menjaga sumber daya manusia bangsa Indonesia di masing-masing perusahaan,” imbuhnya.

Dalam Konferensi Pers tersebut, turut hadir Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Doddy Setiadi, Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Gunawan Hutagalaung, Direktur Penataan Sumber Daya Denny Setiawan, dan Direktur Telekomunikasi Aju Widya Sari.

Kembangkan Inovasi Satelit Anak Negeri, Menkominfo Dukung Perizinan dan Koordinasi Internasional



Pemerintah memberikan dukungan penuh dalam pengembangan teknologi satelit nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan dukungan terhadap riset dan pengembangan satelit itu berupa bantuan perizinan filling orbit satelit dan koordinasi International Telecommunication Union (ITU).

“Kita harus mendukung secara penuh riset dan inovasi keantariksaan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Sebagai pengguna teknologi satelit dalam upaya transformasi digital tentu kami mendukung penuh riset teknologi satelit nano (*cube satellite*) Indonesia, yang dilakukan oleh generasi bangsa kita,” ujarnya dalam Konferensi Pers Virtual Rencana Peluncuran Satelit Nano Indonesia dari Media Center Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (25/10/2021).

Menurut Menteri Johnny, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau dan topografi alam yang beragam, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam penyediaan konektivitas digital. Bahkan, dengan jumlah penduduk yang mencapai 270 juta jiwa ada tantangan tersendiri dalam

mengentaskan kesenjangan akses internet masyarakat yang terpisah bentangan laut, selat, lembah, ngarai, sungai dan pegunungan.

“Keberadaan satelit yang andal menjadi salah satu prasyarat untuk memperbesar internet-link ratio dan konektivitas ke seluruh wilayah di nusantara. Termasuk di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T) demi mengentaskan disparitas digital atau *to bridge the digital divide*,” tandasnya.

Menkominfo menyatakan kondisi geografis Indonesia yang unik tentu membutuhkan inovasi teknologi satelit. Menurutnya hingga tahun 2030, Indonesia diproyeksikan membutuhkan kapasitas satelit sekitar 1 TBps (Terabyte per second). Oleh karena itu, pengembangan inovasi satelit bisa menjadi solusi.

“Dengan kebutuhan yang sangat besar tersebut, diperlukan orkestrasi kebijakan yang konsisten, sehingga Indonesia tidak tertinggal dalam hal riset dan pengembangan satelit, secara khusus satelit nano dibanding dengan negara-negara atau bangsa lain,” ujarnya

Kolaborasi

Teknologi satelit nano memiliki peranan yang tak kalah penting dengan satelit besar satelit besar lain, bahkan lebih efisien. “Teknologi satelit nano memiliki peranan yang tak kalah penting dengan satelit besar lainnya, namun sepengetahuan saya akan lebih efisien karena komponen satelit yang dibuat lebih kecil dan lebih ringan,” ujar Menteri Johnny.

Oleh karena itu, Menkominfo mendukung inisiasi pengembangan teknologi satelit nano oleh sekelompok mahasiswa Surya University sejak 6 tahun yang lalu. Karya inovatif tersebut, menurutnya dapat memicu semangat generasi muda untuk berkarya dan berinovasi mendukung kebutuhan satelit nasional Indonesia.

“Secara khusus, saya mengapresiasi peneliti atau researcher satelit nano Indonesia antara lain Afiq Herdika Sulistya, Correy Ananta Adhilaksa, Hery Steven Mindarno, dan Muhammad Zulfa Dhiya'ulhaq. Kemudian, Roberto Gunawan, Setra Yoman Prahayng, Suhandinata, Sunartoto Gunadi selaku pembimbing serta Riza Muhida selaku mantan pembimbing,” tuturnya.

Menteri Johnny mendukung pendampingan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) dan sektor swasta dalam pengembangan satelit nano.

“Kominfo mendukung upaya kerja sama antara BRIN melalui Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa untuk memberikan pendampingan serta resources swasta yang dalam hal ini didukung penuh oleh Pasifik Satelit Nusantara (PSN) menyumbangkan komponen satelit dan ORARI dalam membantu riset ground segmen serta akademisi untuk mendorong penguatan riset dalam penguasaan teknologi satelit oleh putra-putri Indonesia,” paparnya.

Menkominfo berharap kolaborasi lintas sektor itu dapat menjadi awal yang baik bagi pengembangan teknologi satelit dan roket buatan anak bangsa di Indonesia. “Kehadiran satelit nano buatan anak bangsa yang dipelopori oleh putra putri Indonesia yang senantiasa produktif, kreatif dan terus berkarya, merupakan kekuatan kita untuk mewujudkan Indonesia yang semakin digital, semakin maju,” tandasnya.

Bahkan, Menteri Johnny berharap riset untuk penjelajahan ruang angkasa bisa dilanjutkan untuk membangun lebih banyak minat generasi muda Indonesia.

“Kita membutuhkan banyak inovasi dan kreasi baru. Indonesia membutuhkan banyak inventor dan kerjasama kolaborasi pemerintah, kementerian dan pemerintah daerah bersama seluruh sektor privat bisnis dan industri untuk memperkuat kemampuan dalam menghadirkan teknologi-teknologi baru,” ungkapnya.

Dalam konferensi pers virtual itu, Menteri Johnny didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ismail; Plt. Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN Erna Sri Adiningsih; dan Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara Adi Rahman Adiwoso.

#BAHASAINDONESIAMENDUNIA

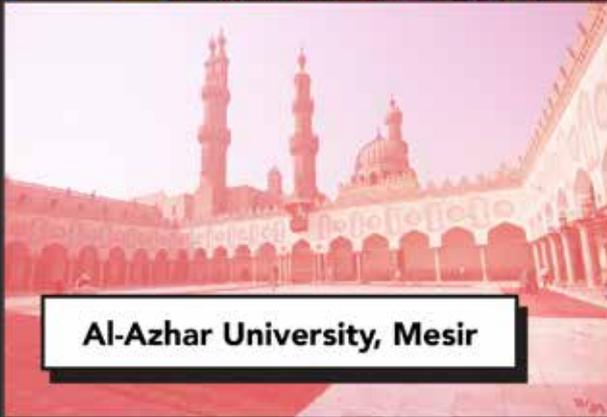
Kelas Bahasa di 5 Universitas Top Dunia



Council on Shoutheast Asia Studies,
Yale University, Amerika Serikat



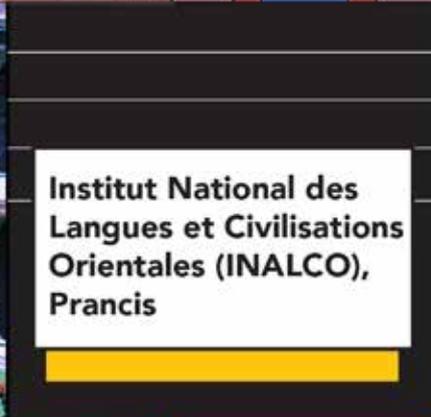
Al-Azhar University, Mesir



Università degli
Studi di Napoli
"L'Orientale",
Italia



Institut National des
Langues et Civilisations
Orientales (INALCO),
Prancis



Department of Social and
Cultural Anthropology,
University of Vienna,
Austria



Penulisan Nama, Gelar, dan Jabatan

Oleh:

Filmon Leonard Warouw

Penerjemah Madya

Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan

Dalam menulis naskah pemerintahan, kita dihadapkan pada penulisan nama, gelar, dan jabatan resmi. Kadangkala, kita juga menjumpai naskah yang berisi nama gelar dan jabatan yang penulisannya membingungkan. Di naskah itu, pembaca tidak bisa membedakan nama, singkatan nama dan gelar, serta jabatan.

Sebenarnya, penulisan nama dan gelar sudah diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Kita bahas sekilas petunjuknya agar tidak mengalami kesulitan penulisan dan memudahkan pembaca teks kita.

Penulisan Menurut PUEBI

Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat.

Misalnya:

Wakil Presiden Adam Malik

Laksamana Muda Udara Husein Sastranegara

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Gubernur Papua Barat

Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga.

Misalnya:

Dr. Bambang Irawan, S.Pd., M.Ed.

Siti Aminah, S.H., M.H.

Catatan: bedakan dengan Siti Aminah M.H. (Siti Aminah Mas Huda)

Penulisan Dalam Kalimat

Seringkali kita menemukan penggabungan penulisan jabatan, nama, dan gelar yang menyatu. Oleh karena itu, kita perlu menyisipkan juga tanda koma di antara jabatan dan nama atau gelar.

Misalnya:

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Dokter Tri Kuncoro, M.M.R., mengatakan rumah sakit ini merupakan rumah sakit Kelas B Pendidikan milik Pemprov Jateng.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, mengajak pemuda Indonesia untuk terus mencintai dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai identitas kebangsaan.

Untuk informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi staf Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Yosep Krisna Dipurwa Putra, S.I.P, di nomor telepon (021) 3846613.

Sebagai kesimpulan, sebuah jabatan yang ditulis habis perlu dipisahkan tanda koma dengan nama dan gelar yang mengikutinya. Selanjutnya, penulisan gelar juga harus memperhatikan kaidah penulisan singkatan gelar di Indonesia. Gelar luar negeri tidak perlu diterjemahkan namun ditulis menurut kaidah Indonesia.

LINTAS KOMINFO



Sukseskan Presidensi G20, Menteri Johnny: Kominfo Siapkan Komunikasi Publik dan Fasilitasi Konektivitas

Jakarta Pusat, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan telah menyiapkan dukungan komunikasi publik dan fasilitasi konektivitas untuk menyukseskan Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

“Dalam rangka komunikasi *Recover Together Recover Stronger* itu pesan kunci yang dipesan oleh Bapak Presiden, makna dan keuntungan Presidensi G20 bagi Indonesia. Ini pesan kunci yang pertama dan ulang-ulang disampaikan presiden,” jelasnya dalam Rapat Koordinasi Media dan Komunikasi G20 di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (15/11/2021).

Tingkatkan Akses Pendanaan Startup Digital Lewat HUB.ID

Jakarta Selatan, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya membantu pelaku startup lokal Indonesia meningkatkan akses pendanaan serta kerja sama bisnis. Melalui Program HUB.ID, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo memfasilitasi *Business Matchmaking* dengan memanfaatkan jaringan luas BUMN, korporasi, dan sektor pemerintah.

“Setelah program berakhir, startup masih dapat menikmati manfaat program dengan peluang potensial untuk terlibat dalam Program Digitalisasi Kominfo,” ujar Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aptika Kominfo, I Nyoman Adhiarna dalam *Demo Day HUB.ID 2021* hari kedua yang dilaksanakan secara hibrida dari Hotel Mulia, Jakarta Selatan, Kamis (18/11/2021).



Antisipasi Dampak Negatif Hoaks, Kominfo Putus Akses Ribuan Unggahan

Jakarta Pusat, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pemutusan akses terhadap konten hoaks di dunia maya. Menurut Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi hal itu dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif persebaran konten hoaks.

Dedy Permadi menyontohkan informasi tidak benar atau hoaks mengenai Covid-19 yang beredar di Iran membawa dampak negatif. Hal tersebut, sama dengan yang dialami oleh Indonesia kala informasi tidak benar itu tersebar di berbagai kanal.

Diketahui, catatan Kantor Berita Al Jazeera terkait Hoaks Covid-19. Pada April 2020, lebih dari 700 orang di Iran meninggal dunia dan sekitar 90 orang kehilangan kemampuan melihat akibat keracunan alkohol dikarenakan termakan berita bohong yang menyatakan mengonsumsi alkohol dapat menyembuhkan Covid-19.



Kementerian Kominfo Siap Amankan Frekuensi World Superbike 2021



Mandalika (SDPPI) – Kementerian Kominfo akan menurunkan Tim Pengendali Frekuensi Radio - Ditjen SDPPI untuk mengamankan dan memastikan kelancaran penggunaan frekuensi sepanjang perhelatan event internasional World Superbike (WSBK) 2021 berlangsung, 19 hingga 21 November 2021 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Guna memastikan event WSBK 2021 berjalan lancar, pengawasan tidak hanya pada penggunaan frekuensi yang memiliki Izin Siaran Radio (ISR), melainkan juga terhadap penggunaan frekuensi yang termasuk dalam kategori izin kelas misalnya frekuensi 2.4 GHz dan 5.8 GHz untuk layanan internet dan juga seluruh perangkat wireless yang digunakan oleh kru dan tim yang berlomba.

Dalam gelaran WSBK ini juga akan dihadirkan 5G experience. Rencananya operator seluler akan menghadirkan pengalaman 5G bagi penonton untuk merasakan teknologi *Virtual Reality*, Robot dan Kamera 360. Selain itu untuk meningkatkan kapasitas layanan telekomunikasi, operator seluler akan meng-install BTS Combat yang berlokasi di seputar areal sirkuit dan wilayah penunjang lainnya.

Kominfo Sertifikasi Perangkat, Jamin Siaran Digital Berkualitas

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan sertifikasi dua perangkat yakni *Set Top Box* (STB) dan TV digital yang diperdagangkan di Indonesia. Sehingga, keberadaan siaran digital yang diterima oleh khalayak luas di seluruh pelosok tanah air dapat dipastikan berkualitas.

“Tentu ini dalam koordinasi dengan Kementerian Perindustrian. Sertifikasi ini dilakukan agar STB yang dibeli dapat berfungsi dengan baik sesuai spesifikasi siaran digital dari lembaga penyiaran aman digunakan serta mendapat layanan purnajual dari produsen STB,” kata Menkominfo Johnny Gerard Plate melalui siaran pers yang diterima pada Selasa (16/11/2021).

Dalam melakukan sertifikasi itu, kata dia, pihaknya berlandaskan perundangan yang berlaku. Jelasnya termaktub dalam Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran juga mengatur tentang STB.





Amanat SPBE, Kominfo Kembangkan Aplikasi Portal Nasional

Jakarta, Ditjen Aptika – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) tengah mengembangkan aplikasi Portal Nasional. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang menjadi portal dari kegiatan masyarakat maupun pegawai pemerintahan dan aspek lain yang mencakup informasi, data, serta layanan lainnya.

Aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan kanal layanan yang terintegrasi (portal nasional) dan kanal informasi (dashboard) layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan. Adapun aplikasi ini merupakan implementasi dari Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Kurang dari Satu Bulan, Sudah 36.575.850 Vaksin COVID-19 Tiba

Tangerang, InfoPublik - Dalam waktu kurang dari satu bulan, Indonesia telah menerima sebanyak 36.575.850 dosis vaksin dari berbagai merek. Vaksin yang didapatkan ini dalam bentuk pembelian langsung maupun donasi dari negara sahabat.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh InfoPublik.id dari tahap 110 kedatangan vaksin yang tiba pada Selasa (2/11) hingga kedatangan vaksin tahap 125 yang tiba pada (21/11/2021). Terdapat total sebanyak 15 kedatangan vaksin yang telah tiba di tanah air.

Secara rinci kedatangan berbagai vaksin tersebut antara lain sebagai berikut, pada tahap 110 vaksin Sinovac yang datang sebanyak 4.000.000 dosis, pada tahap 111 vaksin Sinovac yang datang mencapai 4.000.000 dosis, pada kedatangan tahap 112 terdapat vaksin AstraZeneca yang berjumlah 134.560 dosis, pada kedatangan tahap 113 terdapat vaksin AstraZeneca yang berjumlah 680.100 dosis.





Aptika Dorong Penggunaan Identitas Digital untuk Tingkatkan Ekonomi

Jakarta, Ditjen Aptika – Pandemi Covid-19 telah membuat percepatan penggunaan teknologi digital dalam kehidupan masyarakat dan dunia usaha. Ditjen Aptika mendorong akselerasi penggunaan identitas digital melalui kajian dan regulasi.

“Ditjen Aptika sedang melakukan kajian tentang identitas digital, karena kita yakin ke depannya identitas ini sangat penting dalam pengembangan ekonomi digital,” kata Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Milikta Jaya Sembiring dalam acara Fintech Talk Jumat (12/11/2021).

Untuk mendorong peningkatan tersebut, lanjut Milikta, Kementerian Kominfo melalui Ditjen Aptika telah menyiapkan tiga hal. Peningkatan implementasi tersebut tidak hanya ditujukan bagi jajaran pemerintah, tapi juga non pemerintah. “Ada tiga hal yang telah disiapkan oleh Kemkominfo saat ini, yaitu kerangka regulasi, membangun ekosistem, dan inovasi teknologi,” jelas Milikta.

Tingkatkan Daya Saing Produk Indonesia, GNBBi jadi Titik Penting Bangkitkan Bisnis UMKM

Jakarta, Ditjen Aptika – Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) merupakan salah satu program yang menjadi titik penting bagi kebangkitan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah derasnya arus digitalisasi.



“Melalui program GNBBi, diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk Indonesia lewat stimulus pelatihan ataupun pendampingan aktivitas bisnis UMKM ke ruang digital,” tutur Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel A. Pangerapan dalam Seminar Daring Adaptasi Teknologi Digital untuk Memperluas Pasar Digitalisasi UMKM Menembus Lintas Batas Pemasaran, dari Jakarta, Rabu (17/11/2021).



STB Gratis bagi Masyarakat Miskin Dibagikan Paling Lambat 2 November 2022

Jakarta, InfoPublik - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Gerard Plate, menyatakan pemerintah menyiapkan sebanyak 6,7 juta *Set Top Box* (STB) bagi warga yang masuk dalam kategori miskin. Pembagian alat ini kepada kategori tersebut akan dilakukan sesuai dengan tahapan Analog Switch Off (ASO) yang paling lambat pada 2 November 2022.

"Untuk STB ini yang sedang kita siapkan agar 6,7 juta itu tersedia pada waktunya sesuai dengan tahapan ASO paling lambat 2 November 2022," ujar Menkominfo Johnny Gerard Plate yang dikutip melalui siaran persnya pada Selasa (16/11/2021).

Aptika Siapkan Tiga Infrastruktur SPBE untuk Fasilitasi Aplikasi Umum

Jakarta, Ditjen Aptika – Kementerian Kominfo melalui Ditjen Aplikasi Informatika telah menyiapkan tiga infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung pengembangan aplikasi umum. Aplikasi seperti SP4N-LAPOR dan Srikandi dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.

"Ditjen Aptika telah menyiapkan tiga infrastruktur SPBE, yaitu Pusat Data Nasional (PDN), Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Diharapkan melalui fasilitas tersebut, keterkaitan antar aplikasi umum sudah mulai bisa dikembangkan," kata Sekretaris Ditjen Aptika, Slamet Santoso saat Webinar Transformasi Digital, Kamis (18/11/2021).



• TOP

HOAKS

NOV 2021

Breaking news

Investasi Online Mengatasnamakan Bank Indonesia???**CEK FAKTANYA!****LAMBE HOAKS** Siap kupas tuntas hoaks viral dan berdampak | Siap kupas tuntas hoaks viral

1 [DISINFORMASI] Vaksin Covid-19 Memiliki Tingkat Kematian 174 Kali Lebih Tinggi pada Anak-anak daripada Virus Covid-19

Beredar sebuah unggahan narasi yang mengklaim bahwa vaksin Covid-19 menyebabkan angka kematian 174 kali lebih tinggi pada anak-anak dibandingkan dengan kematian akibat tertular virus Covid-19 itu sendiri.

Dilansir dari reuters.com, klaim yang menyebut vaksin Covid-19 menyebabkan angka kematian 174 kali lebih tinggi pada anak-anak dibandingkan dengan kematian akibat tertular virus, sama sekali tidak didukung dan belum dikonfirmasi oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau produsen vaksin. Sebagai contoh, Keanna Ghazvini, Senior Associate of Global Media Relations Pfizer, mengatakan tidak ditemukan adanya kasus kematian dalam uji coba vaksin Pfizer pada anak-anak berusia 12-15 tahun, yang melibatkan 2.260 peserta. Selanjutnya, tidak juga ditemukan kasus kematian yang dilaporkan dalam percobaan Moderna pada remaja berusia 12-17, yang melibatkan 3.732 peserta. Data tersebut secara tidak langsung menyanggah klaim yang beredar.

2 [DISINFORMASI] Poster Iklan Vaksin Covid-19 Mengajak Donasikan Organ Anak-Anak

Beredar sebuah gambar poster berbahasa Inggris yang mengiklankan vaksin Covid-19 dengan mengajak orang tua untuk menyumbangkan organ anak-anak mereka. Poster tersebut bertuliskan "COVID vaccines here. No appointment needed." dan "Don't forget to donate your children's organs."

Faktanya, gambar poster tersebut telah diedit. Dilansir dari reuters.com, poster asli pada iklan vaksin Covid-19 itu tidak mendorong orang tua untuk menyumbangkan organ anak-anak mereka. Poster itu memiliki teks asli dalam bahasa Spanyol yang berisi informasi bahwa vaksin Covid-19 telah tersedia dan tidak perlu membuat janji. Teks itu berbunyi: "Vacunas de COVID aquí. Sin cita previa." Hasil pencarian gambar menemukan bahwa gambar asli yang belum diedit ditemukan pada situs patriots.com



3 [HOAKS] Investasi Online Mengatasnamakan Bank Indonesia

Beredar sebuah tangkapan layar pada grup Telegram investasi online yang mengatasnamakan Bank Indonesia.

Faktanya, melalui website resminya Bank Indonesia menyatakan bahwa investasi online tersebut adalah hoaks. Pihaknya tidak pernah menawarkan kegiatan investasi online.

[HOAKS] BBM dan Elpiji Akan Mengalami Kelangkaan Akibat Kebakaran di Kilang Pertamina RU IV Cilacap

Beredar sebuah unggahan yang memberikan informasi bahwa akan terjadi kelangkaan minyak akibat kebakaran di beberapa tangki di Kilang Pertamina RU IV Cilacap pada 13 November 2021.

Faktanya, informasi akan terjadi kelangkaan minyak pasca kebakaran di beberapa tangki di Kilang Pertamina RU IV Cilacap tersebut adalah tidak benar dan bukan berasal dari sumber kredibel. *Corporate Secretary Subholding Refining & Petrochemical* PT Kilang Pertamina International (KPI) Ifki Sukarya memastikan, insiden kebakaran pada salah satu tangki di Kilang Pertamina Cilacap tidak akan berdampak terhadap distribusi BBM dan elpiji kepada masyarakat. Ditegaskan pula oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan, Kilang Cilacap masih tetap beroperasi meski terjadi kebakaran pada tangki kilang, sehingga tidak berpengaruh pada perencanaan produksi.

5 [HOAKS] Tes Swab Covid-19 Adalah Vaksinasi yang Terselubung

Beredar sebuah potongan video berbahasa asing yang mengklaim bahwa orang yang telah di-swab test Covid-19 tanpa sadar telah divaksinasi karena vaksin Covid-19 sudah disamarkan dalam bentuk swab test.

Dilansir dari AFP, klaim tersebut dibantah oleh para ahli medis. WHO juga mengkonfirmasi bahwa vaksin tidak dapat diberikan melalui swab atau menggunakan alat swab. WHO menjelaskan tes swab melalui hidung dirancang untuk mengumpulkan sampel untuk menguji keberadaan virus, dan bukan untuk tujuan vaksinasi. Lebih lanjut, Geoffrey Kulubusia, seorang ahli imunologi di Kenya, dan Shabir Madhi, seorang profesor vaksinologi Afrika Selatan, mengatakan bahwa rekomendasi untuk vaksin Covid-19 hanya untuk intramuskular. Keduanya menepis klaim tentang vaksin yang diberikan selama tes Covid-19.

6

[HOAKS] Orang yang Disuntik Vaksin Cenderung Mengalami Perubahan Mental dan Fisik

Beredar sebuah unggahan video pada media sosial Facebook yang mengklaim bahwa orang yang disuntik vaksin cenderung mengalami perubahan mental dan fisik. Dalam narasi unggahan yang telah beredar tersebut dikatakan bahwa, "Orang-orang yang sudah divaksin akan cenderung berubah mental dan fisik, membuat lambat berpikir, sensitif dan semakin agresif (syndrome). *So don't do it jabs*".

Berdasarkan penelusuran, klaim video yang mengatakan bahwa orang yang disuntik vaksin cenderung mengalami perubahan mental dan fisik adalah tidak benar. Faktanya, seorang pilot dalam video tersebut bercerita bahwa dia telah menjadi pilot selama 18 tahun dan harus mendapat vaksinasi Covid-19. Itu bukan sebuah pilihan, tapi ultimatum. Dalam video itu juga, pilot tersebut sama sekali tidak menyinggung vaksinasi Covid-19 dapat menyebabkan gangguan mental dan fisik. Selain itu, tidak ada pernyataan bahwa vaksin menyebabkan lambat berpikir, sensitif, dan semakin agresif. Dia juga tidak mengajak orang lain untuk tidak melakukan vaksinasi Covid-19. Disamping itu, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Dia menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara vaksin dengan lambat berpikir, karena vaksin melatih sistem imunitas.

7

[HOAKS] Pesan WhatsApp Mengatasnamakan Kapolresta Tangerang Minta Bantuan Uang Sebesar Rp25 Juta

Beredar sebuah akun WhatsApp mengatasnamakan dan menggunakan foto profil Kapolresta Tangerang Kombes Pol. Wahyu Sri Bintoro. Akun tersebut kemudian mengirimkan pesan yang meminta untuk mentransferkan sejumlah uang ke sebuah nomor rekening.

Faktanya, akun tersebut merupakan akun palsu. Kapolresta Tangerang Kombes Pol. Wahyu Sri Bintoro menegaskan bahwa permintaan sejumlah uang oleh akun yang menggunakan fotonya itu dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi. Untuk itu, Wahyu meminta masyarakat untuk tidak percaya bila menerima pesan WhatsApp yang mengatasnamakan dirinya, terlebih bila oknum tersebut meminta sejumlah uang.

8 [HOAKS] Istri CEO Pfizer Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Vaksin Covid-19

Beredar di media sosial, sebuah artikel yang berisi informasi bahwa Myriam Bourla, istri dari Chief Executive Officer (CEO) Pfizer Albert Bourla telah meninggal dunia akibat komplikasi dari vaksin Covid-19. Ia dituliskan meninggal di Instalasi Gawat Darurat (IGD) di New York-Presbyterian Lawrence Hospital setelah dibawa oleh paramedis. Penyebab kematian telah terdaftar sebagai komplikasi dari vaksin Pfizer.

Faktanya, informasi tersebut adalah hoaks. Dilansir dari kumparan.com yang mengutip dari healthfeedback.org, perwakilan dari Pfizer mengatakan bahwa Myriam Bourla masih hidup dan sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam artikel di internet tersebut. Albert Bourla masih mengunggah foto bersama dengan istrinya Myriam Bourla pada akun Twitternya di hari yang sama dengan penerbitan artikel tersebut. Albert Bourla bersama dengan istrinya menunjukkan foto menghadiri acara Distinguished Leadership Awards - Atlantic Council, pada 10 November 2021 di Washington DC.



9

[HOAKS] Tes Swab Dapat Menggores Amigdala dan Dilakukan di Zaman Mesir Kuno untuk Membuat Budak Menjadi Patuh

Beredar sebuah unggahan pada media sosial Twitter, yang narasinya menyatakan bahwa pada zaman Mesir Kuno, orang-orang melukai bagian amigdala dari otak para budak untuk membuat mereka lebih patuh dan tunduk kepada majikannya. Dalam unggahan tersebut, disertakan beberapa foto yang menunjukkan proses tes swab dan sebuah ilustrasi tentang proses serupa yang dilakukan di zaman Mesir Kuno.

Dikutip dari Reuters, seorang Profesor Neuroteknologi dari Imperial College London, Simon Schultz menegaskan bahwa tes swab tidak dapat menyentuh maupun merusak bagian amigdala. Selain itu, seorang juru bicara dari Departemen Kesehatan Masyarakat Inggris juga menjelaskan bahwa rongga hidung dan otak manusia dipisahkan oleh bagian yang disebut "cribriform plate", sehingga tes swab tidak akan menyentuh bagian otak dan amigdala manusia. Tidak ada bukti bahwa metode tes swab digunakan di zaman Mesir Kuno untuk membuat budak menjadi patuh kepada majikannya. Ilustrasi yang disertakan dalam narasi bukan merupakan proses penggoresan amigdala kepada budak, melainkan ilustrasi tentang metode pengobatan mata yang dilakukan oleh masyarakat Mesir Kuno.

10

[HOAKS] CEO Pfizer Ditangkap FBI karena Penipuan dan Pemalsuan Data Vaksin

Beredar sebuah hasil tangkapan layar dari artikel berita dengan judul "Breaking News! CEO Pfizer Ditangkap, Didakwa dengan Penipuan, Pemalsuan Data Vaksin".

Unggahan yang menyebut CEO Pfizer ditangkap, didakwa dengan penipuan dan pemalsuan data vaksin adalah hoaks. Dilansir dari cekfakta.tempo.co, bahwa menurut Media Bias Fact Check yang merupakan organisasi nirlaba untuk memeriksa bias media di Amerika Serikat, situs Conservative Beaver yang menjadi rujukan artikel pada tangkapan layar tersebut telah dinilai sebagai situs yang bias dan tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Situs tersebut dikategorikan bias berdasarkan penggunaan sumber yang buruk, kurangnya transparansi, dan sering mempublikasi informasi palsu dan berita palsu yang sebenarnya. Selain itu, Politifact yang merupakan pemeriksa fakta kredibel lainnya di Amerika Serikat telah mendokumentasikan satu berita palsu yang diterbitkan situs Conservative Beaver pada awal Januari 2021 terkait penangkapan Paus Fransiskus sehubungan dengan 80 dakwaan termasuk kepemilikan pornografi anak, perdagangan manusia, inses, kepemilikan obat-obatan terlarang dan penipuan.

KAMI SIAP BERANTAS

PINJOL ILEGAL

